

JEJAK TENDER JAKARTA



"Alat ukur kinerja BPPBJ hanya satu. Selamat atau tidak dari jeratan hukum. Di bawah kepemimpinan Blessmiyanda, tak seorang pun pegawai masuk penjara."

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, **M. Taufik**

"Saya melihat proses pengadaan barang dan jasa di Pemprov DKI dijalankan dengan semangat transparan dan akuntabilitas yang tinggi sesuai aturan."

Anggota DPRD DKI, **Wa Ode Herlina**

"BPPBJ DKI adalah kelinci percobaan LKPP yang sukses."

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2015 - 2017
Agus Prabowo

"Sepengamatan saya, belum ada sosok lain yang bisa menakhodai BPPBJ dengan tepat selain Pak Blessmiyanda."

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2016 - 2020, **Sussie Nurhati**

"Pendampingan dan supervisi secara langsung oleh Pak Bless dan BPPBJ memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi Jaktour."

Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo, **Novita Dewi**



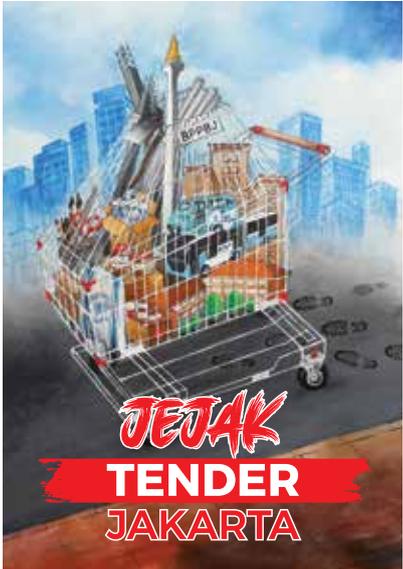
ARSIP METRO NUSANTARA



JEJAK
TENDER
JAKARTA



JEJAK TENDER JAKARTA



JEJAK

TENDER

JAKARTA

**JEJAK
TENDER
JAKARTA**

Editor : Windoro Adi

Penulis : Theo Yonathan Simon Laturiuw
Mohammad Yusuf

Foto : Eddy Ismail

Desain Sampul : Barlinsrikaton

Penata Letak : Kuntoro

Cetakan Pertama : Desember 2020

ISBN : 978-623-90575-3-4

Diterbitkan pertamakali oleh : Arsip Metro

**JEJAK
TENDER
JAKARTA**

DAFTAR ISI

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta).

Kata Sambutan

Anies Baswedan, Ph.D., Gubernur DKI Jakarta

vii

Kata Pengantar

Blessmiyanda, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa DKI Jakarta

xi

BAB 1. PNS ISTIMEWA

1

SK 95

2

Tunjangan 10 Kali Gaji

9

Struktur Pokja di Secarik Kertas

13

“Banjir” Berkas

20

“Tumpukan Berkas Pasar Malam”

25

Janji yang Tak Pernah Datang

32

BAB 2. DIOMBANG-AMBING KEGADUHAN

43

Belitan Masalah Hukum

44

Kejutan PNS Non Job

52

Pro Kontra Lelang Konsolidasi

57

Protes Kontrak Payung

64

Lelang Tender di Mata Wartawan

70

Dicopot, Dipasang Lagi

78

OK O Trip yang Unik

84

Taktik Katalog Lokal	94
Gaduh Monas	101
Terbiasa dengan Ancaman	108
E-Order, Mengurai Benang Kusut	111

BAB 3. BUAH-BUAH TENDER	119
Rumah Tangga Diselamatkan Jak Lingko	120
Senyum dari Rusunawa	129
Inovasi dari Proyek Sekolah	138
Rencana Induk Maksimalkan Katalog Trotoar Jakarta	154
Pengorbanan Renny	166
Jalan Terang UKM	176

BAB 4. LAYAK DAPAT BINTANG	185
• Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik Layak Dapat Bintang	186
• Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2015 – 2017), Agus Prabowo Kelinci Percobaan	190
• Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susie Nurhati Pandangan yang Membaik	195
• Manajer Wilayah DKI Jakarta PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Edwin Sitanggang Jadi Lebih Kompetitif	203
• Kepala Bank DKI Jakarta Cabang Balaikota, Bambang Nurcahyo Inisiatif Sinergitas BPPBJ	207
• Kepala RSUD Tarakan, Dian Ekowati Konsolidasi dan Mitigasi Resiko	211
• Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo, Novita Dewi Bantuan Penting BPPBJ	217
• Anggota DPRD DKI, Herlina Semangat Transparan BPPBJ	221

BAB 5. RIWAYAT KARIR KEPALA BPPBJ	223
• I Dewa Gede Soni Aryawan, M.Sc.	226
• Ir. Drs. Irvan Amtha, M.Sc.	228
• Blessmiyanda, S.Pi, M.Si	230
• Ir. Indrastuty Rosari Okita, MT	232

KATA SAMBUTAN

ANIES BASWEDAN, Ph.D.
GUBERNUR DKI JAKARTA

*Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh*

Izinkan saya mengapresiasi prakarsa Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta, menerbitkan buku *Jejak Tender Jakarta*. Buku yang ditulis oleh Theo Yonathan Simon Laturiuw dan Mohammad Yusuf dan disunting Windoro Adi ini merupakan buku pertama di Indonesia yang mengisahkan lika-liku perjalanan tender/lelang di Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan rentang waktunya kurang lebih satu dasawarsa, 2010-2020. Buku ini merupakan catatan dan informasi penting bagi publik



yang ingin melakukan proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Secara kelembagaan BPPBJ hadir untuk memastikan bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terpusat di satu pintu, transparasinya terjamin, berdasarkan akuntabilitas dan berkarakter dan memegang prinsip anti korupsi dalam setiap proses tender. Ini bagian penting kami dalam membangun sistem berdasarkan *good governance* yang sudah menjadi tekad utama kami. Selain itu, dalam proses pembangunan kota ini kami menggunakan pendekatan kolaborasi.

Diantaranya adalah kami mendorong kolaborasi warga dalam pengadaan barang/jasa. Jika selama ini pemerintah cenderung melaksanakan sendiri program-programnya dan warga menunggu dilayani saja, sekarang ini kami mengajak warga untuk menjadi mitra pemerintah. Agar bersama-sama menyelesaikan masalah kota ini. Ini yang kita sebut sebagai Kota Kolaborasi. Dengan kolaborasi tentu saja akan membuat kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin akuntabel dan transparan.

Alhamdulillah, berkat ikhtiar bersama pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas inovasi e-Order. Inovasi ini lahir dari keinginan kami untuk memastikan hadirnya kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam proses tender. Tidak mengecilkan yang besar, sekaligus ikut membesarkan yang

kecil. Jangan sampai yang kecil tertinggal apalagi tergilas. Kota Jakarta harus dibangun dengan semangat gotong royong, semangat kolaborasi.

Kami berharap penerbitan buku ini bisa menjadi pengingat bagi kami untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui sistem teknologi terkini, membangun sistem aplikasi kota cerdas (*smart city*), efektif, cepat, mudah dan mendorong lebih luas keterlibatan warga.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 30 Desember 2020

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

KATA PENGANTAR

BLESSMIYANDA

KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA DKI JAKARTA



BAGI saya, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa DKI Jakarta (BPPBJ) adalah pohon kehidupan. Saya seperti sedang menanam, memupuk, menyirami, dan menyanginya. Kini pohon itu sudah mulai dewasa, mulai berakar kuat, dan berbuah. Begitulah BPPBJ di mata saya. Saya bahagia di sini.

Ini suatu pekerjaan yang terlalu menarik.

Institusi ini begitu lemah ketika awal saya masuk pada tahun 2015. Kekosongan ada di mana-mana. Kelemahan begitu terang benderang. Masalah terus-menerus muncul. Tradisi tidak baik kadung terbentuk. Rasanya perubahan nyaris tak mungkin. Akan tetapi, faktanya BPPBJ bisa ber-

ubah. Institusi ini bisa bergerak ke arah lebih baik.

Kini buahnya sudah bisa dirasakan warga Jakarta. BPBBJ bisa mengawal berbagai program gubernur. Mulai dari rehab total sekolah, Jak Lingko, menggerakkan UMKM lewat e-order, revitalisasi trotoar yang diwujudkan lewat katalog lokal, dan masih banyak yang lainnya.

Izinkan saya menulis bahwa saya telah berhasil membangun sistem di BPPBJ. Dari apa yang telah saya jalani, ada tiga sikap penting yang harus ada di setiap personel BPPBJ dalam rangka membangun sistem. Kompetensi, integritas, dan nyali. Ya, nyali juga penting. Ketiga sikap itu adalah satu kesatuan yang harus dimiliki setiap pegawai dan pejabat BPPBJ, dari anggota pokja, kasubbid, kabit, sampai kepalanya.

Punya kompetensi, tapi tak punya integritas, akan hancur. Begitu juga jika punya integritas, tapi tak punya kompetensi. Punya kompetensi dan punya integritas, tapi tak punya nyali, juga pasti hancur. Saya sudah melihat ini. Orang yang bekerja di BPPBJ butuh ketiga sikap itu. Tanpa salah satunya mereka akan sulit bekerja, sulit menentukan sikap, tak mampu menentukan tujuan, takut menghadapi fitnah, gemetar saat beradu muka dengan penegak hukum.

Oleh karena itu, saya tidak heran bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pernah mengeluarkan data yang cukup mengejutkan. BPPBJ disebut 1 berbanding 10 dengan instansi lain. Dari 10 pegawai, hanya 1 orang yang bisa masuk BPPBJ. Itu data LKPP.

Mungkin memang tidak banyak orang yang memiliki tiga sikap itu dalam dirinya.

Saya tidak akan sedih apabila di kemudian hari saya dicopot dari jabatan Kepala BPPBJ. Wajar. Semuanya harus berganti. Pergeseran jabatan itu hal biasa. Dedaunan di pohon pasti akan lepas, lalu tumbuh lagi yang baru. Tidak ada daun yang menempel sepanjang tahun. Begitu cara pohon merawat diri. BPPBJ pun sama. Pergantian pasti terjadi. Semua orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.

Namun, saya akan sedih jika di kemudian hari BPPBJ diisi orang-orang yang tidak memiliki tiga sikap tadi. Kompetensi, integritas, dan nyali. Bagaimana BPPBJ mau berjalan baik kalau orang-orangnya tidak punya sikap-sikap itu. Mudah-mudahan tradisi mencari orang dengan tiga sikap itu terus dijalankan BPPBJ sampai kapan pun.

Lalu apakah BPPBJ sudah berhasil sampai saat ini? Jawabannya adalah belum. Bagi saya, BPPBJ dianggap berhasil jika institusi itu dibubarkan, tender dihapuskan. Ya, ketika sudah tidak dibutuhkan lagi, berarti BPPBJ sudah berhasil. Itu tujuan akhirnya.

Saat ini sebenarnya BPPBJ sedang berjalan ke arah itu. Tender umum terus dikurangi. Bahkan perpres terbaru menyebutkan bahwa tender adalah pilihan terakhir. Pengadaan barang/jasa lebih baik dilakukan lewat *marketplace*. Jakarta kini sudah memperbanyak katalog. Itu salah satu langkah mewujudkan mimpi mengakhiri tender umum. Mudah-mudahan semua itu bisa terwujud suatu hari nanti.

Semua akan indah pada waktunya.

Buku berjudul *Jejak Tender Jakarta* ini memotret sepotong kisah BPPBJ. Setidaknya dalam enam tahun pertamanya. Mengisahkan mengenai peristiwa yang dialami para pegawai di awal-awal, masalah hukum yang pernah membelit, sampai hiruk pikuk BPPBJ. Mudah-mudahan buku ini dapat dinikmati dan menjadi tambahan pengetahuan bagi Jakarta.



BAB 1

PNS ISTIMEWA

SK 95

RATINA YUSWARI BARU SELESAI MAKAN SIANG KETIKA BAGIAN TATA USAHA MEMBERINYA PESAN ANEH, AWAL MARET 2014. “BU, ADA SALAM DARI AHOK,” UJAR PETUGAS TATA USAHA KEPADANYA.

Dia menganggapnya hanya candaan. “Oh ya, salam balik, ya,” kata Ratina. Rupanya petugas tata usaha itu serius. “*Bener* Bu, ada SK ini,” balasnya, lalu menyodorkan sebuah kertas.

Ratina melongong begitu membuka SK tersebut. Surat yang dibuka Ratina itu adalah surat keputusan mutasi sejumlah nama pegawai negeri sipil (PNS) ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), institusi baru di Pemprov DKI Jakarta. Surat itu kemudian disebut SK 95. Dalam SK itu ada 95

nama yang wajib pindah ke ULP. “Saya tidak pernah tahu prosesnya, dan tiba-tiba dapat SK,” kata Ratina.

Isu pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) sebenarnya lekas terdengar setelah keluar perpres baru pada tahun 2012. Perpres memerintahkan agar dibuat ULP tersendiri untuk melayani seluruh lelang di tiap pemprov, termasuk DKI Jakarta. Dengan begitu panitia pengadaan barang dan jasa (panitia pengadaan) di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan lenyap.

Namun arah perubahan ini tidak disadari panitia pengadaan di lingkungan instansi Pemprov DKI Jakarta. Tak mengherankan bila perpres tersebut tidak banyak dibahas kalangan panitia pengadaan. Makanya wajar ketika Ratina terkejut begitu tahu dirinya dipindah ke ULP. Hal serupa terjadi terhadap nama-nama lain dalam SK tersebut.

Sebelum munculnya perpres, panitia pengadaan hanya jabatan rangkap. Panitia pengadaan cuma pekerjaan sampingan. Pekerjaan pokok anggota panitia pengadaan adalah jabatan fungsional individu di masing-masing instansi.

Tanpa banyak yang tahu, sebenarnya menjelang akhir tahun 2013, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mulai menginstruksikan setiap SKPD mengirimkan nama-nama panitia pengadaannya. Tiap-tiap instansi merespons secara berbeda. Beberapa PNS di panitia mengetahui isu ini, tetapi lebih banyak acuh.

Andriyanto Mawardi adalah salah satu PNS yang mengikuti isu pembentukan ULP cukup rinci. Andriyanto melihat



Ratina Yuswari di ruang kerjanya pada awal November 2020. Dia adalah salah satu PNS yang namanya masuk di SK 95 pada tahun 2014 lalu. Kini, tahun 2020, ia sudah menjabat Kepala UPPBJ Kota Jakarta Barat.

ada perbedaan sikap dari tiap-tiap SKPD di Pemprov DKI dalam menyikapi pembentukan ULP.

Instansi tempat Andriyanto bekerja, Biro Kerja sama Luar Negeri, seolah setengah hati mengirimkan nama-nama para panitia pengadaannya. Sikap itu muncul karena beredar isu jika dikirimkan seluruh nama panitia pengadaannya, maka akan tersedot semuanya ke ULP. Biro Kerja sama Luar Negeri lalu hanya mengirimkan enam nama termasuk Andriyanto. Dari enam nama itu, hanya dua nama yang masuk dalam SK 95.

Kekhawatiran pegawainya tersedot ke ULP bukan hanya terjadi di Biro Kerja sama Luar Negeri, tetapi di SKPD lain. Salah satunya di Biro Tata Pemerintahan. “Informasi yang saya terima menyebutkan, Biro Tata Pemerintahan

tidak mengirim nama-nama panitia pengadaannya,” kata Andriyanto. Itu artinya, setiap instansi berbeda sikap dalam merespons pendirian ULP.

Lebih lanjut, Andriyanto ingat betul bahwa di awal tahun 2014, ULP sudah punya struktur. Hal itu ditandai dengan pelantikan pimpinan ULP.

Para pimpinan ULP sudah dilantik lebih dulu sebelum anggotanya mendapat arahan dan menerima SK. Kepala ULP yang dilantik kala itu adalah I Dewa Gede Soni Aryawan. Sekretaris, Dudi Gardesi Asikin. Mereka dilantik bersama sejumlah pejabat eselon III dan IV lainnya.

“Pelantikan mereka seingat saya di lapangan Balai Kota DKI,” kata Andriyanto. Itu artinya lembaga ULP sudah terbentuk menjelang awal 2014. Hanya banyak anggota panitia pengadaan tidak menyadari proses ini.

KESEMPATAN BARU

Tidak semua orang dalam SK 95 berbahagia. Pada intinya ada tiga kubu ketika itu. Mereka yang senang, tidak senang, dan ikut saja.

Ratina salah satu orang yang bahagia dengan keputusan tersebut. Ratina sebelumnya bekerja sebagai PNS di Kementerian Pertanian, tapi pada 1999 dipindah ke Dinas Peternakan DKI lantaran otonomi daerah. Ia kemudian diminta merangkap jabatan sebagai panitia pengadaan. Namanya kemudian tercantum dalam SK 95 dan diundang mengikuti pengarahan pada bulan Maret.

Pihak TU, kata Ratina, agak ragu memberikan surat itu. Mereka takut Ratina tidak ingin pindah sehingga disebut bahwa itu merupakan pilihan.

“Waktu itu saya bisa memilih, jika tidak setuju nama saya masuk dalam SK 95, saya bisa menolak,” ujar Ratina. Ratina memilih menerima tantangan itu. Dia nyaman bekerja di panitia pengadaan. “Ada pengalaman, kawan, dan tantangan baru di sana,” ucap Ratina.

Di jabatan fungsionalnya sebagai *paramedic veteriner*, jam terbang kerja Ratina sudah tergolong tinggi, sampai akhirnya dia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah dia mau menghabiskan hidupnya sebagai PNS di laboratorium?

Munculnya SK 95 menjadi angin segar buat Ratina. “Setelah saya mendapat SK tersebut, saya melihat kesempatan baru. Saya tidak harus menghabiskan masa PNS saya di laboratorium. Itu sebabnya saya terima peluang tersebut,” tutur Ratina.

Sebaliknya dengan Ahmad Zulfikar. Ketika namanya masuk dalam SK 95, ia menyesal. “Kala itu saya sedang asyik-asyiknya bekerja di PTSP Jakarta Utara,” ucap Ahmad Zulfikar. PTSP Jakarta Utara saat itu sedang gencar memperbaiki sistem pelayanan di kelurahan. Ahmad Zulfikar ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia senang.

Oleh karena itulah Zulfikar keberatan pindah ke ULP. Atasannya pun menghendaki dia tidak dipindah ke ULP. Tetapi karena muncul isu, mereka yang menolak ditempatkan di ULP akan dipindahkan ke kelurahan, Ahmad Zulfikar



Ahmad Zulfikar di sudut kerjanya di UPPBJ Jakarta Barat. Zulfikar adalah salah satu pegawai pertama BPPBJ. Dia masuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) pada tahun 2014 setelah namanya tertera di SK 95.

khawatir. Ia akhirnya memilih menerima dipindahkan ke ULP.

“Isunya santer. Terkesan tidak main-main. Saya tidak mau mengambil risiko dipindahkan ke kelurahan karena menolak dipindahkan ke ULP. Oleh karena itu, saya memilih patuh, dan tercatat dalam SK 95,” ujar Ahmad Zulfikar.

Namun, sebenarnya menarik Zulfikar ke ULP adalah pilihan tepat. Sebagai PNS, Ahmad Zulfikar mempunyai banyak pengalaman di bidang pengadaan barang. Ia mulai terlibat dalam urusan pengadaan barang sejak 1996. Pada tahun itu Ahmad dipindah dari Dinas P&K ke Dinas Pencatatan Sipil. Atasannya menugaskan dia mengurus soal pengadaan. Di sanalah setahap demi setahap ia mulai mengerti seluk beluk kegiatan pengadaan barang. Tahun

2003 ia dipindah ke KPU, dan ikut dalam panitia pengadaan barang. Pengalamannya banyak, pilihan tepat.

Eko Setiawan, mengalami kondisi lain. Dia sudah menjabat sebagai Kasubbag Bina Pemerintahan di Jakarta utara ketika tahu namanya masuk SK 95.

Artinya Eko sudah berada di jalur tepat dari pendidikannya. Dia lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) sehingga sudah tepat jika dia menjadi Kasubbag Bina Pemerintahan. Kariernya sudah benar-benar lurus.

“Saya kaget waktu tahu nama saya dipanggil untuk masuk ULP,” kata Eko. Isu ini sebenarnya santer di kalangan anak baru. Di kantor Eko bekerja, para PNS baru yang sebenarnya cukup yakin mereka akan dipindah ke ULP. Makanya Eko terkejut ketika justru dirinya yang ditarik.

Eko mengaku bimbang ketika itu. Dia sama sekali tidak mengharapkannya. Kebingungan muncul karena ia harus meninggalkan jabatannya, dan kembali ke posisi staf di ULP.

Tapi Eko memilih memikirkan kariernya ke depan. Dia perlu kompetensi pengadaan barang dan jasa dalam perjalanan karier selanjutnya sebagai PNS. Kompetensi barang dan jasa akan digunakan di semua tingkatan. Ini bagian dari pengembangan diri. Tak boleh ditolak.

“Jangan sampai saya nanti eselon III terus saya tidak paham substansi pengadaan barang dan jasa. Itukan kompetensi wajib,” ujar Eko. Dia jadi bergidik sendiri membayangkan jika dirinya menolak. Ia pun rela melepas jabatan eselon IV-nya.



Tunjangan 10 Kali Gaji

MARET 2014, 95 ORANG HADIR DI RUANG RAPAT GEDUNG DINAS TEKNIS DI JALAN ABDUL MUIS, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT. MEREKA MENUNGGU PENGARAHAN PIMPINAN, SAMBIL MENDUGA-DUGA NASIBNYA SETELAH TERCATAT DALAM SK 95.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, datang bersama Sekretaris ULP Dudi Gardesi Asikin. Wakil Gubernur DKI yang populer dipanggil Ahok itu lalu menyampaikan betapa mendesaknya pembentukan ULP. Ia memaparkan soal kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dan tugas-tugas mereka di ULP. Untuk sementara, tuturnya, ULP ada di bawah Badan Pelayanan Keuangan Daerah (BPKAD).



Inilah gedung Dinas Teknis Pemprov DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di gedung inilah pengarahan pertama bagi pegawai ULP angkatan pertama digelar. Di tempat ini pula para PNS yang ditarik ke ULP diiming-imingi akan memperoleh tunjangan 10 kali gaji pokok.

“Jadi Bapak dan Ibu ini akan menjadi PNS istimewa. Kalian semua nanti akan mendapat tunjangan khusus sebesar 10 kali gaji,” ujar Ahok. Tunjangan sebesar itu sesuai dengan beban tugas Bapak dan Ibu di ULP. ULP butuh tenaga yang berintegritas dan produktif,” tegas Ahok.

Saat mendengar tunjangan khusus sebesar 10 kali gaji, mereka terkejut, senang, dan bertepuk tangan. Suara tepuk tangan mereda setelah Ahok mengingatkan agar seluruh jajaran ULP harus lebih fokus bekerja. Membangun mimpi baru, semangat, dan harapan baru hidup yang lebih sejahtera, dengan kerja keras.

“Mulai besok, kalian semua pindah kantor ke BPKAD dulu sementara kami menyiapkan ruangan yang representatif dan nyaman untuk kalian,” tegas Ahok. Tepuk tangan kembali pecah. Ahok kemudian memaparkan mengenai peran dan tugas ULP dengan jelas dan terbuka.

Keraguan dan sikap sebagian calon pegawai ULP yang cenderung menolak bergabung di ULP sirna saat mendengar penjelasan Ahok. Saat sesi tanya jawab berlangsung, tak seorangpun di antara ke-95 orang yang mengangkat tangannya, menyatakan menolak bergabung di ULP.

Setelah pertemuan tersebut, di lingkungan pegawai Pemprov DKI Jakarta tumbuh kebanggaan akan ULP. Mereka yang menjadi bagian dari ULP merasa dirinya istimewa, karena mempunyai tunjangan gaji yang istimewa.

Pujian Ahok terhadap para calon pegawai ULP tidak berhenti di ruangan itu. Dalam berbagai acara atau upa-

cara, calon pegawai ULP kerap menghampiri Ahok, dan meminta foto. Pada kesempatan seperti itulah Ahok lagi-lagi mengistimewakan pegawai ULP.

“Pak, kami calon pegawai ULP. Mau foto bareng dong Pak,” kata salah seorang di antara calon pegawai ULP. Ahok pun membalas jenaka, “Wah, ini dia calon yang bakal dapat tunjangan 10 kali gaji,” sapa Ahok. Tawa pun meledak.



Struktur Pokja di Secarik Kertas

SEKITAR APRIL 2014, KEGIATAN DI ULP SUDAH MULAI BERJALAN. CALON PEGAWAI ULP YANG BERJUMLAH 95 ORANG ITU MULAI BEKERJA DI SATU RUANG RAPAT BERKAPASITAS 100 ORANG DI BLOK G, SELAMA SEPEKAN, SEMENTARA RUANG KERJA PERMANEN MEREKA SEDANG DISIAPKAN. SISTEM ABSEN SIDIK JARI, DIGABUNG DENGAN PEGAWAI BPKD LAINNYA.

Sepekan kemudian, ke-95 pegawai ULP mulai menempati ruang kerja permanen mereka di lantai 20 dan lantai 21 Blok H, ruangnya masih kosong, tanpa meja, kursi, dan perabot perkantoran lainnya seperti komputer dan mesin fotokopi. Ruang juga belum diberi sekat-sekat. Sebagian

perabot kemudian diambil dari unit lain. Meski demikian, jumlah komputer masih belum mencukupi. Agar bisa bekerja, beberapa orang ULP memanfaatkan laptop pribadi mereka.

Struktur organisasi lalu dibentuk dalam kondisi minimnya sarana dan prasarana kantor. Ketika itu kepala ULP dan sekretaris membentuk himpunan dan Kelompok Kerja (Pokja). Total ada enam himpunan. Di dalam tiap-tiap himpunan itu terdapat empat pokja.

Himpunan pertama ditunjuk menangani lelang di Jakarta Pusat dan dinas kesehatan. Himpunan kedua menangani seluruh dinas yang berkantor di Jatibaru, Tanah Abang, atau dinas teknis. Himpunan ketiga bertugas menyelenggarakan lelang dinas-dinas yang berlokasi di Jakarta Selatan.

Himpunan keempat menangani dinas kebersihan dan Pemerintah Kota Jakarta Timur. Himpunan kelima bekerja untuk lelang di Kabupaten Kepulauan Seribu, badan arsip, serta dinas kelautan dan perikanan. Himpunan terakhir, himpunan keenam memiliki wilayah kerja paling besar, yakni Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Setiap pokja diisi lima orang, terdiri atas seorang ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota. Dengan demikian, setiap himpunan terdiri atas 20 personel. Sekretaris ULP kala itu, Dudi Gardesi Asikin, membuat dua model pembentukan struktur pokja.

Model pertama, ia meminta tiap-tiap anggota pokja menunjuk ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Model kedua, untuk mempercepat proses pembentukan pokja,



ULP sempat berkantor di lantai 7 Blok H Balaikota sebelum akhirnya memiliki kantor sendiri di gedung blok G. Pegawai ULP sempat menjalani satu tahun bekerja dalam kondisi minimal, sebelum akhirnya memiliki peralatan lengkap seperti sekarang.



Bagian ruang tunggu di Kantor BPPBJ DKI di lantai 19 gedung Blok G Balaikota DKI Jakarta.

Dudi Gardesi mendatangi pokja yang masih sulit membentuk struktur organisasi.

Ia lalu bertanya, siapa di antara anggota pokja yang pernah menjadi ketua atau sekretaris, atau wakil ketua saat duduk di kepanitiaan pengadaan SKPD. Dudi Gardesi lalu menunjuk mereka yang memiliki pengalaman tersebut sebagai ketua Pokja.

Kelucuan kerap terjadi dengan cara penunjukan model kedua. Biasanya mereka yang mengaku punya pengalaman lekas menyesal begitu tahu langsung ditunjuk sebagai ketua pokja.

Selanjutnya, Dudi menginstruksikan ketua yang ia tunjuk untuk memilih wakil, sekretaris, dan bendahara. Ketua pokja yang baru ditunjuk akan mengambil secarik kertas, lalu menuliskan siapa sekretaris, dan bendaharanya. Dalam sekejap secarik kertas itu sudah ada di depan Kepala ULP, dan dibuatkan SK. Jika secarik kertas itu tiba di meja Kepala ULP pada siang hari, maka sore harinya sudah keluar SK bagi ketua, sekretaris, dan bendahara pokja.

Pada masa itu, setelah pokja terbentuk, tata letak ruang kerja pun diatur. Partisi besar dibuat untuk setiap himpunan. Partisi besar tersebut terdiri atas sekat-sekat lagi. Setiap sekat menjadi ruang kerja bagi tiap-tiap pokja.





Pegawai BPKD melakukan absensi sidik jari, November 2020. Sebelum akhirnya menjadi badan tersendiri, BPPBJ berbentuk ULP yang ditempatkan di bawah BPKD.

“Banjir” Berkas

UJIAN PERTAMA BAGI ULP TERJADI SEPANJANG MEI 2014. “BANJIR” BERKAS. PENYEBABNYA, PERNYATAAN GUBERNUR DKI JAKARTA JOKO WIDODO. GUBERNUR YANG AKRAB DIPANGGIL JOKOWI INI MENGHARUSKAN SETIAP SKPD MENYELENGGARAKAN LELANG LEWAT ULP. SETIAP INSTANSI DIBERI BATAS WAKTU MEMASUKKAN BERKAS KE ULP PALING LAMBAT AKHIR MEI 2014. LEWAT DARI TANGGAL ITU, TAK BOLEH DILAYANI ULP.

Jajaran ULP pontang-panting menangani aliran berkas lelang di tengah sarana dan prasarana ULP yang masih belum maksimal. Perabot besar kantor belum lengkap.



Seorang pegawai tampak bekerja dengan menggunakan masker pada November 2020. Pandemi covid-19 membuat pegawai BPPBJ DKI harus disiplin menjaga kondisi tubuh.

Penggunaan internet masih menggunakan modem pribadi. Kerja tim pun belum mapan. Tidak semua anggota pokja punya pengalaman untuk memenuhi kebutuhan ULP. Mendekati akhir bulan Mei 2014, kerja semakin melelahkan. Waktu semakin dekat ke batas akhir pengumpulan. Karena mengejar batas waktu, jajaran Pokja akhirnya terpaksa menerima permohonan lelang dalam bentuk apapun. Bahkan selebar kertas dari SKPD tetap diterima. Yang penting diterima dan masuk catatan dulu.

Di tanggal akhir Mei 2014, Kepala ULP menginstruksikan seluruh anggota pokja tetap siaga sampai pukul 23.00 WIB. Memberikan kesempatan bagi SKPD yang masih mau



Tumpukan kotak berisi berkas tender di Kantor BPPBJ DKI pada November 2020. Pada masa awal berdirinya, tumpukan berkas sangat tidak teratur di institusi ini. Bahkan kadang kerap ada berkas yang hilang atau tertukar.



Salah satu bagian ruang kerja di Kantor BPPBJ DKI.

mengirimkan berkas lelang.

Petugas ULP lalu memilih menunggu para pengumpul berkas sampai pukul 00.00. Beberapa pegawai ingat bahwa mendekati pukul 00.00, mereka yang bertugas menunggu mengendap-endap pulang melalui tangga darurat. Tujuannya adalah menghindari para utusan dari SKPD yang datang terlambat. Segalanya ada batasnya. Jika terus dilayani, bisa-bisa jadi tidak sesuai jadwal batas akhir.



“Tumpukan Berkas Pasar Malam”

BULAN MEI 2014 TERLEWATI. SATU POJOK DI DEKAT MEJA KERJA BAGIAN TATA USAHA BERUBAH MENJADI TUMPUKAN KERTAS. ITU ADALAH BERKAS PERMOHONAN LELANG YANG MASUK SEPANJANG MEI. BENAR-BENAR BERTUMPUK TAK KARUAN.

Diperkirakan ada sekitar 5.000 berkas lelang masuk sepanjang Mei 2014. Dengan demikian, setiap pokja yang beranggotakan lima orang, harus menyelesaikan 300 berkas.

Berkas-berkas itu kemudian dibagi-bagi ke seluruh himpunan maupun pokja. Disebar sesuai tugas tiap-tiap himpunan dan pokja. Tumpukan berkas lalu menjalar dari hanya di satu pojokan menjadi ke seluruh ruangan di lantai 20.

Bulan berikutnya berkas-berkas tender itu diproses.



Salah satu bagian ruang kerja di Kantor BPPBJ DKI.



Tumpukan berkas di Kantor BPPBJ DKI.

Artinya tender masuk ke tahap lanjut. Berkas-berkas jadi semakin menumpuk di tiap pokja. Tahap pembuktian, penawaran, dan lainnya. “Seingat saya, waktu itu berkas-berkasnya bertumpuk di mana-mana. Kursi, meja, dan lainnya. Bahkan kita sampai duduk di atas berkas juga pernah kok,” ujar Eko, salah satu angkatan pertama ULP yang kini menjabat Kepala UPPBJ Jakarta Timur.

Peristiwa lainnya lalu bermunculan. Lucu dan konyol. Beberapa di antaranya adalah raibnya berkas. Mulai dari keselip sampai tertukar. Andi Surya Achmadi (44), yang juga pegawai BPPBJ kloter pertama, menceritakan dirinya pernah menemukan sebuah berkas tercecer dan ada *flashdisk*-nya.

“Ya saya ambil, kan lumayan *flashdisk*,” kata Andri.

Setelah mengambil berkas dan *flashdisk*-nya, lalu muncul keramaian dari himpunan yang ada di dekatnya. Rupanya orang di himpunan itu mencari-cari berkasnya yang hilang. Andri mendengar keramaian itu, lalu sadar bahwa berkas yang dicari ada di mejanya. “Ya sudah saya bilang berkasnya ada di saya. Saya kembalikan. Ya bagaimana, berkas itu tergeletak begitu saja kok,” kata Andri.

Bulan-bulan awal ULP terus bergulir. peristiwa unik datang silih berganti. Sekitar bulan Juli atau Agustus, sebuah peristiwa terjadi secara mendadak. Pagi harinya muncul pengumuman alat kerja seperti komputer, meja, mesin foto-

kopi, dan lainnya akan ditarik hari itu juga. Penyebabnya adalah masa sewa yang telah habis sehingga alat harus ditarik.

Akibatnya, sepanjang hari para pegawai ULP jadi heboh. Mereka memindahkan berbagai *file* dengan cepat ke *flashdisk* atau laptop pribadi. Pada hari berikutnya, hal ini memunculkan kisruh baru. Banyak *file* tidak terkopi. “Banyak yang hilang berkas. Ada yang karena *file*-nya di komputer hilang, atau terselip. Kalau sudah begitu, ya dibuatkan lagi yang baru,” kata Andri.

Tapi keterbatasan seperti apa pun, ULP harus tetap bekerja. Ini hanya tes awal. Kepala ULP, I Dewa Gede Soni Aryawan, lalu mencoba membuat sistem pemantauan penayangan lelang. Ini penting agar pekerjaan selesai tepat waktu, tidak berlama-alama, dan tidak terlupakan.

Ia lalu mengimbau setiap pokja mengeluarkan uang pribadi untuk membeli dan memasang papan tulis. Dananya diambil dari kocek pribadi. Urunan. Sebab, sebagai unit baru, ULP belum memiliki anggaran. Soni lalu mewajibkan setiap lelang yang sudah tayang harus dicatat di papan tulis tersebut.

Setiap hari, pokja diberi target menayangkan 10 paket lelang. Agar target terpenuhi, setiap hari sekretaris ULP mendatangi pokja-pokja, menagih target. Suasana kerja yang padat ini membuat para pegawai ULP bekerja keras.

Setiap hari mereka bekerja mulai pukul 08.00 sampai pukul 21.00. Setiap hari mereka terus tenggelam dalam kerja. Tak ada lagi waktu saling menyapa sesama rekan kerja.



Muhamad Nur, PNS UPPBJ Kota Jakarta Barat. Dia adalah salah satu pegawai angkatan pertama yang datang lewat SK 95.

Bahkan satu tahun bekerja di ULP tidak cukup bagi para pegawai untuk saling kenal.

Sebagai contoh, Ratina yang kini menjabat Kepala UPPBJ Jakarta Barat, baru mengenal Andriyanto, anak buahnya di UPPBJ, belakangan ini saja. Padahal mereka sama-sama pegawai angkatan pertama ULP. “Saking sibuknya dulu sampai *nggak* bisa kenalan kita. Datang, kerja sampai malam di meja, lalu pulang. Begitu terus setiap hari. Paling kenal itu sama yang satu himpunan saja. Itu pun paling sama pokja yang persis bersebelahan,” ujar Ratina.

Tahun awal ULP sangat melelahkan bagi para pegawai angkatan pertama. Lelah dan jenuh menumpuk. Mereka

menghilangkannya dengan caranya masing-masing. Lalu muncul pokja-pokja yang dikenang karena tingkah uniknya mengusir jenuh. Salah satunya adalah pokja yang kerap menyetel lagu dangdut dengan keras. Setiap pegawai angkatan pertama tak bisa lupa dengan pokja ini.

PASAR MALAM LANTAI 21

Sampai memasuki tahapan pembuktian, sekitar pertengahan tahun 2014, kondisi kantor ULP belum sempurna. Pada tahap ini ULP menggunakan lantai 21 gedung Blok H. “Wah kita *ngampar* itu di Blok H waktu tahapan pembuktian dengan calon penyedia,” ujar Muhamad Nur (42), pegawai ULP angkatan pertama.

Nur ingat betul suasana di lantai 21. Tiap-tiap himpunan menguasai titiknya masing-masing, lalu membagi letak tiap pokja untuk menggelar berkas. Beberapa masih sempat menggelar karpet, sebagian lainnya memilih tanpa karpet.

Berkas dari para calon penyedia sangat banyak. Setiap calon penyedia membawa setumpuk berkas. Beberapa di antara mereka bahkan membutuhkan kereta dorong (troli) untuk membawa berkas-berkas tersebut. Ruang menjadi makin sesak, berantakan. Berkas-berkas itu lalu digelar begitu saja di lantai saat pembuktian.

Saking banyaknya tumpukan kertas dan berkas, para calon penyedia kadang ikut membantu menyisihkan tumpukan-tumpukan berkas yang bertebaran agar berkas yang mereka bawa, mendapat lantai yang kosong. Biasanya ini

terjadi apabila pergantian pembuktian dari satu calon penyedia ke penyedia lainnya.

“Suasanya benar-benar mirip pasar malam seingat saya. Orang ramai sekali itu di lantai 21, dan semuanya duduk di lantai dengan tumpukan kertas di sekeliling mereka. Suaranya riuh karena semua orang bicara,” kata Nur.

Bahkan, kata Nur, para calon penyedia yang kelelahan biasanya akan memilih tidur begitu saja di lantai. Telentang, tengkurap, bahkan ada yang sampai perutnya terbuka. Beberapa bahkan sampai mendengkur. Kadang-kadang pegawai wanita ULP risih melihat ini, lalu menegurnya. Ya, per-sis pasar malam kan ini.



Janji yang Tak Pernah Datang

SELAMA MASA KRITIS ULP, DARI MEI SAMPAI SEPTEMBER 2014, PARA PEGAWAI ANGKATAN PERTAMA MENGELUARKAN SELURUH UPAYA DAN TENAGA. BAHKAN KADANG MENGORBANKAN KOCEK DAN BARANG PRIBADI. MEREKA MENYISIHKAN UANG YANG HARUSNYA BISA DIBAWA BUAT KELUARGA. KETIKA PRINTER, KOMPUTER, DAN ALAT-ALAT DITARIK KARENA MASA SEWANYA HABIS, PEGAWAI ULP MEROGOH KOCEK PRIBADI. MEREKA MEMBELI PRINTER, LAPTOP, DAN ALAT TULIS SENDIRI. DASAR MELAKUKAN ITU ADALAH HARAPAN DIBERIKAN 10 KALI LIPAT GAJI SESUAI JANJI GUBERNUR.



ULP pernah menumpang selama satu bulan di Kantor BPKD pada tahun 2014. Terpaksa menumpang lantaran ruangan untuk ULP belum rampung pada waktu itu.

Ternyata janji yang ditunggu tak datang juga. Tunjangan 10 kali lipat gaji yang dijanjikan gubernur tidak pernah cair sepanjang masa kritis ULP.

Eko ingat betul bahwa janji itu berbunyi bahwa setelah masuk ULP, maka tunjangan 10 kali gaji akan lekas diberikan. Tapi ternyata tidak cair juga. Lalu muncul janji baru. Tunjangan disebut akan cair dengan sistem rapel sesudah APBD-P sehingga seharusnya bulan Oktober 2014 sudah bisa diterima.

Hitungan rapelan itu bukan main-main. Jika gaji pokoknya Rp2,4 juta, maka tunjangan 10 kali lipat gajinya adalah

Rp24 juta per bulan. Dikalikan tujuh bulan dari April sampai Oktober, maka seorang pegawai bisa menerima uang Rp144 juta pada bulan Oktober 2014. Sangat besar.

“Itu yang membuat banyak pegawai mau beli laptop atau printer sendiri. Kan ada janji 10 kali gaji. Jadi mikirnya *toh* nanti dapat rapelan itu,” kata Eko yang kini menjabat Kepala UPPBJ Jakarta Timur.

Bahkan pegawai ULP sampai tidak peduli lagi honor panitia tidak dicairkan. Pada masa itu, setiap tender pasti sudah ada anggaran honor panitia dari pemegang anggaran. Besarannya sekitar Rp100.000 sampai Rp200.000 per paket. Jumlahnya sebenarnya cukup besar apabila dikalikan 100 paket sampai 600 paket yang dikerjakan pada tahun itu di tiap-tiap pokja.

“Pokja saya saja waktu itu mengerjakan 100 paket. Jadi harusnya saya dapat tambahan uang Rp10 juta sampai Rp20 juta dari honor panitia. Dan ada yang mengerjakan sampai 600 paket juga di pokja lain. Bisa dapat Rp60 juta sampai Rp120 juta berarti kan,” ujar Eko.

Tapi seluruh pegawai rela honor panitia tidak dicairkan. Pemegang anggaran juga tidak berani mencairkan karena ada janji rapel 10 kali lipat gaji. Apabila dicairkan dan ternyata rapelan cair, risikonya pegawai ULP bisa diminta mengembalikan honor panitia karena terhitung anggaran ganda.

Setelah APBD-P diketuk, pegawai ULP mulai penasaran. Apalagi tunjangan 10 kali gaji tak juga cair. Gejolak muncul. Seingat Eko memang tidak sampai digelar rapat resmi di

internal ULP menyangkut tunjangan. Tapi pegawai mengunjingkannya di setiap sudut kantor. Saling bertanya soal kepastian tunjangan.

Puncak penasarannya pegawai ULP adalah dengan membentuk tim tidak resmi. Tim ini bertugas melakukan audiensi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau Sekda DKI. Anggota tim ini tidak sembarangan dipilih.

“Mereka yang dipilih masuk tim ini adalah orang-orang yang sebelum masuk ULP memang sudah berada di lingkungan Balai Kota sehingga setidaknya mereka punya kenalan di BKD,” kata Eko.

Ide menagih ke Sekda dibatalkan. Tim tidak resmi lalu memilih menghadap Kepala BKD. “Jangan bayangkan ada ramai-ramai. Tidak sama sekali,” kata Eko.

Rombongan perwakilan itu kemudian mencoba menghadap Kepala BKD, tetapi dihadang oleh beberapa staf BKD. Mereka berjanji akan datang langsung ke ULP dan menjelaskannya. Akhirnya perwakilan setuju menunggu.

Pada akhirnya memang benar Kepala BKD datang sendiri ke ULP. Ia meminta agar para pegawai ULP bersabar. Beberapa sudah mulai yakin bahwa tunjangan itu tidak pernah ada. Tapi sejumlah pegawai lain masih berharap.

Harapan itu rupanya memantik kedatangan gelombang berikutnya pegawai ULP. Gelombang kedua pegawai ULP masuk pada Desember 2014. Prosesnya sama, lewat penunjukan langsung dari BKD.

Tapi gelombang ketiga datang di waktu dan cara ber-



Charles (35), pegawai BPPBJ DKI gelombang ketiga. Dia bukan datang lewat SK 95, tetapi dengan mendaftar secara sukarela. Salah satu alasannya mendaftar adalah adanya iming-iming akan diberikan tunjangan 10 kali gaji pokok.

beda. Gelombang ketiga masuk ketika ULP sudah berubah menjadi Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (BPPBJ) pada tahun 2015. Mereka datang ketika BPPBJ dipimpin Irvan Amta.

Pegawai gelombang ketiga datang secara sukarela dari berbagai instansi. Salah satunya adalah Charles (45). Charles menceritakan bahwa tidak ada pengumuman resmi soal penerimaan pegawai BPPBJ gelombang ketiga. Informasi BPPBJ masih menerima pegawai baru menyebar begitu saja di kalangan bawah.

Charles memilih mendaftar berdasarkan dua alasan

pribadi. *Pertama*, isu mendapatkan tunjangan 10 kali lipat gaji pokok masih begitu santer sampai awal tahun 2015.

“Walaupun kita tahu belum cair yang tunjangan 10 kali gaji itu, ada isu juga beredar bahwa tunjangan itu akan cair pada tahun 2015,” kata Charles.

Kedua, Charles gagal dalam lelang jabatan eselon III dan IV pada akhir tahun 2014 sehingga kesempatannya memperoleh jabatan di kelurahan tempatnya bekerja amat tipis. Apalagi sudah banyak staf baru di sana. Makanya dia memilih mencari peruntungan di BPPBJ.

“Waktu itu kita *masukin* lamaran, lalu dipanggil dan diwawancara. Angkatan saya ada 20 orang yang masuk,” kata Charles. Dalam sesi wawancara, Charles lebih banyak ditanyai mengenai kesanggupannya berhadapan dengan risiko bekerja di BPPBJ. Sekitar April 2015, Charles mulai bekerja di BPPBJ.

Dia lalu lekas sadar bahwa ada masalah soal janji tunjangan 10 kali lipat gaji pokok. Di dalam BPPBJ ada pegawai yang masih yakin tunjangan itu akan cair, tapi banyak yang meminta Charles untuk tidak terlalu berharap banyak. Kini, sampai tahun 2020, tunjangan 10 kali gaji itu tidak pernah ada. Charles hanya terkekeh di mejanya mengingat itu.



REKAPITULASI TENDER 2017

USAHA KECIL						
NO	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU	JUMLAH HPS	JUMLAH PENAWARAN	
1	PENGADAAN BARANG 200 - 2.5 M	149	136,710,294,757.00	117,843,705,846.56	104,627,215,182.19	
2	PEKERJAAN KONSTRUKSI 200 - 2.5 M	124	129,304,138,903.00	110,864,498,031.61	95,166,726,593.08	
3	JASA LAINNYA 200 - 2.5 M	68	74,801,074,092.00	61,003,792,870.50	50,200,767,807.95	
4	JASA KONSULTANSI 50 - 750 JT	195	59,094,536,659.00	49,903,614,935.00	43,917,817,842.20	
TOTAL		536	399,910,044,411.00	339,615,611,683.67	293,912,527,425.42	

USAHA NON KECIL						
NO	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU	JUMLAH HPS	JUMLAH PENAWARAN	
1	PENGADAAN BARANG > 2.5 M	64	916,402,408,229.00	661,950,211,514.78	566,260,785,787.56	
2	PEKERJAAN KONSTRUKSI > 2.5 M	105	6,626,735,803,552.00	5,742,757,180,425.55	5,294,121,765,452.64	
3	JASA LAINNYA > 2.5 M	26	303,660,620,919.00	198,488,370,259.58	152,764,981,238.00	
4	JASA KONSULTANSI > 750 JT	30	104,344,551,754.00	91,171,469,709.00	81,195,372,756.00	
TOTAL		225	7,951,143,384,454.00	6,694,367,231,908.91	6,074,342,905,234.20	

USAHA NON KECIL						
NO	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU	JUMLAH HPS	JUMLAH PENAWARAN	
TOTAL		262	113,478,519,608.8	95,529,316,622.7	9,753,945,960,703.97	
1	PENGADAAN BARANG > 2.5 M	18	1,102,398,136,347.00	777,245,814,978.70	654,730,170,132.30	
2	PEKERJAAN KONSTRUKSI > 2.5 M	65	7,431,051,523,936.00	6,387,714,554,299.54	5,846,682,240,479.67	
3	JASA LAINNYA > 2.5 M	27	227,462,233,774.00	173,553,558,111.18	140,950,656,970.00	
4	JASA KONSULTANSI > 750 JT	59	214,201,584,459.00	12,836,601,927.50	111,582,893,122.00	

USAHA KECIL						
NO	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU	JUMLAH HPS	JUMLAH PENAWARAN	
1	PENGADAAN BARANG 200 - 2.5 M	195	180,306,686,231.00	161,675,337,204.77	131,137,720,860.51	
2	PEKERJAAN KONSTRUKSI 200 - 2.5 M	113	123,940,120,607.00	104,481,084,770.88	84,315,581,437.33	
3	JASA LAINNYA 200 - 2.5 M	74	82,105,788,475.00	62,153,803,537.66	52,360,045,794.37	
4	JASA KONSULTANSI 50 - 750 JT	203	47,522,831,267.00	41,369,749,605.40	36,381,786,049.00	
TOTAL		585	433,875,396,580.00	369,678,975,118.71	304,195,134,141.21	

REKAPITULASI TENDER 2016

REKAPITULASI TENDER 2019

USAHA KECIL					
NO	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU	JUMLAH HPS	JUMLAH PENAWARAN
1	PENGADAAN BARANG 200 - 2.5 M	414	377,945,088,769.00	349,244,004,158.37	300,031,044,104.17
2	PEKERJAAN KONSTRUKSI 200 - 10 M	570	1,544,896,646,524.00	1,442,026,608,431.92	1,267,658,497,821.65
3	JASA LAINNYA 200 - 2.5 M	264	255,003,093,897.00	227,555,764,727.14	211,526,169,430.55
4	JASA KONSULTANSI 100 - 750 JT	333	122,629,117,203.00	114,987,661,441.60	104,742,924,200.11
TOTAL		1,581	2,300,473,946,393.00	2,133,814,038,759.03	1,883,958,637,556.48

SAMPAI DENGAN 29 OKTOBER 2019

USAHA NON KECIL					
NO	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU	JUMLAH HPS	JUMLAH PENAWARAN
1	PENGADAAN BARANG > 2.5 M	153	1,741,349,073,805.00	1,622,769,498,396.38	1,518,344,512,754.22
2	PEKERJAAN KONSTRUKSI > 10 M	91	5,837,810,079,669.00	5,215,417,426,514.12	4,956,626,543,968.79
3	JASA LAINNYA > 2.5 M	109	690,990,539,046.00	636,949,394,140.39	586,099,433,460.11
4	JASA KONSULTANSI > 750 JT	106	257,839,320,586.00	207,599,972,527.62	188,950,766,455.50
TOTAL		459	8,527,989,013,106.00	7,742,736,291,578.51	7,290,021,256,638.62

		5,379,923,232,759,976.93	5,770,775,256,990.00	5,267,201,275,256.00	4,727	TOTAL
USAHA NON KECIL						
NO	JUMLAH PENAWARAN	JUMLAH HPS	JUMLAH PAGU	JUMLAH PAKET	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PENAWARAN
1	687,123,915,328.00	770,907,671,661.08	907,689,055,253.00	113	PENGADAAN BARANG > 2.5 M	
2	4,174,459,767,627.54	4,437,481,830,055.62	4,687,390,872,400.00	187	PEKERJAAN KONSTRUKSI > 2.5 M	
3	439,218,421,716.39	479,255,866,952.88	570,716,632,611.00	17	JASA LAINNYA > 2.5 M	
4	75,430,455,305.00	83,130,408,921.50	101,404,714,992.00	53	JASA KONSULTANSI > 750 JT	
TOTAL		791,824,548,941.52	883,971,095,697.00	1,062	TOTAL	689,222,956,039.57
USAHA KECIL						
NO	JUMLAH PENAWARAN	JUMLAH HPS	JUMLAH PAGU	JUMLAH PAKET	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PENAWARAN
1	224,033,511,827.72	258,926,092,673.03	291,120,744,908.00	314	PENGADAAN BARANG 200 - 2.5 M	
2	253,444,193,346.00	296,262,714,564.80	324,648,255,008.00	286	PEKERJAAN KONSTRUKSI 200 - 2.5 M	
3	138,482,686,934.85	155,815,255,824.28	179,781,211,861.00	180	JASA LAINNYA 200 - 2.5 M	
4	73,262,563,931.00	80,820,485,879.41	88,420,883,920.00	282	JASA KONSULTANSI 50 - 750 JT	
TOTAL		791,824,548,941.52	883,971,095,697.00	1,062	TOTAL	689,222,956,039.57

REKAPITULASI TENDER 2018

USAHA KECIL



BAB 2

DIOMBANG-AMBING KEGADUHAN

Belitan Masalah Hukum

BLESSMIYANDA MASUK KE BPPBJ DI TENGAH DUA PERISTIWA BESAR. PERTAMA, BERUBAHNYA ULP MENJADI BPPBJ. KEDUA, INSTITUSI ITU SEDANG TERLILIT BANYAK MASALAH HUKUM. DIA HARUS IKUT CAMPUR KARENA DITUNJUK MENJADI KEPALA BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH BPPBJ DKI PADA AWAL TAHUN 2015.

“*Miracle* juga sih bisa masuk Balai Kota. Saya kan dari Pulau Seribu,” kata Blessmiyanda. Dia masuk BPPBJ lewat sistem lelang jabatan setelah kurang lebih 14 tahun berdinis di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Selama 14 tahun itu Blessmiyanda berada di jalur karier kepamongan. Jabatan terakhirnya sebelum masuk BPPBJ adalah asisten

ekonomi dan pembangunan.

Selama 14 tahun di Pulau Seribu, Blessmiyanda mengisi kepalanya dengan banyak ilmu. Dia mengikuti berbagai sertifikasi, terutama menyangkut pengadaan barang dan jasa. Hampir semua sertifikasi yang diadakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ia ikuti. Dari sertifikasi dasar, asesor, narasumber, hukum kontrak, sampai fasilitator.

“Hanya sertifikasi fasilitator internasional yang tidak bisa saya ikuti. Sebab harus dua bulan di luar kantor dan itu tidak mungkin karena saya punya tanggung jawab juga di Pulau Seribu,” kata Blessmiyanda. Pada akhirnya hanya Blessmiyanda yang punya sertifikasi pengadaan selengkap itu di Pemprov DKI Jakarta. Tidak ada yang bisa menyainginya. Bahkan, dia kemudian menjadi aktivis di LKPP. Salah satu tugasnya adalah memberi materi dalam kegiatan sertifikasi.

“Saya hobi dengan pengadaan,” kata Blessmiyanda. Baginya, pengadaan barang/jasa adalah pekerjaan yang mesti diselesaikan dengan lintas ilmu. Mulai dari ilmu manajemen, penyidikan, statistik, hukum, hingga ilmu autodidak menghadapi penegak hukum. “*Basic* saya ilmu kelautan, tapi saya sangat menyukai angka-angka dan hukum,” kata Blessmiyanda yang juga akrab disapa Bless. Bahkan ketika kuliah ia sangat menyukai pelajaran hukum lingkungan.

Bless sebenarnya tidak pernah tahu ia akan ditempatkan di institusi mana sesuai lolos lelang jabatan. Tidak ada pilihan institusi pada saat lelang jabatan tahun 2015. Awalnya ia



mendengar isu akan ditempatkan di wali kota, tapi ternyata justru diplot di BPPBJ. Dengan sederet sertifikasi pengadaan yang dipegangnya, Bless merasa posisi itu cocok baginya.

Hari pertama di BPPBJ, Bless langsung diberi jabatan kabid hukum dan penyelesaian sengketa. Lagi-lagi cocok dengan kesenangannya terhadap hukum. Dia sudah cukup paham bagaimana teknik berhadapan dengan penegak hukum. Dasarnya sudah ia dapat ketika menjadi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kepulauan Seribu. Ia punya sederet pengalaman menghadapi penegak hukum,

mendampingi masalah hukum, sampai menangani penyidikan kasus pencemaran lingkungan.

UPS YANG TENAR

Begitu menjabat kabid hukum, Bless sadar bahwa BPPBJ tengah menghadapi berbagai masalah hukum. Institusi ini sedang terbelit banyak urusan hukum. Panggilan dari penegak hukum terus berdatangan, dari kepolisian, kejaksaan, sampai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Salah satu yang paling besar adalah kasus dugaan korupsi pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di sejumlah sekolah. Media massa arus utama dan media sosial berlomba menyajikan berita dan informasi seputar kasus ini.

UPS adalah perangkat *hardware* komputer. Fungsinya menyuplai listrik ketika listrik PLN padam. Di dalam komponen UPS terdapat baterai yang menjadi sumber listrik. Sumber listrik ini secara otomatis menggantikan listrik PLN yang padam.

Pengadaan UPS tidak dilakukan di seluruh lingkungan suku dinas pendidikan di wilayah Jakarta. Hanya ada dua wilayah yang mengadakan UPS, yaitu Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Pemegang anggarannya adalah dinas pendidikan.

Kasus ini benar-benar menyita waktu. Setidaknya ada dua pegawai ULP yang paling merasakan dampak kasus ini. Mereka adalah Habson dan Yuyun. Berulang kali mereka diperiksa polisi. Karena keduanya sering diperiksa, orang-

orang di lingkungan kerjanya menduga Habson dan Yuyun bakal ikut terseret kasus ini.

Habson sudah siap bila tiba-tiba ia dijadikan tersangka dan ditahan polisi. Saat diperiksa, ia selalu membawa beberapa potong pakaian. Ia khawatir bila tiba-tiba petugas menyatakan dirinya harus masuk sel setelah satu pemeriksaan. Namun, Habson menyisakan keyakinan bahwa ia tidak akan terlilit. Ia merasa sudah bertindak benar dan jujur. Pada akhirnya Habson memang terbukti tidak terlibat.

Di tengah hiruk pikuk pemeriksaan oleh penegak hukum menyangkut kasus UPS dan deretan kasus lainnya, Bless mempelajari ULP yang baru setahun beroperasi. Bless berusaha mendapat jawaban mengapa kasus UPS bisa terjadi bersamaan dengan sederet kasus hukum lainnya. Pasti ada yang tidak beres. Ada yang salah.

Begitu menyelami isi BPPBJ, ia langsung agak kecewa dengan temuannya. Ekspektasi terhadap BPPBJ terlalu tinggi, sementara kenyataannya jauh sekali. Banyak masalah di dalamnya. Paling utama adalah ketidakkompetenan sumber daya manusia (SDM) di BPPBJ.

Sebagian besar anggota pokja kurang memiliki kompetensi seperti disyaratkan. Sebagian besar hanya mengandalkan sertifikasi pengadaan tingkat dasar dan belum berpengalaman. Mereka tidak memahami prosedur operasional standar (*standard operating procedure/SOP*) seperti yang ditetapkan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012. Akibatnya banyak SOP yang mereka lewatkan saat mem-



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberi kesaksian dalam sidang kasus UPS di pengadilan.

proses lelang. Ini petaka.

SOP yang sering mereka lewatkan adalah pengkajian rencana umum pengadaan (RUP) serta rencana pemilihan penyedia (RPP). Ini fatal. Munculnya kasus dugaan korupsi UPS antara lain disebabkan ketiadaan kajian RUP dan RPP.

Selain itu, ketidakkompetenan SDM BPPBJ juga tampak dari dokumen pemilihan yang digunakan. Mereka memakai dokumen pemilihan yang terlalu tua. Itu dokumen pemilihan 10 tahun lalu. Sudah tidak layak digunakan di tahun 2015. Bless tahu betul itu karena ia ikut merancang dokumen pemilihan itu ketika aktif di LKPP.

Berikutnya, Bless juga melihat betapa hijaunya Kepala ULP pada tahun 2014. “Dia itu murid saya saat pelatihan

pengadaan barang dan jasa. Lulusnya itu sama saja, waktu itu saya fasilitatornya. Dia masih hijau sekali, kompetensinya masih jauh,” kata Bless. Rasanya sulit mengarahkan institusi ke jalur yang benar kalau kompetensi pemimpinnya begitu kurang.

Dari situ Bless melihat bahwa pangkal banyaknya masalah hukum pada masa itu adalah buruknya kompetensi pegawai dan pejabatnya. Itu penyakit utamanya. Bless berulang kali menyampaikan hal itu kepada BPK. Ia menekankan bahwa sumber masalah hukum ULP tahun 2014 adalah ketidakkompetenan para pegawai dan lemahnya *managerial skill*. Ditambah lagi dengan terlalu banyaknya paket lelang. Hal itu lalu melahirkan *human error* di mana-mana. Jika diibaratkan sebuah kapal, ULP tahun 2014 ini seperti kapal yang kabelnya terbuka di mana-mana. Bisa mengalami korsleting dan meledak kapan saja.

Bless menjelaskan hal itu berulang kali kepada BPK, berharap mereka mau memahami masalahnya. Meski demikian, Bless juga mengakui bahwa ULP memang belum rapi. Perencanaan dari dinas pun belum rapi. Mengapa harus rapi? Sebab pengadaan barang/jasa itu merupakan satu rangkaian dari *supply chain management*. Dari rencana kebutuhan, perencanaannya, penganggaran, tender, pelaksanaan kontrak, sampai serah terima aset. Bagian-bagian itu dikerjakan lintas instansi. Nah, itu belum benar-benar rapi pada tahun 2014.

Namun, Bless juga berusaha *fair* bahwa selalu ada ke-

ungkinan *tricky* dan harus diakui. Jadi, maklum BPK dan polisi curiga. Bless mengaku paham jika polisi atau BPK merasa agak aneh ketika kepala dinas pendidikan mengaku tidak tahu DPA anggaran.

“*Kok* seorang kadis pendidikan bisa tidak tahu; ini kalau saya baca di berita ya, hanya berita saja,” kata Bless. Menurut Bless, bagian itu agak *tricky*. Baginya, tidak mungkin seorang kepala dinas tidak mengetahui DPA. Itu mengherankan. Sebab opini yang timbul akibat pengakuan itu adalah kepala dinas tidak bekerja dengan baik. Jadi, normal saja ketika kemudian kepala dinas pendidikan diperiksa berulang-ulang walau akhirnya terbukti tidak terlibat.

Dari sederet panggilan penegak hukum, hanya kasus UPS yang sampai ke meja hijau dan disidangkan. Hantaman tak bisa dihindari. Penyidik memiliki bukti kuat dan mampu mempertahankannya di depan hakim. Harus dihormati, dan itu kerja bagus bagi penyidik.

Kasus ini menjadikan lima orang sebagai terpidana. Dua terpidana merupakan anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Firmanysah dan Fahmi Zulfikar. Adapun tiga tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, Harry Lo; Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman; serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat, Zaenal Soleman.



Kejutan PNS Non Job

DICEMPLUNGKAN DI BPPBJ MEMBUAT BLESS CEPAT PAHAM APA YANG SEDANG TERJADI. MASALAH BPPBJ TERNYATA BUKAN HANYA RENDAHNYA KOMPETENSI SDM. INTEGRITAS PEGAWAINYA JUGA SEDANG TERUSIK. TERLALU BANYAK GANGGUAN. SEKITAR APRIL 2015, BLESS MULAI MERASAKAN KETIDAKPUASAN DENGAN CARA-CARA BPPBJ.

“Sempat frustrasi saya melihat BPPBJ waktu itu. BPPBJ sangat *as usual business*, sangat transaksional. Lama-lama *nggak* suka saya, *nggak* cocok. Tahu begitu, saya jadi pamong *aja* terus,” kata Bless.

Sebelum diberikan jabatan Kabid Hukum dan Penye-

lesaian Sanggah BPPBJ, Bless sedang menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu. Artinya ia sedang dalam jalur yang tepat bagi kariernya. Dia sudah berada di lorong lurus menuju jabatan wali kota. “Dari asisten pembangunan kan karier berikutnya bisa ke sekretaris kota, wakil wali kota, lalu wali kota. Sudah enak saya sebenarnya sebagai pamong,” kata Bless.

Ketidakpuasan Bless terhadap BPPBJ muncul karena berbagai laporan buruk yang sampai di telinganya. Sebagai Kabid Hukum, Bless banyak mendapat laporan transaksi-transaksi di ULP tahun 2014. Ada laporan transaksi harga, lalu intervensi dari berbagai pihak. Banyak sekali laporannya. Itu membuat Bless beranggapan bahwa BPPBJ sudah susah untuk diajak bertindak benar.

“Frustrasi saya lihat BPPBJ waktu itu. *Nggak* bisa dibawa ke tengah, *udah ancur* banget. *Udah* karut-marut, *udah* mau tenggelam,” kata Bless. Ini sulit diubah jika tidak dari atas. Tidak mungkin melakukan perlawanan dari jabatan kabid hukum dan penyelesaian sanggah. Dia mencoba melawan beberapa kali, tetapi justru muncul gerakan menyingkirkannya. Gerakannya muncul dari dalam BPPBJ. Dari orang-orang yang tidak suka dengan sikapnya. Bless lalu diadukan ke inspektorat atas tuduhan mengintervensi sebuah tender. Ia diperiksa berulang kali oleh inspektorat. Bagi Bless itu hanya tuduhan. Arahnya lebih ke fitnah.

TELEPON DARI AHOK

Bless terus memupuk ketidakpuasan terhadap BPPBJ. Di lain pihak, inspektorat terus memeriksanya berdasarkan laporan yang menurut Bless hanya fitnah. Sedikit harapan lalu muncul pada Juli 2015. Terpampang jelas di depan mata Bless. Ia harus mengarah ke harapan itu. Kalau mau bereskan BPPBJ, ya jadi pucuknya. Kesempatan itu sedang dibuka seluas-luasnya. Ia harus ikut.

“Bulan Juli 2015 saya lalu daftar lelang jabatan Kepala BPPBJ. Saya masih kabid hukum ketika ikut lelang jabatan. Tidak ada yang tahu saya ikut mendaftar. Orang-orang di BPPBJ pun tidak ada yang tahu,” ujar Bless. Di tengah proses lelang jabatan, Bless mendadak dicopot dari jabatan kabid hukum dan penyelesaian sengketa. Awalnya ia disebut akan dipindah menjadi Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta. Tidak masalah. Dia sudah tahu arahnya akan ke sana. Ia pasti disingkirkan cepat atau lambat.

Setelah dicopot, ternyata Bless tak lekas dipindah jadi Sekretaris KPU DKI. Sementara itu, sudah ada orang baru yang dilantik jadi Kabid Hukum dan Penyelesaian Sengketa BPPBJ. Efeknya, status Bless jadi tidak jelas. Dia seperti PNS tanpa instansi.

“Saya jadi *non job*. *Non job* nggak jelas. Staf di instansi mana juga *nggak* jelas. Bukan di BPPBJ juga. Tapi karena saya terakhir di BPPBJ, ya setiap hari saya datang ke kantor BPPBJ saja, duduk di pojokan, luntang-lantung. Saya tidak pernah memberi tahu istri saya ketika sedang dalam posisi

non job tidak jelas ini,” kata Bless. Setiap hari Bless pergi dari rumahnya seolah-olah dia masih kabid hukum. Padahal setelah sampai di kantor dia hanya duduk di pojokan tanpa mengerjakan apa-apa.

Finalisasi lelang jabatan rampung pada Agustus 2015. Bless tidak tahu apa hasilnya sampai ponselnya berdering pada Kamis sore, 6 Agustus 2015. Saat itu ia sudah sepekan dalam posisi *non job*. Bless lalu mengangkat panggilan itu. Suara di ujung sana menyebut bahwa yang akan bicara berikutnya adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Pak Bless, *elu* lihai, ya? Pengadaan barang/jasanya, *elu* terlampau jago. Saking jagonya *elu* *ngga* pernah *ketangkep*. *Elu* lihai,” ujar Ahok.

Ahok lalu menjelaskan bahwa Bless akan dilantik sebagai Kepala BPPBJ DKI pada esok harinya, 7 Agustus 2015. Ia menanyakan ini dan itu. Lalu Bless menyatakan bersedia jika memang Ahok percaya kepadanya. Bless diminta bersiap. Telepon ditutup.

Setelah percakapan telepon tersebut, Kamis sore itu pun berubah lucu untuk Bless. Sambil duduk di pojokan dia melihat para pejabat BPPBJ mengikuti rapat pimpinan di sebuah ruang rapat. Entah apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Kabid hukum yang baru menjabat pun mengikuti rapat itu. Bless duduk di pojokan sambil tersenyum. Tak ada yang tahu bahwa ia akan jadi Kepala BPPBJ mulai besok. “Saya melihat rapim itu jadi sedih, lucu sekaligus kasihan,” kata Bless.

Saat itu Bless sempat berpikir apakah ia harus bicara ke Kepala BPPBJ bahwa besok ia akan menggantikannya? Ia lalu memutuskan tidak berbicara ke Kepala BPPBJ. Kepala BPPBJ adalah salah satu orang yang mengadukan Bless ke inspektorat. “Makanya lebih baik ya dia *nggak* perlu tahu lah. Lagi pula kan orang itu dilantik pada saat pelantikan sehingga selalu ada kemungkinan berubah lagi. Saya belum tentu jadi Kepala BPPBJ juga,” kata Bless.

Esok harinya, Bless sudah tiba di Balai Kota pagi-pagi benar. Sebuah surat lalu diserahkan kepadanya pagi itu juga. Isinya undangan mengikuti pelantikan. Berarti keputusan tidak berubah. Ahok tidak berubah pikiran menunjuknya sebagai Kepala BPPBJ. Ia lalu menuju Balai Agung untuk pengarahan sebelum pelantikan. “Jadi pagi itu saya *nggak* ke kantor BPPBJ, langsung Balai Agung,” kata Bless.

Beberapa jam kemudian, Bless sudah berdiri di samping Kepala BPPBJ untuk serah terima jabatan di depan Ahok. Jabatan berpindah. Bless resmi menjabat Kepala BPPBJ. “Beres rapat, baru saya ke kantor BPPBJ, kan sudah jadi kepala,” kata Bless. Ini tentu saja kabar mengejutkan. Seorang PNS *non job* tiba-tiba dilantik jadi kepala badan. Siang itu juga, Bless mengumpulkan seluruh PNS BPPBJ. Perubahan segera dilakukan.



Pro-Kontra Lelang Konsolidasi

SETELAH MENJADI PUCUK PIMPINAN, BLESSMIYANDA MAKIN LELUASA MENENTUKAN ARAH BPPBJ. IA LALU MENJALANKAN PIKIRANNYA. PALING PERTAMA ADALAH PERBAIKAN KOMPETENSI SDM BPPBJ. SELAIN ITU, IA JUGA MENGGANTI BEBERAPA ORANG.

“Pertama yang saya ganti adalah sekretaris badannya,” ujar Bless. Bless butuh orang yang bisa ia percaya, jujur, dan mau kerja keras. Hanya ada satu nama di kepalanya, Dian Ekowati. Bless sudah cukup lama mengenal Dian. Wanita itu juga sudah banyak mengikuti pelatihan pengadaan di LKPP. Dia kompeten menjadi Sekban BPPBJ.

Berikutnya Bless mulai membenahi kompetensi para kepala bidang. Beruntung LKPP sedang dapat pembiayaan



Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda dalam sebuah acara. Sejauh enam tahun usia BPPBJ, Blessmiyanda adalah Kepala BPPBJ yang menjabat paling lama.

dari Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI). Dana itu digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan pengadaan. Dengan dana MCAI, Bless mengirim para kepala bidang, ketua pokja, dan anggota pokja untuk pelatihan. Peningkatan kompetensi mutlak harus dilakukan agar BPPBJ lebih baik.

Masalah lain yang ditemui adalah terlalu banyaknya jumlah paket dan terlalu sedikitnya personel BPPBJ yang menangani pekerjaan ini. Tahun 2014 ada 5.000 paket yang harus ditangani 120 pegawai ULP. Tentu saja beban kerja sebesar ini terlalu berat bagi 120 pegawai ULP. Tidak ideal. Oleh karena itu, jumlah paket harus dikurangi jika personel tak bisa ditambah.

Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta melakukan rehab total lebih dari 100 sekolah setiap tahunnya. Jika tidak melakukan sistem tender konsolidasi, maka bisa ada lebih dari 100 pemenang tender. Sebab tender dilakukan per satu sekolah.

Namun, jika menggunakan sistem tender konsolidasi, maka 100 sekolah itu akan dibagi ke dalam beberapa paket. Satu paket bisa ada 20 sekolah atau lebih. Paket itulah yang kemudian ditenderkan. Oleh karena itulah nilai proyeknya menjadi besar. Makanya pemenang tendernya pun jadi kontraktor besar.

Setelah dipelajari kembali aturan main LKPP, ternyata dimungkinkan adanya tender konsolidasi proyek fisik. Tender konsolidasi adalah penggabungan beberapa paket lelang kecil menjadi satu paket. Penggabungan menghasilkan satu

paket lelang dengan nilai besar. Penggabungan paket lelang biasa dilakukan dalam tender konstruksi rehab total sekolah, rumah susun sewa, dan tender rumah sakit.

Tahun 2016, tender konsolidasi mulai dipraktikkan. Pro dan kontra langkah konsolidasi tender bermunculan. Kubu yang menentang menuduh langkah BPPBJ menyalahi undang-undang. Menurut mereka, apa yang dilakukan BPPBJ membuat kalangan kontraktor kecil, bangkrut. Sebab, paket yang seharusnya bisa diambil kontraktor kecil, tak bisa lagi diambil karena nilai proyeknya menjadi berlipat-lipat.

BPPBJ tidak khawatir menghadapi para penentang. Sebab, ada payung hukum yang kuat, yakni Perpres tentang pengadaan barang dan jasa yang menegaskan bahwa konsolidasi merupakan strategi. Selain itu, banyak pihak terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk persetujuan gubernur. Dalam perencanaan tender, BPPBJ juga bekerja sama dengan LKPP.

Munculnya suara pro dan kontra akhirnya membuat DPRD DKI Jakarta meminta klarifikasi BPPBJ. Ini wajar. DPRD memang punya wewenang itu. Pemimpin rapat Komisi E, Mohamad Taufik dari Fraksi Gerindra, kemudian meminta BPPBJ menjelaskan mengenai polemik yang terjadi.

BPPBJ bisa mengerti, kontraktor kecil dan menengah pasti berang menghadapi tender model konsolidasi. Tapi pengalaman di Jakarta membuktikan, proyek-proyek fisik dengan jenis yang sama itu sudah sepantasnya dikerjakan oleh kontraktor besar. Pekerjaan pun lebih cepat selesai,

dengan hasil yang lebih baik.

Menurut Blessmiyanda, tuduhan BPPBJ mengabaikan kontraktor kecil dan menengah tak perlu terjadi. Sebab, dalam kontrak sudah jelas disebutkan, para pemenang lelang konsolidasi wajib menggandeng para kontraktor kecil dan menengah untuk pekerjaan-pekerjaan subspesialis. Pekerjaan pekerjaan sub spesialis tak boleh dikerjakan sendiri oleh pemenang lelang proyek.

Setelah beberapa kali rapat, DPRD DKI akhirnya bisa memahami penjelasan BPPBJ. Mereka tidak terganggu lagi dengan keriuhan soal lelang konsolidasi.





Salah satu hasil pekerjaan proyek rehab total sekolah tahun 2019. Proyek ini adalah salah satu yang tendernya dilakukan dengan model konsolidasi. Tahun 2019 total ada 147 sekolah yang dibagi ke dalam 5 paket tender.

Protes Kontrak Payung

PADA PERTENGAHAN TAHUN 2016, KELUHAN MENGENAI PELAKSANAAN KONTRAK PAYUNG DATANG BERTUBI. SEBAGIAN LURAH MARAH LANTARAN KEINGINAN MEREKA MEMBELI PERKAKAS LEWAT SKEMA KONTRAK PAYUNG DITOLAK. PENYEDIA TIDAK BERSEEDIA MEMPROSES PERMOHONAN BARANG.

Keluhan terbanyak datang dari Jakarta Utara. Mereka mengadu ke wali kota seolah ini kesalahan BPPBJ. Menanggapi keluhan ini, Asril, Kasubbid Perencanaan Pengadaan BPPBJ yang bertugas menangani soal kontrak payung, menghadap Wali Kota Jakarta Utara. Selain sebagai kepala bidang, Asril juga menjadi sekretaris Pokja yang menangani

urusan kontrak payung perkakas kerja, obat, dan material bangunan.

Ketika sampai di kantor wali kota, para lurah yang kesal, sudah menunggu. Mereka kesal karena permohonan membeli barang lewat kontrak payung ditolak. Salah satu di antaranya adalah kontrak payung pengadaan kertas.

Asril sudah tahu apa penyebabnya. Penyebabnya para lurah itu tidak datang ketika diundang menyusun rencana kebutuhan. Akibatnya, mereka tidak memahami tentang lelang kontrak payung, dan tidak membuat, serta menyampaikan rencana kebutuhan. Ketika Asril menyampaikan hal itu, tak seorang pun lurah membantah.

Tender kontrak payung pada dasarnya adalah konsolidasi. Mirip seperti konsolidasi paket pembangunan fisik. Perbedaannya, sasaran kontrak payung adalah barang-barang sama yang dibutuhkan seluruh SKPD di Jakarta, seperti kelurahan atau rumah sakit.

Kebetulan Asril berada di pokja yang menangani kontrak payung perkakas kerja dan obat. *Item* perkakas kerja banyak dari pacul sampai kertas. Total ada sekitar 60 *item* perkakas kerja.

Nah, bayangkan jika 444 kelurahan di Jakarta membutuhkan alat kerja berupa kertas. Akan ada 444 kali lelang pengadaan kertas. Hal ini tentu saja tidak efektif. Apalagi personel BPPBJ hanya berjumlah 90-an orang kala itu.

Kebutuhan kertas di 444 kelurahan itulah yang kemudian dikonsolidasikan. Jadi, seluruh kelurahan diundang untuk me-

nakar berapa kebutuhan kertas mereka selama satu tahun.

Setelah rencana kebutuhan didapat, lelang pengadaan kertas dilakukan.

Pemenang tender kemudian melayani seluruh SKPD di Jakarta, terutama mereka yang ikut menyusun rencana kebutuhan. Harus seperti itu karena penyedia berpegang pada rencana kebutuhan kelurahan pemesan. Penyedia hanya akan melayani kelurahan yang rencana kebutuhannya sudah ia pegang.

Jadi jangan marah bila pihak kelurahan yang tidak ikut rapat untuk menyusun rencana kebutuhan tidak dilayani penyedia. Sebab, mereka tidak menyampaikan rencana kebutuhan mereka.

Mengapa tidak dilayani? Karena penyedia berkontrak dengan pabrik kertas. Harga yang digunakan adalah harga kertas saat kontrak dilakukan. Ketika beberapa bulan kemudian harga kertas naik, dan ada kelurahan yang tidak ikut menyusun rencana kebutuhan memesan kertas dengan harga lama, penyedia rugi. Itu sebabnya permintaan pemesanan ditolak.

Masalah ini juga terjadi di beberapa *item* perkakas kerja lainnya. Salah satu di antaranya golok. Pemenang tender golok kewalahan melayani kelurahan yang tidak ikut menyusun rencana kebutuhan, tetapi kemudian ikut memesan. Penyedia tentu saja menolak pemesanan tersebut.

Sejak awal Asril sudah menduga kasus seperti ini bakal muncul. Sebab, saat kontrak payung hendak dilakukan, SKPD jarang datang ke rapat-rapat yang membahas rencana

kebutuhan.

Sejak awal Asril sudah menduga kasus seperti ini bakal muncul. Sebab, saat kontrak payung hendak dilakukan, SKPD jarang datang ke rapat-rapat yang membahas rencana kebutuhan.

Asril ingat, saat digelar rapat rencana kebutuhan membahas permintaan perkakas kerja, yang hadir hanya wakil dari lima kelurahan, sedang sebagian besar wakil kelurahan lainnya tidak hadir. Itu sebabnya mereka protes saat mereka ditolak membeli perkakas kerja penyedia.

Asril kemudian memberi contoh lain, yaitu soal pengadaan obat. Karena sedikit SKPD yang hadir dalam rapat rencana kebutuhan, dia terpaksa menggelar enam kali rapat rencana kebutuhan obat. Padahal jika semua SKPD (dalam hal ini rumah-rumah sakit daerah) datang dalam satu kali rapat, rapat cukup dilakukan sekali saja.

Kendala lainnya, SKPD sulit membedakan merek dan spesifikasi dalam proses pengajuan. Ini terjadi dalam tender kontrak payung pakaian kerja. Mereka kerap menyebut merek, padahal permintaan harus dibuat dalam bentuk spesifikasi. Untuk mengatasinya, Asril mengundang pakar tekstil untuk menjelaskan jenis-jenis bahan kain. Setelah dijelaskan, barulah SKPD dapat memisahkan antara merek dan spesifikasi kain.

Kendala di perkakas kerja seperti pacul, golok, dan lainnya diatasi dengan meminta SKPD memeriksa harga pasar. Mereka harus melihat harga dan spesifikasi alat-alat tersebut langsung dari pasar.

PELAPIS E-KATALOG

Kontrak payung ini seperti pemain cadangan untuk e-katalog pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kontrak payung, sebenarnya e-katalog LKPP jauh lebih baik. Kontrak payung hanya berlaku satu tahun, tetapi e-katalog bisa untuk dua sampai tiga tahun.

E-katalog LKPP ini sama seperti kontrak payung. Barang yang tayang di e-katalog dapat dibeli SKPD mana pun yang membutuhkan. Jika SKPD membuat e-katalog meja sekolah, dan tayang di e-katalog nasional misalnya, maka SKPD dari provinsi lain juga dapat membeli meja itu.

Namun, proses e-katalog tidak sesederhana kontrak payung. Butuh proses enam bulan sampai e-katalog tayang di LKPP. Itu pun menuntut peran aktif SKPD. Sebab persetujuan kategori dilakukan LKPP berdasarkan usulan dari SKPD. Setelah kategori disetujui LKPP, barulah e-katalog bisa diproses BPPBJ.

Oleh karena itulah kontrak payung muncul sebagai pelapis e-katalog. Sementara e-katalog berproses dengan segala urusannya, kontrak payung diaktifkan agar pengadaan bisa tetap berjalan. Jadi keduanya dijalankan secara bersamaan. Misalnya, ada pengadaan seragam kerja yang tender lewat kontrak payung, tapi ada pula seragam kerja yang diproses e-katalog-nya. Begitu juga dengan obat dan perkakas, termasuk material seperti pasir dan beton.

Jalannya proses e-katalog dan kontrak payung yang bersamaan membuat kepala personel BPPBJ “berkeringat”.



Kepala UPPBJ Jakarta Timur Eko Setiawan menjadi pembicara dalam sebuah bimbingan teknis di Jawa Tengah. Efek dari berjalannya e-katalog dan program perubahan lainnya di BPPBJ DKI adalah para personelnnya kerap diminta jadi pembicara di tiap kegiatan pelatihan pengadaan.

Pekerjaan selama satu tahun menjadi sangat padat. Mulai dari sosialisasi ke SKPD, survei ke lokasi calon penyedia, sampai berbagai rapat menyangkut langkah pengadaan.

Setelah melalui berbagai kegiatan tersebut, e-katalog akhirnya rampung. E-katalog obat, perkakas, dan seragam kerja selesai pada tahun 2016. Melihat prestasi ini, LKPP menilai BPPBJ DKI layak menjadi contoh.

Oleh karena itulah mulai tahun 2017 personel BPPBJ kerap dilibatkan sosialisasi bersama LKPP. BPPBJ sering diminta menjadi pembicara di berbagai wilayah menyangkut kiat-kiat menjalankan e-katalog. Kegiatan ini membuat BPPBJ berkeliling nyaris ke seluruh kota di Indonesia. Bahkan berulang-ulang, antara lain Denpasar, Makassar, Semarang, dan Medan.



Lelang Tender di Mata Wartawan

BLESSMIYANDA MENDAPAT BANYAK KAWAN BARU AKIBAT PRO DAN KONTRA MENYANGKUT SEPAK TERJANG DAN EKSISTENSI BPPBJ DKI TERKAIT TENDER. TEMAN BARU ITU ADALAH PARA WARTAWAN.

Mereka menghubungi Blessmiyanda, meminta konfirmasi terhadap satu isu. Dari situ dia mulai mengenal informasi yang mereka butuhkan.

Tak semua wartawan yang datang menemui dia bersikap profesional. Profesional artinya, datang semata demi memenuhi berita yang lengkap, akurat, menarik, tanpa mengabaikan sopan santun saat bertemu narasumber.

Sebagian datang dengan kritik tajam, lalu melancarkan serangan terhadap BPPBJ DKI. Beberapa di antara mereka

membuat serangan tidak fokus, tidak tepat sasaran, dan tidak memberi pencerahan buat publik. Tak jarang serangan tergelincir menjadi serangan terhadap pribadi tertentu yang sifatnya sangat subjektif.

Setelah mengkritik BPPBJ DKI, mereka kemudian menemui Blessmiyanda mengonfirmasi apakah kritik tersebut tepat. “Tidak ada yang salah dengan langkah tersebut. Saya pun menanggapi kritik mereka, terutama menyangkut kegiatan lelang. Saya jelaskan semua hal menyangkut BPPBJ DKI, seterang-terangnya,” tutur Blessmiyanda.

Hasilnya, tak semua kritik mereka benar. Paparan yang mereka sampaikan pada publik, sebagian hanya berdasarkan prasangka-prasangka karena terbatasnya informasi yang mereka serap. Atau, mendapat informasi yang menyesatkan yang bersumber dari pihak yang kepentingannya dirugikan dengan kehadiran BPPBJ DKI.

“Saya mengetahui hal tersebut antara lain dari kutipan narasumber yang mereka pilih. Sejumlah narasumber yang mereka pilih tampaknya sudah didesain untuk memojokkan BPPBJ. Hal ini tampak ketika saya mengurai kembali kutipan-kutipan mereka. Dan terungkaplah, sebagian besar pernyataan mereka, tidak benar. Banyak yang dipelintir, ditafsirkan kembali sesuai kepentingan mereka,” papar Blessmiyanda.

SEIMBANG MEMILIH NARASUMBER

Buat dia, wartawan yang profesional adalah mereka

yang seimbang memilih narasumber, disertai penjelasan yang konsisten dan alasan yang kuat. “Buat saya, wartawan yang profesional adalah wartawan yang *cover both side*,” tandasnya.

Bahwa kemudian dalam berita tersebut Blessmiyanda atau BPPBJ merasa terpojok, ya risiko. Bukan masalah buat Blessmiyanda, asalkan unsur-unsur dan kode etik jurnalistik sudah mereka penuhi. Jika mereka sudah memenuhi hal itu, maka berita yang mereka buat sudah tergolong netral.

Pada kode etik dan unsur-unsur jurnalistik lain yang dipahami Blessmiyanda, redaksi memberi suara yang berimbang di antara para pihak yang berbeda pendapat atau berselisih. Tapi kadang faktanya, redaksi memberi ruang lebih banyak untuk menyerang BPPBJ, sementara di sisi lain ruang suara untuk BPPBJ hanya sedikit untuk menjelaskan duduk perkaranya.

Buat Blessmiyanda, hal ini tidak adil. Tidak *fair*. Prinsip *cover both side* cuma dijadikan “bumbu”. Publik tidak tercerahkan setelah membaca berita wartawan yang bersangkutan. “Setelah saya menjelaskan panjang lebar mengenai duduk perkaranya, redaksi hanya mengutip satu alinea atau paragraf penjelasan saya. Sebaliknya, redaksi menulis penjelasan pihak yang berselisih dengan BPPBJ secara panjang lebar meski pernyataannya sedikit.

Pada titik ini Blessmiyanda menduga ada agenda tersembunyi di balik berita si wartawan bersangkutan. Bisa berupa titipan atau pesanan dari narasumber lain untuk



Kepala BPPBJ DKI, Blessmiyanda, dalam sebuah kesempatan diwawancarai wartawan.

menyerang BPPBJ, atau memang secara pribadi tidak senang dengan kehadiran BPPBJ.

Hari demi hari Blessmiyanda kian mampu membedakan mana wartawan profesional dan mana wartawan yang sengaja hendak bermasalah dengan BPPBJ.

Menurut Blessmiyanda, wartawan profesional mampu memisahkan hubungan pribadi dengan narasumber dan tugas jurnalistik. Karena mereka mampu memisahkan kedua hal tersebut, proses wawancara biasanya berlangsung lebih singkat karena wartawan bersangkutan hanya fokus pada

tugas. Tak ada tarik ulur atau tawar-menawar di luar urusan berita.

Berbeda dengan wartawan yang memiliki hubungan kepentingan dengan perusahaan-perusahaan yang ikut lelang proyek. Pertanyaan utama mereka umumnya, “Si A menyodorkan penawaran yang lebih rendah, tapi kenapa kalah dalam lelang?”

Blessmiyanda pun menjawab, “Bukan semata soal persaingan harga. Banyak aspek atau variabel lain yang harus diperhitungkan, sesuai peraturan yang ada. Kami ini birokrat. Oleh karena itu, harus tunduk pada aturan dan semua turunan aturan yang mengatur kerja-kerja kami. Berbeda dengan swasta”.

Swasta lebih leluasa mengatur dinamika usaha mereka sesuai perubahan iklim dunia usaha mereka baik yang profit maupun nonprofit. Birokrasi tidak bisa begitu. Birokrasi tidak mengenal “iklim”. Iklim ditentukan oleh ada tidaknya perubahan aturan main.

Tugas birokrasi itu melayani. Melayani berdasarkan aturan main tadi, termasuk prosedur operasional standar (SOP). Jika masyarakat atau pihak lain tidak mengikuti aturan main kami, maka kami tak bisa melayani.

“Kalau kami menyimpang dari aturan yang ada, apa pun alasannya, kami bisa mendapat sanksi pidana, antara lain karena tuduhan korupsi. Aturan dalam birokrasi itu lebih ketat dan rinci. Lebih mengikat dalam setiap tugas dan langkah,” tegas Blessmiyanda.

Swasta tidak. Swasta tidak mengenal istilah korupsi sejauh hubungan mereka antara swasta dan swasta. Mereka hanya mengenal istilah wanprestasi. Itu pun hanya sebatas perikatan kontrak. Birokrasi harus menyesuaikan aturan main internal sebelum melakukan perikatan kontrak.

Karena sudah sering menghadapi wartawan yang tidak profesional, Blessmiyanda menjadi terbiasa membawa berkas saat diwawancara. “Saat diwawancara wartawan, saya selalu siap dengan berkas aturan main, termasuk SOP tadi. Nah, biasanya wartawan yang tidak profesional kurang mampu menganalisis antara aturan dan SOP tersebut, dengan tindakan atau langkah yang sudah kami lakukan. Mereka tidak mampu menemukan celah penyimpangan yang mereka tuduhkan pada kami, karena memang kami tidak menyimpang,” ujar Blessmiyanda.

Ujung-ujungnya, kata Blessmiyanda, menggugat aturan main atau SOP yang ada. Tentu saja dengan tafsir, pikiran-pikiran, dan dugaan-dugaan mereka sendiri. “Saya jawab, kalau sudah urusan itu, bukan urusan kami lagi, dan bukan *domain* kami lagi. Kami tak bisa berkomentar,” ucap Blessmiyanda.

Berbeda ketika ia diwawancara wartawan yang profesional. Mereka fokus pada soal tafsir aturan main dan SOP, serta tafsir pelaksanaannya. Jika tidak ada lagi aturan main atau SOP yang bisa ditafsir lain selain yang sudah tertera dalam aturan tersebut, dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan main dan SOP yang tertera, mereka men-



Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda, bersantai usai bersepeda. Kegiatan bersepeda mulai menular ke para personel BPPBJ. Ini salah satu bentuk dukungan terhadap penggunaan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari.

dukung kami.

“Bahkan dengan jiwa besar mereka menyampaikan maaf karena berprasangka buruk akibat ketidakpahaman mereka. Saya senang dengan sikap wartawan seperti ini,”

tutur Blessmiyanda.

Sepengalamannya, ketika bertemu pertama kali dengan wartawan profesional, mereka ini terkesan garang karena menjaga jarak dengan narasumbernya. Tetapi setelah wawancara berlangsung, tampak kesan mereka objektif. “Saya lega,” ucap Blessmiyanda.

Mereka mampu membedakan pembelaan diri narasumber untuk menutupi kelemahan atau kesalahannya, dengan penjelasan narasumber untuk mendudukkan perkara sebenarnya pada wartawan yang sebelumnya kurang paham.

“Kepada wartawan yang ingin memperdalam pengetahuannya soal lelang atau tender proyek ini, dengan senang hati akan saya bimbing. Akan saya jelaskan secara detail antara aturan main termasuk SOP, dengan pelaksanaannya,” janji Blessmiyanda.

Ia akan senang bila wartawan paham dulu, lalu menyampaikan kritik terhadap BPPBJ. “Buat saya, kawan-kawan wartawan seperti inilah yang diharapkan BPPBJ bisa menjadi kawan yang mengingatkan dan memberi gagasan untuk perbaikan BPPBJ,” ujarnya.



Dicopot, Dipasang Lagi

DI PERTENGAHAN TAHUN 2017 MUNCUL DESAS-DESUS BLESSMIYANDA BAKAL DICOPOT SEBAGAI KEPALA BPPBJ DKI JAKARTA. BUAT DIA, HAL INI BUKAN SESUATU YANG LUAR BIASA, ATAU MENGGUNCANGKAN DIRINYA.

“Pencopotan dan pergantian pejabat di instansi pemerintahan pasti dan harus terjadi untuk merawat siklus karier seseorang. Juga dalam rangka melakukan sistem *reward and punishment*. Saya siap. Siap dicopot, dan menerima tugas lain di tempat baru,” tutur Blessmiyanda.

Blessmiyanda lekas menghadap Gubernur Djarot Syaiful Hidayat begitu isu pencopotan santer. Ia pilih bertemu untuk meminta izin pergi ke Surabaya untuk ikut kegiatan MCAI. “Kalau saya mau dicopot paling Pak Djarot kan melarang



Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda saat menyampaikan paparan Strategi dan Isu dalam Percepatan Lelang.

saya pergi. Tapi ternyata saya tidak dilarang pergi,” kata Bless.

Bless lalu pergi ke Surabaya. Di sana, rekan-rekan wartawan mendadak menelepon. Meminta konfirmasi soal dirinya yang akan dicopot karena dinilai lamban oleh Djarot. Rupanya gubernur bicara ke media bahwa Bless akan dicopot karena lamban.

Bless terheran-heran dengan anggapan bahwa tender BPPBJ lamban di era ia menjabat. Apa tolok ukur kinerjanya lamban? Apa parameter yang dipakai gubernur? Ia lalu merasa perlu meluruskan lewat media. Mungkin Gubernur Djarot mendapat informasi yang salah. Artinya ini perlu diluruskan

karena menyangkut kerja keras yang telah dilakukan BPPBJ. Soal ia akan dicopot, Bless tidak terlalu peduli. *Toh*, dia sudah dua tahun menjadi Kepala BPPBJ. Wajar jika dia harus diganti. Tapi alasan lambat mengusik rasa keadilannya.

Menurut Bless, saat itu kecepatan tender BPPBJ adalah 98 persen. Buktinya ada. “Ketika itu ada KPI. KPI saya itu 98 persen. 98 persen itu sudah cepat, kalau 100 persen itu hanya Tuhan,” kata Bless. Saya sampaikan hal itu kepada media. Tujuannya bukan melawan gubernur. Hanya memperlihatkan yang sebenarnya bahwa BPPBJ tidak lambat.

Bagi Bless, pencopotan dirinya pada waktu itu lebih disebabkan desakan dari beberapa pihak, entah siapa. Sebab dia juga merasakan bahwa ada usaha menghukum dirinya oleh pihak inspektorat. Sebelum pencopotan, Bless berkali-kali diperiksa inspektorat atas tuduhan yang baginya tidak jelas. Ia dituduh mengintervensi tender.

Melihat ada gelagat kurang baik, Bless memilih mengancam inspektur yang memeriksanya. Sekadar memberi gertakan kecil. “Kalau anda berani menghukum saya, kamu saya laporkan pidana pencemaran nama baik,” ujar Bless kepada inspektur yang memeriksanya. Entah takut atau tidak, inspektur itu kemudian tidak pernah menjatuhkan hukuman kepada Bless.

Walaupun tidak dijatuhi hukuman, Bless akhirnya dicopot dari jabatan Kepala BPPBJ DKI oleh Gubernur Djarot pada Juli 2017. Posisi Blessmiyanda sebagai Kepala

BPPBJ diganti Indrastuty Rosari Okita. Blessmiyanda diminta mengisi jabatan asisten deputi lingkungan hidup.

Setelah pasangan Anies-Sandi memenangi Pilkada DKI, mereka menempatkan kalangan pejabat yang mendukung UMKM. Muncul suara lebih baik tender konsolidasi dihapus.

“Sejak itu saya justru banyak bicara di media soal alasan mengapa tender konsolidasi tidak boleh dihilangkan. Bukan melawan kebijakan gubernur dan wakilnya, tetapi hanya memberi perspektif lain. Sekadar memberi masukan agar gubernur dapat menimbang lebih jernih menyangkut tender konsolidasi tersebut,” tutur Blessmiyanda.

Mendengar hal ini, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno memanggil Blessmiyanda. Ia meminta Blessmiyanda menjelaskan mengenai tender konsolidasi ini.

Ia menjelaskan bahwa 70 persen tender di Jakarta sudah untuk UMKM. Tender yang nilainya besar itu tinggal 10 persen saja. Oleh karena itu, Bless berpendapat tender-tender di Jakarta sudah berpihak kepada UMKM. Wajar jika 10 persen tender besar itu diserahkan ke para penyedia besar pula. Tidak mungkin paket-paket besar kemudian diserahkan ke usaha kecil.

“Tapi saya jelaskan pula, untuk proyek konstruksi besar para general kontraktor harus mensubkonkan pekerjaan spesialis ke kontraktor kecil. Di situlah letak keberpihakannya terhadap UMKM,” papar Blessmiyanda.

Sejak itu ia sering dimintai pendapat oleh Sandi. Setidaknya, setiap dua pekan ada pertemuan antara Blessmiyanda

dan Sandi. Selanjutnya Sandi meminta masukan mengenai penyerapan dana APBD.

PENYERAPAN ANGGARAN

Sandi akhirnya sampai pada kesimpulan, penyerapan dana APBD Jakarta bermasalah. Penyerapan baru mencapai rata-rata 80 persen sampai bulan Desember 2017.

“Saya sampaikan kepada beliau, SKPD di DKI Jakarta baru mulai mengejar penyerapan sejak kuartal ketiga. Di kuartal pertama dan kedua, penyerapan sangat rendah. Padahal seharusnya, di kuartal pertama dan kuartal kedua itulah penyerapan harus gencar. Jadi masalahnya adalah ketidakpatuhan. Perlu sanksi untuk memperbaiki hal seperti ini,” jelas Blessmiyanda.

Ia kemudian mengusulkan agar penyerapan dilakukan lewat jalur KPI. Kinerja KPI yang buruk akan membuat tunjangan kinerja daerah (TKD) yang akan diterima personel SKPD pun, berkurang. Hasilnya, Pemprov DKI memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di akhir tahun 2017.

Selanjutnya, di enam bulan pertama tahun 2018, Blessmiyanda masih menjadi salah satu orang kepercayaan Sandi sampai satu hari di tanggal 8 Juni 2018, yaitu sehari menjelang libur puasa, Blessmiyanda dipanggil Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Beliau mengatakan, saya ditunjuk sebagai Plt Kepala BPPBJ DKI,” ujar Blessmiyanda.

Anies mengatakan, mudah mencari berita tak sedap tentang Blessmiyanda. “Saya jawab, saya difitnah. Sekarang terserah Pak Gubernur, percaya pada saya, atau tidak,” lanjut Blessmiyanda.

Berita tentang Plt BPPBJ pun cepat menyebar. Lingkungan rekanan dan Balai Kota, gaduh. Tudingan negatif tentang Blessmiyanda lekas bermunculan. Sulit menjawabnya satu per satu. “Saya melayani pertanyaan wartawan hanya dengan menunjukkan kinerja saya di BPPBJ di masa lalu, dan janji untuk meningkatkan kinerja saya sebagai Plt BPPBJ,” ucap Blessmiyanda.

Blessmiyanda lebih memilih tenggelam dalam tugas utama ketimbang menjawab kritik pedas media massa. “Hanya sesekali saja menyampaikan kepada media bahwa opini menyesatkan mulai mewarnai kepemimpinan saya di BPPBJ,” tutur Blessmiyanda.

Pada akhirnya Blessmiyanda kembali diangkat menjadi Kepala BPPBJ.



OK O Trip yang Unik

TAK BERAPA LAMA, GUBERNUR MENUGASI BLESSMIYANDA MENGERAKKAN PROGRAM “OK O TRIP” DAN KATALOG LOKAL. KATALOG LOKAL PENTING UNTUK Mendukung PERBAIKAN TROTOAR DI JAKARTA.

Selepas libur Lebaran 2018, Blessmiyanda segera membentuk pokja tersendiri untuk menangani paket ini. Pokja ini terpisah dari pokja tetap yang ada dalam struktur BPPBJ DKI. Anggota pokja terdiri atas gabungan personel pejabat struktural BPPBJ dan anggota pokja biasa.

Kepala UPPBJ Jakarta Timur, Eko Setiawan, ditunjuk menjadi ketua pokja. Indarto, Kasubbid Pengelolaan BPPBJ DKI, ditunjuk Blessmiyanda menjadi sekretaris Pokja. Lalu ada Kasubbag TU UPPBJ Jakarta Timur yang ditugaskan



Kepala UPPBJ Jakarta Timur yang merangkap Ketua pokja tertentu OK O TRIP, Eko Setiawan, memimpin sebuah pertemuan.

menjadi anggota. Tiga personel lainnya adalah anggota pokja bernama Sari Indriyani, Wuri Mahanani, dan Agus Subekti. Buat mereka, ini pekerjaan ganda. Tidak ringan memang.

“Komposisi tim seperti itu saya rasa sudah cukup. Seluruhnya berpengalaman. Ditambah koneksi Indarto di Dishub DKI. Hal ini akan membuat ruang gerak dan kerja kerja pokja lebih luwes. Sebelum di BPPBJ, Indarto memang berdinasi di Dishub DKI,” ucap Blessmiyanda.

Pokja Ok O Trip pertama ini khusus menangani pemilihan penyedia bus kecil. Dalam Ok O Trip ada tiga jenis penyedia,



Ok Otrip akhirnya berubah menjadi Jaklinggo. Inilah penampakan ketika Jaklinggo tengah mengantre di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta.



Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ketika mencoba tap Ok Otrip. Program Ok Otrip disebut pelaksanaannya sejak awal Anies menjabat.

yakni penyedia bus kecil, bus sedang, dan bus besar. Paket pertama yang pertama diluncurkan adalah pemilihan penyedia bus kecil.

Bus kecil ini adalah angkot-angkot yang akan menjadi kendaraan pengumpan ke halte Transjakarta dari lokasi permukiman penduduk. Dengan Ok O Trip, angkot-angkot ini akan dibayar rupiah per kilometer.

Sebagai ketua, Eko yang mengatur pembagian tugas di dalam tim. Eko dan Indarto lebih banyak bertugas di lapangan. Sedangkan Sari, Wuri, dan Subekti melakukan pengar-



Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri peluncuran Jak Lingko di Balai Kota Jakarta, Senin (8/10). Jak Lingko merupakan pengembangan dari program integrasi transportasi antar moda di Ibukota.

sipan dan dokumen dari kantor.

Sejak tahap penjelasan kepada penyedia, masalah lekas muncul. Penyedia yang dihadirkan Dishub DKI kebanyakan pengelolaannya masih bersifat tradisional. Bahkan tidak semua dari mereka paham mengoperasikan *e-mail*.

Ini masalah. Tapi harus diatasi. Pokja Ok O Trip mengambil keputusan membuka dua jalur untuk tahap pemasukan dokumen penawaran. Pertama lewat *e-mail*, dan kedua lewat mengumpulkan berkas ke kantor BPPBJ DKI.

Eko sadar cara kedua sangat mengancam akuntabilitas proses pemilihan. Tapi itu harus dilakukan. Sebab, tujuannya



Salah satu Bus Transjakarta yang dibeli lewat e-katalog nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sebelumnya Transjakarta melakukan tender umum untuk pengadaan bus. Tapi ketika reformasi pengadaan dimulai, pola pengadaan Transjakarta pun berubah. Pengadaan bus akhirnya dilakukan lewat skema e-katalog nasional LKPP sejak tahun 2015.



Sistem Jaklingko saat ini membuat para sopir tak perlu lagi mengejar setoran. Hal ini dirasa lebih nyaman oleh para sopir.

untuk mengakomodasi para penyedia. Solusinya, Pokja Ok O Trip membuatkan berita acara untuk penyedia yang memilih cara kedua. Berita acara dibuat agar proses tersebut tetap terjaga akuntabilitasnya.

Sebanyak 60 persen penyedia lebih memilih memakai jalur manual untuk memasukkan dokumen penawaran. Bahkan ada yang baru menyelesaikan di menit-menit terakhir penutupan tahap pemasukan dokumen penawaran pada 27 Agustus 2018.

Di tahap evaluasi dan kualifikasi, satu penyedia gugur lantaran dokumen izin trayeknya kedaluwarsa. Oleh karena

itu, penyedia tersebut tak mungkin melanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah itu baru masuk ke tahap pembuktian. Survei pun dilakukan. Eko dan Indarto berkeliling memeriksa sembilan koperasi angkutan. Pemeriksaan berfokus pada administrasi kantor, bukan terhadap satu per satu kendaraan yang akan dijual rupiah per kilomernya di e-katalog. Sebab, saat Transjakarta membeli unit, masih akan ada verifikasi lagi.

Secara umum, proses e-katalog Ok O Trip terlambat sekitar sepekan. Keterlambatan ini masih bisa ditoleransi.



Taktik Katalog Lokal

RUANGAN DI LANTAI 20 GEDUNG BLOK G BALAI KOTA DKI JAKARTA SEDANG SIBUK-SIBUKNYA, PERTENGAHAN JUNI 2019. EKO, KETUA POKJA YANG MENANGANI E-KATALOG BETON, SUDAH SEPANJANG HARI DI SANA BERSAMA ANGGOTA POKJANYA. MEMPROSES NEGOSIASI E-KATALOG BETON UNTUK LIMA KATEGORI. PEKERJAAN BETON *PRECAST* TERPASANG, PEKERJAAN BETON *RAPID SETTING*, PEKERJAAN BETON TERPASANG, PENYEDIAAN BARANG BETON, DAN PENYEDIAAN BARANG BETON *PRECAST*.

E-katalog beton ini cukup rumit prosesnya untuk sampai



Kepala UPPBJ Jakarta Timur yang juga menangani proses katalog lokal ketika memimpin sebuah rapat.

ke tahap negosiasi. Eko harus bolak-balik satu tempat ke tempat lain, berbicara dengan banyak orang. Mulai dari Dinas Bina Marga-pemegang anggaran beton, lalu ke ruangan Blessmiyanda, kemudian LKPP. Itu yang dikerjakan Eko dan pokjanya selama dua atau tiga bulan sebelum Juni 2019.

Penyebabnya adalah muncul kendala dari penyedia beton berdasarkan hasil survei lapangan tim teknis Dinas Bina Marga. Kendala *pertama*, pabrik beton *ready mix* tidak bersedia terikat dengan e-katalog. “Mereka sudah kewalahan melayani pasar harian. Jadi tidak berani untuk

mengikat kontrak jangka panjang,” kata Eko ketika melapor ke Blessmiyanda. Ini tentu saja kan menghalangi pekerjaan beton terpasang.

Kendala *kedua*, pabrikan beton *precast* maupun distributor tidak bersedia masuk ke kategori pekerjaan beton *precast* terpasang. Mereka hanya bersedia menyuplai beton atau masuk kategori penyediaan barang beton. Prinsip pabrikan beton *precast* ini mereka ingin dibayar setelah barang keluar, bukan barang terpasang.

Sebenarnya Eko sudah punya solusi mengatasi dua kendala tadi. Caranya dengan mengundang perusahaan jasa konstruksi ikut e-katalog pekerjaan jasa beton terpasang. Tapi Eko tidak bisa memutuskannya begitu saja. Untuk itulah dia datang ke Blessmiyanda, meminta restu untuk mendapatkan rekomendasi LKPP. Tentu saja diizinkan. Itu langkah tepat agar keputusannya tidak cacat.

LKPP kemudian menyimpulkan keenganan produsen beton *precast* maupun *ready mix* untuk ikut e-katalog pekerjaan beton terpasang sebagai bentuk ketiadaan pelaku pasar di kategori tersebut. LKPP kemudian merekomendasikan BPPBJ DKI mencari rantai pasok terdekat untuk kategori pekerjaan beton terpasang.

Artinya Eko bisa mengeksekusi jalan keluar yang sebelumnya sudah ia pikirkan, yakni mengundang perusahaan jasa konstruksi di kategori pekerjaan beton terpasang. Sebab rantai pasok terdekat dari produsen, selain distributor adalah perusahaan jasa konstruksi. Proses e-katalog lalu masuk

tahap berikutnya. Urusan inilah yang membuat e-katalog beton baru masuk tahap negosiasi dengan calon penyedia pada Juni 2019. Bahkan, Eko sempat lebih dulu menjalankan proses e-katalog *hotmix* sambil menunggu kendala di e-katalog beton teratasi.

Pada akhirnya terdata ada 54 calon penyedia beton dari 5 kategori e-katalog beton lolos tahap administrasi, evaluasi, dan kualifikasi. Mereka lalu memasukkan penawaran, kemudian melangkah ke tahap negosiasi. Eko memainkan strategi negosiasi cerdas untuk memperoleh harga beton terbaik bagi Jakarta. Murah, tetapi dengan kualitas terbaik.

Dia memilih lebih dulu menyusun jadwal negosiasi dengan produsen beton untuk e-katalog kategori penyediaan barang beton, dan penyediaan barang beton *precast*. Tujuannya adalah memperoleh harga terendah beton *precast* yang nantinya akan digunakan saat bernegosiasi dengan perusahaan jasa konstruksi di e-katalog pekerjaan beton terpasang.

Jadwal negosiasi dengan produsen beton juga masih disusun lagi. Eko tidak sembarangan mengatur jadwal. Dia memilih perusahaan dengan penawaran harga beton *precast* terendah untuk nego lebih dulu, baru mereka yang menawarkan harga rata-rata, lalu penawar harga tinggi. Tujuannya adalah untuk memperoleh harga beton termurah dari produsen beton yang menawarkan harga terendah. Harga itu kemudian dijadikan dasar untuk nego dengan mereka yang menawar dengan harga rata-rata maupun tinggi.

Sepanjang Juni 2019, Eko lalu berkulat dengan negosiasi bersama delapan anggota pokja tertentu yang ia pimpin. Dia juga dibantu oleh 15 orang tim teknis dari Dinas Bina Marga. Negosiasi dimulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00, setiap hari. Satu pekan pertama adalah jadwal untuk produsen beton yang menawarkan harga terendah. Pekan kedua untuk produsen beton penawar harga rata-rata. Pekan ketiga untuk mereka yang menawarkan harga tinggi.

Dengan cara itu, produsen beton yang menawarkan harga rata-rata maupun tinggi tidak bisa banyak berkulat. Eko menekan mereka habis-habisan agar mereka bisa menurunkan harga sampai bersaing dengan penawar terendah. “Kalau bapak harganya segini, *ngga* akan ada yang beli bapak di e-katalog. Itu sudah ada berapa perusahaan kasih harga jauh di bawah bapak. Coba dihitung pak, bisa tidak harganya mendekati yang terendah ini. Supaya *nggak* sia-sia ikut e-katalog,” gertak Eko saat bertemu dengan penawar tinggi.

Eko juga menjelaskan ke para produsen yang memberikan harga tinggi bahwa pemegang anggaran selalu mempertimbangkan *value for money* setiap pembelian. Artinya jika ada yang murah, maka tak mungkin membeli yang lebih mahal. Oleh karena itulah harga di e-katalog harus bersaing. Tumbanglah para produsen yang memberikan harga tinggi. Tapi tidak semuanya tumbang. Banyak pula yang memilih tetap bertahan dengan alasan kualitas, kepercayaan, kecepatan, dan pelayanan yang jauh lebih baik dari produsen lain.

Proses negosiasi ini memakan waktu kurang lebih lima bulan. Negosiasi jadi alot karena berbagai hal. Salah satunya adalah perusahaan mengirimkan stafnya untuk nego. Ini masalah. Staf sulit mengambil keputusan. Eko biasanya melihat dulu apakah staf tersebut mampu mengambil keputusan atau tidak. Apabila dalam beberapa kali pertemuan staf itu tidak mampu mengambil keputusan dan selalu meminta waktu bertemu dengan atasannya dulu, maka Eko akan meminta si staf mendatangkan direktornya saja. Sebab kehadirannya justru membuang-buang waktu.

Penyebab alot berikutnya adalah banyaknya *item* dalam kategori penyediaan barang beton. Tercatat ada 2.000 item barang beton. Satu produsen bisa menawar di 50 sampai 100 barang beton, bahkan lebih dari itu. Negosiasi kemudian dilakukan untuk satu per satu barang. Padahal total calon penyedia yang masuk tahap nego ada 54 perusahaan. Di setiap nego pihak BPPBJ maupun perusahaan akan saling menghitung. Itulah yang membuat lama.

Saking banyaknya *item* barang, Eko selalu ingin setiap nego mesti ada hasil. Dia memisahkan antara *item* beton yang sudah disetujui kedua belah pihak dengan menulis harga akhir dengan pulpen. Sedangkan *item* yang belum *deal* ia tulis dengan pensil. Jadi apabila sebuah perusahaan menawar 50 *item* barang, maka Eko ingin dalam sehari bisa ada lima atau 10 item yang negonya *deal*.

Alasan berikutnya nego menjadi alot adalah karena BPPBJ menginginkan harga terendah sehingga membutuh-



Suasana survei calon penyedia dalam katalog lokal.

kan banyak waktu untuk menekan penyedia agar bersedia mengeluarkan harga terendah. Itulah yang membuat tawar-menawar bisa berlangsung beberapa hari karena si penyedia mesti menghitung berulang-ulang. Penghitungan harus tepat agar penyedia tidak justru rugi dan akhirnya tidak bisa kerja karena menaruh harga terlalu murah.



Gaduh Monas

REVITALISASI MONAS UNTUK MEMBANGUN PLAZA DI BAGIAN SELATAN MENJADI RAMAI PADA AWAL JANUARI 2019. KERIUHAN DAN PROTES MULAI TERJADI SETELAH SEBAGIAN LAHAN SELUAS 86 HEKTARE DI SISI SELATAN DIBONGKAR KONTRAKTOR PEMENANG TENDER.

“Kisruh revitalisasi Monas”. Begitu media massa memberi judul. Kisruh berawal dari protes lantaran banyaknya pohon yang ditebang di lokasi revitalisasi. Di berbagai media, Kepala Unit Pelaksana Teknis Monas, Isa Sanuri, membantah penebangan pohon itu.

“Bukan ditebang. Pohon-pohonnya dipindahkan,” kata Isa, Senin (20/1/2019), seperti dikutip *Antara*. Ia menjelaskan,



Salah satu sisi revitalisasi Monas yang sudah selesai dibangun pada tahun 2020.

lokasi pepohonan yang dipindah berasal dari kawasan utara. Untuk yang berukuran besar, yang berjumlah 150 batang, bergeser ke bagian selatan. Yang kecil, berjumlah 55 batang, akan ditanam di bagian timur dan barat. Selain itu, pemerintah provinsi berjanji tak akan sekadar memindahkan tanaman. “Kami jadikan ruang terbuka hijau,” ucapnya.

KANTOR KONTRAKTOR YANG KECIL

Namun, kisruh tidak selesai sampai di situ. Justru bertambah panjang. Masalah berikutnya yang diramaikan di publik adalah seputar Kepres Nomor 25 Tahun 1995 (Keppres 25/1995). Utamanya menyangkut persetujuan dari pemerintah pusat dalam revitalisasi Monas yang belum dikantongi Pemprov DKI.

Pembahasan menyangkut Keppres 25/1995 membuat Sekda DKI mengambil langkah penting. Sekda DKI, Saefullah, memutuskan menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas yang sedang berjalan pada akhir Januari 2020.

Kasus berlanjut. BPPBJ mulai terseret-seret isu tidak sedap ini. Muncul penilaian bahwa penyedia tidak kompeten. Sebab, kantor penyedia berada di jalan kecil. Sepintas tak terlihat khalayak.

Berita soal kantor penyedia yang dianggap tak layak lekas bermunculan di media massa. Gaduh. Gaduh sekali. Bahkan salah satu anggota DPRD DKI berbicara di media massa bahwa kasus ini akan ia laporkan ke KPK.

Di tengah kegaduhan itu, Blessmiyanda mengatakan,



Salah satu sudut lain Monas yang tengah direvitalisasi, November 2020.

“Saya tidak dipanggil gubernur walau kegaduhan mulai meruncing ke BPPBJ. Gubernur hanya berpesan, tangani hal ini dengan baik. Saya menangkap, poin pentingnya adalah, baik-baik”.

Sejak itu saya memilih berbicara lewat media massa. Sebab, arah serangan ke BPPBJ salah. Tidak ada hubungannya antara kantor kontraktor di jalan sempit dan kemenangannya dalam tender revitalisasi Monas.

“Apa hubungannya? Bagi saya si perencana serangan mengalami kekacauan logika dan miskin pengetahuan tender,” tegas Blessmiyanda.

Orang yang awam soal tender pasti akan menganggap

ini konyol. Kok bisa perusahaan yang kantornya kecil menang tender besar? Arah serangannya ke situ, dan orang awam pasti akan berpikir seperti itu. “Tapi orang yang paham tender pasti tahu bahwa ini bukan masalah. Ini hanya dibesar-besarkan. Digoreng dengan opini-opini menyesatkan,” lanjut Blessmiyanda.

Bagi Blessmiyanda, mematahkan tuduhan itu begitu mudah sebab dasar hukumnya sangat kuat. Rujukannya adalah Peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan.

Dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa nilai proyek di bawah Rp100 miliar tergolong usaha menengah. Sementara nilai total proyek revitalisasi Monas sekitar Rp68 miliar.

“Jadi dia masuknya UMKM jangan dipikir harus perusahaan yang besar karena peraturan perundangan mengharuskan seperti itu,” kata Blessmiyanda.

Blessmiyanda juga menjelaskan bahwa Kemampuan keuangan perusahaan harus dihitung lewat audit neraca keuangan. “ Bukan karena perusahaan bonafide dan karena gedungnya bagus, tapi karena persyaratannya terpenuhi. Dia harus memiliki alamat yang tetap berdasarkan izin yang dikeluarkan PTSP. Boleh milik sendiri dan sewa,” ujar Blessmiyanda.

Jawaban seperti itulah yang Blessmiyanda katakan ke semua media. Makanya, bagi Blessmiyanda, tidak ada yang salah dengan PT Bahana Prima Nusantara, pemenang

tender revitalisasi monas. Kantor di gang sempit bukan halangan memenangi tender selama perusahaannya sehat.

Setelah penjelasan Blessmiyanda tersebar luas di media massa, “Kegaduhan di Monas” pun, reda, menghilang. Tak ada pihak yang bisa lagi “menggoreng-goreng” isu Monas untuk memojokkan BPPBJ. Mereka kehabisan data dan informasi untuk menyerang. Begitulah nasib serangan yang datang dari logika berantakan.



Terbiasa dengan Ancaman

SEKITAR AKHIR TAHUN 2019, MUNCUL ISU, BLESSMIYANDA BAKAL DIDEMO. TUNTUTANNYA, “COPOT BLESSMIYANDA”. MENDENGAR ISU TERSEBUT, SALAH SEORANG REKAN MENEMUI BLESSMIYANDA DI KANTORNYA. “DIA MENGATAKAN, RENCANA DEMO BISA DIBATALKAN, ASAL...,” KATA BLESSMIYANDA MENIRUKAN UCAPAN REKAN TERSEBUT.

Blessmiyanda tidak peduli. “Saya tidak tertarik. Silakan saja berunjuk rasa. Bukan masalah,” kata dia kepada rekan-nya.

Beberapa hari kemudian, aksi unjuk rasa, digelar. Karena jumlah pengunjuk rasa sedikit, kegiatan di Balai Kota, tak ter-



Kepala BPPBJ DKI, Blessmiyanda, berbicara dalam sebuah rapat di balaikota.

ganggu sedikit pun. Teriakan dan yel para pengunjuk rasa bak tenggelam dalam lalu-lalang orang-orang di Balai Kota.

“Sepanjang saya menjadi Kepala BPPBJ DKI, saya sudah sering mendapat ancaman. Saya tidak peduli karena saya yakin, saya sudah bekerja dengan baik dan benar. Saya sudah *on the track*,” ucap Blessmiyanda.

“Tahun 2015 sampai 2017 saya sudah berkutat dengan berbagai masalah hukum di ULP dan BPPBJ. Semua disposisi menyangkut hukum, turun ke saya. Sebagian besar kasus-kasus hukum bersumber dari laporan LSM. Tidak

masalah, ini baik sebagai bagian pengawasan,” ungkap Blessmiyanda.

Namun, menurut Blessmiyanda, jalan terbaik berikutnya adalah menghadapi penegak hukum. Bukan menghadapi LSM. “Dan yang terpenting, bicara dengan data. Tunjukkan bukti di atas pengakuan,” ujar Blessmiyanda.

Ia mengingatkan, integritas pemimpin menjadi hal yang utama. “Makanya saya paling kesal jika ada orang menghadap saya tiba-tiba menyodorkan uang. Untuk membeli saya? Ini merendahkan martabat saya,” tegas Blessmiyanda.

Untuk memenangi tender lewat pintu belakang, lanjut Blessmiyanda, ada beberapa kontraktor yang mengaku dekat dengan sejumlah petinggi, lalu mengancam dengan cara yang halus.

“Saya sampaikan kepada mereka, kalau mau menang tender, perhatikan soal kualifikasi, pengalaman, dan sederet hal lain seperti yang sudah ditetapkan BPPBJ. Tak usah memberi iming-iming uang, mengancam dengan berunjuk rasa, atau karena dekat dengan sejumlah pejabat penting. Kami tidak bisa dibeli dengan uang,” tutur Blessmiyanda.



E-Order, Mengurai Benang Kusut

IDE MEMBANGUN APLIKASI E-ORDER MAKIN MATANG PADA MARET 2019. KEPALA SUB BIDANG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BPBBJ DKI, ANDRI SURYA ACHMADI, MEMBAWANYA KEPADA BLESSMIYANDA. INI MERUPAKAN JAWABAN ATAS KONSEP KEBERPIHAKAN TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH (UKM) YANG MUNCUL SETELAH ERA GUBERNUR ANIES BASWEDAN. SEKALIGUS JADI HARAPAN UNTUK MENGURAI BENANG KUSUT PENGADAAN LANGSUNG MAKAN-MINUM.

E-order didesain sebagai pasar *online* bagi UMKM Jakarta. Pembelinya adalah seluruh SKPD di bawah Pemprov DKI



Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda dan Kasubbid Informasi Pengadaan Andri Surya Achmadi dalam sebuah rapat ketika proses pembentukan e-order.

Jakarta. Anggarannya diambil dari pengadaan langsung. Di aplikasi e-order, UKM bisa menjajakan produk mereka sesuai kekhususannya masing-masing. Mulai dari makanan, minuman, alat tulis souvenir, jasa perbaikan, perkakas, pakaian, bahan pangan, material, dan lainnya.

Tapi untuk awal, tidak bisa seluruh jenis UKM dilibatkan. Sasaran awal e-order lalu ditetapkan berdasarkan anggaran pengadaan langsung terbesar. Jawabannya adalah UKM makanan dan minuman. Sebab anggaran pengadaan langsung terbesar di Pemprov DKI adalah makan-minum dan konsumsi.

Pada tahun 2018, tercatat total anggaran makan-mi-

num dan konsumsi di seluruh SKPD di bawah Pemprov DKI Jakarta adalah sebesar Rp343,1 miliar. Tahun 2019 angkanya melonjak tajam, jadi Rp844 miliar. Sayang jika UKM tidak bisa memperoleh laba dari angka sebesar itu.

Sebelum 2019, UKM makanan dan minuman di Jakarta tidak bisa ikut bersaing dalam pengadaan langsung makan-minum. Penyebab utamanya adalah terlalu beratnya syarat bagi penyedia pengadaan langsung. Mulai dari harus berbadan hukum, wajib memiliki SKDP, NPWP, TDP, dan SIUP. Hal itu membuat hanya rumah makan besar yang mampu memenuhi syarat. UKM rumahan tidak akan bisa masuk kualifikasi.

Sejak awal e-order, antisipasi terhadap beratnya syarat sudah terpikirkan. Caranya adalah dengan penyederhanaan syarat. Tak perlu badan hukum, SKDP, TDP, apalagi SIUP untuk ikut e-order. UKM hanya perlu memiliki NPWP perorangan. Bahkan, jika tak memiliki NPWP tetap diperbolehkan.

Namun, e-order masih butuh lebih banyak masukan. Tujuannya agar aplikasinya nanti benar-benar berpihak pada UKM. Sosialisasi lalu digelar sebelum *website* e-order dibangun. Fungsinya adalah menampung seluruh masalah UKM sehingga bisa dicari penyelesaiannya dalam aplikasi e-order yang akan dibuat.

“Ada sekitar tiga sampai empat pertemuan dengan para pelaku UKM sebelum *website* e-order dibangun,” kata Kepala Subbidang Sistem Informasi Pengadaan BPBBJ DKI, Andri Surya Achmadi.



Pertemuan itu dihadiri berbagai pelaku UKM makanan dan minuman. Mereka diundang berdasarkan basis data Jakpreneur. Jakpreneur merupakan kelanjutan OK OCE yang digagas mantan Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

Berkat basis data itu, para pelaku UKM yang hadir di sosialisasi jadi beragam. Mulai dari UKM yang menengah sampai yang benar-benar kecil. Usia yang datang juga beragam. Dari muda sampai nenek-nenek.

“Beberapa ada yang sudah tua, tapi tetap energik. Semangatnya tinggi sekali,” ujar Andri. Mereka yang sudah tua memilih membawa anak atau cucunya. Begitu tak mengerti dengan istilah-istilah kekinian, para orangtua itu menyerahkannya ke anak atau cucunya.

Masukan sepanjang sosialisasi benar-benar baik. Permasalahan UKM Jakarta jadi terbungkus. Ternyata ada banyak kendala UKM yang perlu dituntaskan lewat e-order.

Pertama, UKM tidak mampu diutang dalam jangka waktu lama. Sedangkan rata-rata pengadaan langsung

membutuhkan proses pembayaran antara satu sampai tiga bulan. Penyebabnya adalah metode pembayaran langsung memakai sistem manual.

Dalam sistem itu, bendahara akan menumpuk kuitansi pembayaran selama paling tidak satu bulan. Pada bulan berikutnya, baru bendahara memprosesnya ke bank. Jika segalanya sudah lengkap, bank akan memproses pembayaran. Jika belum, bank akan mengembalikan berkas ke bendahara. Bendahara lalu memulangkannya ke penyedia untuk dilengkapi. Ruwet. Benang kusut. Terlalu melelahkan bagi UKM.

Keluhan ini baru bisa dipecahkan pada Agustus 2019, setelah aplikasi e-order rampung dibangun. Blessmiyanda mengajak Bank DKI berkolaborasi. Solusinya mengawinkan aplikasi e-order dengan sistem *payment gateway* Bank DKI. Prosesnya tidak mudah.

“Butuh waktu sekitar satu bulan untuk mengoneksikan aplikasi e-order dan *payment gateway* Bank DKI,” kata Andri. Setelah sehari-hari begadang dan berpindah tempat kerja antara kantor pusat Bank DKI dan Pemprov DKI, kedua sistem itu akhirnya terkoneksi. Ini benar-benar menyederhanakan sistem pembayaran. UKM bisa menerima uang maksimal tiga hari kerja setelah pekerjaan mereka selesai.

Masalah lainnya yang muncul saat sosialisasi adalah fakta bahwa karakteristik UKM makanan di Jakarta tidak seragam. Tidak semua UKM makanan di Jakarta *ready stock*. Itu yang membuat mereka tidak bisa ikut *Go-Food*. Ada dari



Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda memimpin rapat bersama pihak Bank DKI dalam proses pembentukan e-order. Pihak BPPBJ memang berkolaborasi erat dengan Bank DKI dalam e-order.

mereka yang hanya menerima pesanan satu bahkan tiga hari sebelum makanan dibutuhkan.

“Kalau itu sejak sosialisasi langsung terpikir penyelesaiannya. Langsung terpikir harus ada kategori. Kategori untuk UKM yang *ready stock*, artinya hari itu dipesan hari itu antar. Lalu ada UKM yang khusus pesanan H-1. Jadi hari ini pesan, besok antar. Terakhir adalah kategori untuk UKM yang hanya bisa memproses makanan dua sampai tiga hari sebelumnya,” kata Andri. Semuanya harus diakomodasi karena tujuan utamanya adalah membuka kesempatan seluasnya bagi seluruh pelaku UKM di Jakarta.

Masalah terakhir adalah kebingungan UKM dalam urus-



an hitungan pajak, dan blanko *invoice*, serta kwitansi. Andri lalu terpikir untuk menyertakan seluruh blanko di dalam aplikasi e-order. Sehingga para pelaku UKM maupun SKPD pemesan hanya perlu mengunduhnya.

Setelah seluruh masalah tertampung, aplikasi e-order mulai dibuat pada Maret 2019 juga. Andri memakai dana jasa konsultasi untuk membayar tenaga ahli pembuat aplikasi. Pembuatan *website* dan aplikasi memakan waktu tiga bulan. Bulan Juni 2019 rampung, lalu diluncurkan.

Sekitar Juli 2019, pelaku UKM mulai mendaftarkan produk mereka. Sosialisasi kembali gencar dilakukan BPPBJ. Salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat pelaku UKM adalah dengan mempraktikkan pembelian e-order di depan para pemilik UKM saat sosialisasi.

“Jadi yang sudah daftar lebih dulu ya kita minta datang di sosialisasi. Lalu kita contohkan membeli di dia saat sosialisasi. Nah, kan mereka jadi paham prosesnya, dan akhirnya tertarik bergabung,” kata Andri.

Dengan cara itu, sampai Maret 2020, terdata sebanyak



809 pelaku UKM telah jadi anggota e-order. Dari 809 pelaku UKM, terdapat 1.338 produk makanan dan minuman saling bersaing.

Sambil berjalan, perbaikan dan kemudahan juga terus diperbaiki. Salah satunya menyangkut pengenaan pajak. E-order memang membolehkan pelaku UKM yang memiliki NPWP maupun tanpa NPWP untuk bergabung. Perbedaannya ada di pengenaan pajaknya. Dengan NPWP dipajak 2 persen, tanpa NPWP dikenakan 4 persen.

BPPBJ lalu membuat inovasi untuk meringankan besaran pajak. Caranya lewat kolaborasi dengan perpajakan. BPPBJ meminta pihak pajak menerbitkan surat keterangan UMKM. Pemegang surat ini hanya dikenai 0,50 persen pajak PPH. Hal ini membuat migrasi para anggota e-order. Kini 80 persen lebih sudah memegang surat keterangan UMKM.



BAB 3

BUAH-BUAH TENDER

Rumah Tangga Diselamatkan Jak Lingko

OJEK ONLINE DAN TAKSI ONLINE BENAR-BENAR MENGHANTAM ANGKOT REGULER. PENDAPATAN SOPIR ANGKOT REGULER TERBABAT HABIS. LOMO MARPAUNG (50) MERASAKANNYA PADA TAHUN 2017 LALU. IA MERASAKAN MASA-MASA SAAT DIRINYA TAK BISA LAGI MENCUKUPI KEBUTUHAN RUMAH TANGGANYA AKIBAT KETATNYA PERSAINGAN TRANSPORTASI JAKARTA.

“Tahun 2017 itu angkot reguler sudah susah cari penumpang. Satu hari saya bisa cuma bawa pulang Rp50 ribu, Rp30 ribu, atau bahkan nol, semuanya habis untuk setoran,” kata Lomo, ketika ditemui di Terminal Kampung Rambutan, Rabu (11/4/2020).



Armada Jaklingko di Terminal Kampung Rambutan.

Bagi Lomo, itu adalah masa-masa terberatnya. Malu rasanya pulang ke rumah tanpa sepeser pun uang yang ia bisa berikan ke istrinya.

Istrinya marah berkali-kali. Meminta Lomo mencari jalan lain agar keuangan keluarganya kembali normal. Tapi tidak semudah itu. Kemampuan Lomo satu-satunya adalah menjadi sopir. Dia juga tidak punya tawaran untuk bekerja di tempat lain.

Masalah itu berjalan sekitar dua tahun. Ia sudah merasakannya sejak 2016, ketika transportasi *online* semakin *booming*, dan tahun 2017 adalah puncaknya bagi Lomo. “Jadi dua tahun saya merasakan kesulitan dapat uang dari angkot reguler,” kata Lomo yang dahulu bekerja di angkot J10.

Jadi tahun 2017 adalah masa di saat segalanya makin kacau bagi Lomo. Istrinya sering marah. Lomo lalu sering memilih tidur di terminal ketika tidak bisa membawa sepeser pun uang ke rumah. Dia takut lantaran istrinya sudah mulai bicara cerai, dan berkali-kali meminta cerai.

Jalan keluar penyelesaian kekacauan rumah tangga Lomo terbuka lebar pada tahun 2018. Ok O Trip mulai berjalan. Lomo lalu melamar.

Dia berhasil lolos tes, dan mengikuti diklat di Tegal selama sepekan. Kehidupannya pun kembali cerah. Lomo masuk Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan mengoperasikan Angkot Jak Lingko J72.

Penghasilannya di Jak Lingko benar-benar jelas. Jam

kerjanya juga jelas. Amat membantu lantaran usianya sudah 50 tahun. Di Jak Lingko, tidak ada sopir yang boleh kerja seharian penuh. Satu mobil harus memiliki 2 sopir batangan. Satu mengisi sif pagi, dan seorang lagi mengisi sif siang (14.00 – 22.00).

Lalu setiap tiga mobil Jak Lingko harus memiliki sopir cadangan. Fungsinya agar sopir batangan memiliki satu hari libur. Sopir cadangan boleh bekerja di dua atau tiga mobil. Dengan begitu sopir cadangan bisa memiliki penghasilan setiap hari, sama seperti sopir batangan.

Lomo adalah sopir batangan, dia kebagian sif siang. Setiap hari dia sudah pasti mendapatkan Rp140.000 jika mengendarai Jak Lingko sejauh 112 km, atau 4 rit. Satu rit berjarak 28 km. Mudah bagi Lomo mencapai target itu. Sebab sebelum Era Jak Lingko, Lomo bisa bekerja di angkotnya seharian, atau delapan rit. Dengan begitu, penghasilan per bulan bisa mencapai Rp3,6 juta.

Selain bertambahnya penghasilan, angkot Jak Lingko juga memutus beberapa aturan tak tertulis para sopir angkot. Hal ini dirasakan oleh seluruh sopir Jak Lingko.

Salah satu yang merasakannya adalah Deni Handika (25). Ia berkali-kali terlibat perkelahian dengan sesama sopir angkot reguler 12 Jurusan Kampung Rambutan-Mayasari. Salah satunya terjadi sekitar tahun 2016. Penyebabnya saling rebut penumpang.

“Sopir angkot itu datang dari arah berlawanan mobil saya. Dia lalu putar balik dan berjalan di depan saya, kemu-



Armada Jaklingko di Terminal Kampung Rambutan.

dian mengambil penumpang yang seharusnya milik saya. Itu tidak beretika. Makanya saya marah. Harusnya sopir itu membiarkan saya mengambil penumpang itu dulu. Itu aturan tak tertulis yang semua sopir tahu,” ujar Deni.

Peristiwa seperti itu terjadi berulang kali. Bukan hanya satu-dua kali ia alami. Sering. Menurut Deni, itu adalah buntut dari sulitnya mencari penumpang, sementara setoran di tahun 2016 sudah mencapai Rp140.000 setiap harinya. Itu berat di masa angkot reguler harus bersaing dengan ojek *online*.

Tapi di era Jak Lingko, tidak ada gesekan semacam itu dengan sesama sopir. Para sopir sudah dilepas dari kewajiban setoran. Tugas para sopir kini bukan lagi melayani pemilik mobil, tetapi melayani penumpang dengan baik dan benar. Bagi Deni, ini jauh lebih ringan dan nyaman.

Tak hanya sopir regular, ada pula sopir truk dan travel yang beralih profesi jadi sopir Jak Lingko. Salah satunya adalah Helmi Darmawan, sopir angkot Jak Lingko 72 Kampung Rambutan-Pasar Rebo. Dia baru masuk Jak Lingko tahun 2019 lalu.

Sebelumnya, Helmi bekerja sebagai sopir travel. Tapi perusahaan travel tempatnya bekerja bangkrut. Ia lalu pindah jadi sopir pengangkut kayu. Tapi pekerjaannya tidak teratur. Dia hanya dapat panggilan bekerja dua kali dalam sepekan. Ia lalu mendaftar Jak Lingko.

Dari sisi keamanan, Jak Lingko juga membuat peremajaan angkot jadi memungkinkan. Di masa angkot reguler,



Armada Jaklingko beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19. Angkot-angkot Jaklingko diwajibkan menyediakan hand sanitizer untuk digunakan penumpang.

sangat sulit pemilik meremajakan armadanya. Penyebabnya adalah terlalu sibuk mengejar keuntungan dan semakin turunnya jumlah penumpang setelah bersaing dengan ojek *online*.

“Saya itu terakhir bawa angkot reguler itu yang usianya sudah lewat 10 tahun. Itu kan harusnya sudah diremajakan. Tapi ya tidak juga, karena pihak koperasinya tidak terlalu menekan,” kata Agung Wibowo (31), seorang sopir Jak Lingko saat ditemui di Terminal Kampung Rambutan.

Bahkan, kata Agung, terkadang pergantian onderdil kendaraan pun tidak dilakukan untuk menghemat pengeluaran.

Padahal ini membahayakan keselamatan.

Setelah era Jak Lingko datang, urusan peremajaan jadi teratur. Penyebabnya pengawasan ketat dan pendapatan yang pasti bagi para pemilik armada. Ini era yang lebih teduh bagi angkot. Setidaknya angkot-angkot kembali memiliki habitat yang lebih kedap dari kerasnya persaingan transportasi di Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menargetkan sebanyak 10.047 angkutan umum di Jakarta terintegrasi dalam Jak Lingko pada tahun 2020.

Sejauh ini, sampai tahun 2019 lalu, jumlah armada yang tergabung dalam sistem Jak Lingko dan telah diremajakan adalah 3.395 unit. Terdiri dari 1.779 bus besar, 420 unit bus sedang, dan 1.160 unit bus kecil. Angka ini dijamin akan terus bertambah dari tahun ke tahun.



Senyum dari Rusunawa

INNEKE KAWUNANG TERKEJUT KETIKA DINAS PERUMAHAN PEMPROV DKI JAKARTA AKHIRNYA MENGHUBUNGINYA, AGUSTUS 2019. DIA DIMINTA DATANG PADA PENGUNDIAN UNIT RUSUNAWA BLK PASAR REBO. HATINYA BEGITU GEMBIRA. PENANTIANNYA DUA TAHUN TIDAK SIA-SIA.

Beberapa pekan berikutnya, Inneke sudah menempati salah satu unit di rusunawa BLK Pasar Rebo. Tempat tinggalnya kini memiliki ruang tamu, satu kamar mandi, dua kamar tidur, dan dapur.

Akhirnya ia bisa berpisah tidur dengan ketiga anaknya. Satu kamar untuk ketiga anaknya, dan sekamar lagi untuk ia dan sang suami. Inneke juga membeli sofa di ruang tamu



Suasana Rusun BLK Pasar Rebo di Jakarta, sekitar awal November 2020. Rusunawa di Jakarta terus dibangun. Tahun 2019 lalu, BPPBJ DKI menggelar 10 paket tender rusunawa.



Unit rusunawa BLK Pasar Rebo dinilai sangat nyaman. Memiliki dua kamar tidur, dapur, dan ruang tamu. Sebuah keluarga bisa hidup sederhana dengan luasan ruangan yang tepat.

dan menghias dindingnya dengan *wallpaper* berwarna merah garis-garis, lalu menggantung foto dan hiasan. Sesuatu yang tidak ia lakukan di tempat tinggalnya dulu. Di dapur ia juga bisa menumpuk bahan makanan, dan meletakkan berjajar panci-panci kesukaannya.

“Tadinya kami *ngontrak* di Kramat Jati,” kata Inneke. Kontrakannya dulu begitu sempit. Mereka berlima tidur saling bertumpuk, sementara panci dan penggorengan ada di sekitarnya.

“Ya dulu kan kontrakannya itu hanya ada satu ruangan. Kita gelar kasur di situ untuk tidur berlima, lalu masak juga di



Bagian ruang tamu di salah satu unit rusunawa BLK Pasar Rebo.

situ,” ujar Inneke. Benar-benar membosankan dan membuat jenuh.

Oleh karena itu, Inneke menganggap kehidupannya jauh lebih baik setelah pindah ke rusunawa. Apalagi ia mengeluarkan biaya yang tak berbeda jauh dari ketika mengontrak dulu. Dulu ia membayar kontrakannya kecilnya Rp650 ribu per bulan. Kini rusunawa ia bayar Rp765 ribu per bulan. Apabila ditotal dengan listrik dan air, ia harus mengeluarkan Rp800 ribuan sebulan sebab listrik dan air tidak mahal. Air hanya sekitar Rp20 ribuan dan listrik paling tinggi Rp50 ribu.

Rasa syukur Inneke bertambah dalam ketika pandemi covid-19 datang. Suaminya yang bekerja sebagai tenaga

pembuat dokumen di sebuah perusahaan ekspedisi terkena dampaknya. Sang suami harus menerima hanya 50 persen gaji yang belum tahu akan sampai kapan.

Jika ia masih tinggal di kontrakan, segalanya pasti akan sangat merepotkan. Sebab kontrakan tidak mungkin memberi keringanan. Beruntung Inneke sudah masuk ke rusunawa. Pemprov DKI Jakarta sudah menggratiskan pembayaran iuran seluruh rusunawa di Jakarta sejak Maret 2020 lalu. Belum lagi bantuan sembako datang tiap bulannya.

“Ini benar-benar sangat membantu,” ujar Inneke. Dia merasa beruntung dulu ikut-ikutan sejumlah temannya mengurus unit rusunawa. “Dulu itu saya ikut-ikutan saja *ngajuin* rusunawa, eh tahunya dapat,” kata Inneke.

Kisah lain datang dari Supandi (47). Ia juga tinggal di Rusunawa BLK Pasar Rebo sejak tengah tahun 2019. Kehidupan Supandi pernah baik pada tahun-tahun sebelumnya, tapi kemudian luluh lantak akibat salah urus.

Supandi mengaku pernah memiliki rumah di Cikampek, tetapi kemudian ia jual karena tidak pernah ditempati. Lalu Supandi juga pernah memiliki tiga kontrakan di kawasan Makasar, Jakarta Timur.

Kontrakan itu menghasilkan uang selama tiga atau empat tahun, tetapi kemudian Supandi salah mengambil langkah. Ia lalu rugi dan terpaksa menjual seluruh kontrakannya.

Setelah itu, sejak tahun 2011, Supandi terpaksa kembali mengontrak bersama istri dan dua anaknya. Kehidupannya seakan terjun bebas. “Ya namanya hidup seperti itu ya. Kalau

bukan rezeki ya begitu,” kata Supandi yang sedih mengingat masa lalunya. Berkat rusunawa BLK Pasar Rebo, ia kini bisa hidup lebih nyaman ketimbang dikontrakan. Terpenting, ia bisa lebih banyak menyisihkan uang hasil kerjanya.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta, pemerintah provinsi kini mengelola 32 Rusunawa di Jakarta. Rumah susun itu merupakan hasil pembangunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Di 32 rusunawa itu, kini sudah ada 8.993 KK yang merupakan warga relokasi, atau korban gusuran. Adapun sebanyak 9.246 KK, yang merupakan warga umum, mereka yang mengajukan masuk rusunawa atas keinginan sendiri. Untuk total penghuni ke-32 rusunawa itu adalah 18.427 KK dengan 65.913 jiwa.

Tahun 2019, BPPBJ DKI melakukan tender untuk 10 paket rusunawa. Ke-10 rusunawa itu kini sedang dibangun, dan agak tersendat akibat pandemi covid-19. Meski demikian, pembangunan dipastikan rampung.





Rusunawa juga didisain memiliki taman bermain anak. Bagian ini menjadi penting karena mereka yang mengisi rusunawa sebagian besar sudah berkeluarga.

Inovasi dari Proyek Sekolah

SEPANJANG 2016 SAMPAI 2019, DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA SUDAH MEREHAB TOTAL SEBANYAK 387 SEKOLAH. PERINCIANNYA ADALAH 40 SEKOLAH PADA TAHUN 2016, 102 PADA TAHUN 2017, LALU 98 GEDUNG SEKOLAH PADA 2018, DAN 147 BANGUNAN PADA TAHUN 2019.

Rehab total sekolah adalah salah satu paket tender yang dikonsolidasikan oleh BPPBJ DKI. Salah satu tujuannya adalah agar perusahaan konstruksi besar yang jadi pemenangnya.

Harapannya adalah hasil pekerjaan lebih baik ketimbang masa di saat kontraktor kecil yang mengerjakan. Ketika proyek sekolah dikerjakan satu per satu kontraktor kecil atau



Bangunan unit sekolah baru (USB) Gifted School Cawang, 2019. Sekolah ini adalah salah satu sekolah baru di Jakarta yang tendernya dilakukan secara konsolidasi. Tahun 2019 Pemprov DKI total merehab total sebanyak 147 sekolah yang dipecah dalam 5 paket tender.



Sekolah dasar hasil rehab total tahun 2019

tak dikonsolidasikan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta pernah merasakan peristiwa menyedihkan. Dari pembangunan yang terlambat rampung terlalu lama hingga ditinggal kabur kontraktornya.

Setelah model konsolidasi dijalankan, sepanjang 2016 sampai 2019, tidak ada lagi peristiwa-peristiwa terlambat selesai terlalu lama, atau kontraktor yang kabur. Sepanjang 2016 sampai 2019, proyek rehab total sekolah rata-rata dimulai antara bulan Agustus atau September, dan rampung antara bulan Desember sampai Maret tahun berikutnya. Artinya paling cepat proyek rampung dalam 158 hari.



“Bangun sekolah itu tidak boleh lama-lama. Kasihan anak-anak kan mengungsi. Belajar di pengungsian itu tidak nyaman. Mereka harus berbagi jadwal dan kelas. Makanya bangun sekolah itu maksimal enam bulan harus rampung,” ujar Susie Nurhati, saat masih menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Susie ikut mengawal proyek rehab total sekolah setidaknya sejak tahun 2015. Dia kini baru saja pensiun sebagai PNS DKI pada akhir November 2020.

Dalam tahap pengerjaan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memegang peranan agar tender yang telah selesai tepat waktu oleh BPPBJ DKI dan mendapatkan kontraktor mum-



Tender konsolidasi memberi efek baik terhadap ketepatan waktu dalam proyek rehab total sekolah tahun 2019. Sebagian besar proyek rehab total rampung pada bulan Desember 2019, hanya beberapa yang baru selesai antara Januari sampai Maret 2020.

puni, bisa benar-benar berjalan sesuai *timeline*, dan akhirnya rampung sesuai *deadline* yang ditentukan.

Saat itulah Dinas Pendidikan DKI mengeluarkan energi 'amarahnya'. Mendesak kontraktor berinovasi, dan selalu punya progress setiap rapat.

Kabid Sarana dan Prasarana Disdik DKI pada tahun 2018, Riza Manfaluthi yang memainkan peranan ini. Dia tergolong perfeksionis. Tidak boleh ada yang telat datang ke rapat. Satu saja tidak hadir maka ia akan membatalkan rapat.

Riza ingin setiap masalah harus muncul solusinya, dan dia tidak suka melihat *project manager* (PM) yang suka mencari-cari alasan. Riza juga aktif berkeliling ke seluruh lokasi proyek. Jadwal Riza tidak ada yang tahu. Dia bisa tiba-tiba ke sebuah lokasi dan melihat perkembangan di lokasi itu.

Sikap itulah yang kerap membuat rapat PM proyek rehab total sekolah jadi tegang. Sudah menjadi kebiasaan pada setiap rapat Riza akan marah, dan mengancam. Riza tak mau ada debat kusir dalam rapat. Apa yang dianggapnya salah, tak boleh ada yang membantah.

Ancaman terbesarnya adalah meminta bos para PM untuk mengganti PM tersebut. Permintaan ini biasanya ia lakukan apabila PM tersebut tidak tepat waktu, atau cenderung tidak memiliki solusi untuk sebuah masalah.

Senjata Riza adalah mengancam akan menerbitkan surat keterangan bagi para PM bahwa mereka berkinerja buruk. Surat ini adalah masalah besar bagi seorang PM. Sebab surat kinerja buruk itu tidak hanya sampai di meja petinggi

perusahaan konstruksi, tetapi juga ditembuskan ke seluruh instansi.

Surat yang Riza tanda tangani itu bak alarm bagi kalangan PPK di seluruh instansi negeri ini. Begitu nama orang yang diberi surat kinerja buruk dipakai lagi saat mengerjakan proyek di instansi lain, maka PPK di instansi lain akan menolak dengan dasar surat dari PPK proyek sebelumnya.

Bagi para PM, cara Riza ini menumbuhkan tuntutan yang tidak main-main. Secara tidak langsung para PM jadi terus memutar otak untuk berinovasi. Inovasi adalah poin utama agar tender konsolidasi yang dilakukan BPPBJ tidak sia-sia.

Ali Abrar Sitepu, *project manager* yang ditunjuk WIKA untuk paket 1 proyek rehab total sekolah 2018, juga melakukan sederet inovasi lantaran berbagai kendala. Salah satunya adalah soal tipisnya persediaan beton tiang pancang saat ia mau memulai pengerjaan.

Padahal, tadinya dia ingin memakai fondasi tiang pancang di seluruh lokasi sekolah di paket 1. Paket 1 berlokasi di Jakarta Utara dan Pulau Seribu. Tipisnya persediaan tiang pancang membuat Ali mengambil langkah inovasi. Ia menggantinya dengan metode fondasi konstruksi sarang laba-laba (KSL).
KSL).
KSL).

Tiang pancang memang lebih mudah dan cepat dari KSL. Tapi risiko harus diambil agar proyek bisa berjalan tepat waktu. Lebih baik memakai KSL yang agak rumit pemasangannya ketimbang menunggu ketersediaan tiang beton.



Kendala utama dalam proyek rehab total sekolah di Jakarta adalah banyak sekolah yang berada di tengah pemukiman padat. Hal ini membuat akses truk material sulit sehingga kontraktor harus memutar otak dan berinovasi.

Toh, kekuatan KSSL sama saja dengan tiang pancang, bahkan KSSL sudah terbukti lebih tahan gempa.

Tahun berikutnya, giliran Taufik Dwi Tyas Hartanto (28) berinovasi. Dia terpaksa membangun jembatan darurat di lokasi proyek SMPN 282 Jakarta. Tyas adalah pelaksana di lokasi proyek SMPN 282 yang dikerjakan PT Jaya Konstruksi.

Jembatan darurat itu dibuat untuk menghubungkan halaman belakang sekolah dengan kompleks pergudangan. Ia harus melakukan itu untuk mengatasi sulitnya akses ke pintu masuk utama.

Jalan ke pintu masuk utama merupakan jalan sempit yang tak mungkin dilewati truk molen. Hal itu akan mengganggu pasokan beton cair ketika masuk tahap pengecoran. Tyas harus menyewa mobil beton kecil apabila tetap memaksa masuk lewat pintu depan. Efeknya akan membuat tahap pengecoran terlambat dari waktu seharusnya.

Beruntung di belakang sekolah ada kompleks pergudangan. Jalannya besar dan bisa dimasuki truk jenis apa pun. Tapi sayangnya antara kompleks pergudangan dan lokasi sekolah dibelah oleh sungai kecil.

Tyas lalu melobi pihak pergudangan dengan dibantu atasannya. Tujuannya agar pihak gudang mau memberi akses, dan setuju dibuat jembatan penghubung. Rupanya pengelola kompleks pergudangan setuju dengan beberapa syarat ringan.

Ia lalu membuat jembatan sederhana. Bahannya adalah tiga unit boks beton besar yang biasa digunakan untuk saluran

air. Boks itu disusun di sepanjang lebar kali. Menghubungkan sisi dari kompleks pergudangan ke sisi halaman belakang sekolah. Di atas boks beton itu lalu dipasang pelat baja.

Jembatan darurat itu kemudian benar-benar menyelesaikan seluruh masalah. Akses mobil pengangkut material dan beton tidak terganggu. Bahkan Tyas bisa memasukkan truk besar bermuatan 40 ton pengangkut alat pancang *hydraulic statis pile driver* (HSPD). Pemakaian alat HSPD yang tadinya tidak direncanakan ini jadi tambah mempercepat proses pemancangan tiang pancang beton.

“Tadinya kami sudah mau pakai labrang saja karena kami pikir HSPD tidak bisa masuk. Tapi setelah ada jembatan darurat ternyata jadi bisa masuk. Ya sudah jadi pakai HSPD,” kata Tyas.

Pada tahun yang sama, yakni proyek rehab total sekolah tahun 2019, Riza bertukar posisi dengan Budi Sulistio. Riza menjabat Kasudin Pendidikan Jakarta Utara dan Budi Sulistio menduduki Kabid Sarana dan Prasarana.

Budi tidak merombak apapun ketika ia mulai bekerja pada September 2019. Penyebabnya ia masuk di tengah proyek sehingga tak ada gunanya merusak sistem yang telah lebih dulu dibangun Riza. Kebesaran hati yang baik.

Tapi di bulan Oktober 2019 Budi terpaksa melakukan sedikit perubahan. Ia melakukannya hanya untuk penyesuaian dengan dirinya. Budi tidak nyaman dengan sistem rapat kerja mingguan (RKM) yang dibuat Riza. Sebab Riza membuat RKM dengan cara berkeliling ke tiap lokasi.

Budi memilih mengubah metode RKM jadi lebih sederhana. Budi meminta seluruh PM memasang kamera CCTV di seluruh sudut lokasi proyek. Dengan begitu, Budi tinggal melakukan RKM dari ruang rapat di kantornya di Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Jakarta Selatan. Setiap rapat, Budi tinggal mengecek kemajuan perkembangan pengerjaan lewat kamera CCTV yang ditayangkan di layar besar ruang rapat.

KEBAHAGIAAN DI SEKOLAH BARU

Berikutnya, kecepatan pengerjaan rehab total sekolah membawa kebahagiaan tersendiri bagi siswa dan guru. Ini terjadi nyaris di seluruh lokasi proyek rehab total dari tahun ke tahun. Kebahagiaan paling utama lantaran mereka tidak perlu terlalu lama belajar di sekolah pengungsian.

Ramadani, Kepala SMP Negeri 54, saat sekolahnya di-rehab total tahun 2018, mengaku senang dengan kecepatan kontraktor. “Penyelesaian proyek hanya lima bulan saja,” kata Ramadani. Pada awal Januari 2019, Ramadani sudah bisa membawa murid-muridnya ke gedung baru.

Cepatnya penyelesaian proyek membuat murid-murid SMPN 54 bisa lekas belajar seperti biasa. Saat masih direhab total, para siswa harus mengungsi ke SMP Negeri 22 Jakarta. Akibatnya kegiatan ekstrakurikuler terpaksa dilakukan hanya di setiap akhir pekan. “Kadang tidak bisa dilakukan kalau lapangan sekolah dipakai,” ujar Ramadani.

Kepala SD Negeri Sukabumi Utara 01, Esih Sunarsih,



Para siswa di salah satu sekolah hasil rehab total tahun 2018.

kini punya alasan mengubah budaya sekolahnya setelah gedung baru sekolah rampung. Esih ingin para siswanya memiliki kebiasaan baru.

“Ini sekolah baru. Gedungnya bagus. Perilaku murid-murid juga harus lebih bagus. Kebiasaan buruk di gedung lama harus diakhiri. Salah satu kebiasaan buruk itu adalah kebiasaan jajan di jalanan,” ujar Esih.

Ia lalu membuat kantin sekolah yang menyajikan makanan bersih, sehat, dan bergizi. Caranya yaitu dengan menggandeng puskesmas setempat untuk menyeleksi pedagang-pedagang di kantin sekolah. Sebelum rehab total, ia tidak bisa melakukan ini karena siswa telanjur hidup dengan gaya lama.





Rencana Induk Maksimalkan Katalog Trotoar Jakarta

PEMBANGUNAN TROTOAR JAKARTA BEGITU MASIF SETIDAKNYA SEJAK TAHUN 2018. TROTOAR DI SEPANJANG JALAN MH THAMRIN, SUDIRMAN, SAMPAI BLOK M, KINI SERAGAM. LEBAR, DAN MEWAH. BEGITU JUGA DI JALAN SALEMBA RAYA, CIKINI, DAN KEMANG. SELAIN ITU, MASIH ADA SEDERET WILAYAH LAIN YANG MERASAKAN PERUBAHAN TROTOAR.

“Ini *udah* kaya di Singapura begini ya Jalan Sudirman,” ujar Mei Amelia (38). Dia memang sudah jarang melewati kawasan Sudirman-Thamrin karena berkantor di bilangan Tendean, Jakarta Selatan. Makanya dia terkejut melihat perubahan di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.



Suasana trotoar hasil revitalisasi pada malam hari. Warga Jakarta kini bisa berjalan lebih nyaman.

Tahun 2018, BPPBJ DKI menggarap katalog lokal trotoar. Pengamat perkotaan, Nirwono Yoga, menilai sistem katalog lokal membuat pembangunan trotoar jadi mudah dan terarah. Salah satu keuntungan utamanya adalah membuat pembangunan trotoar bisa jadi seragam.

“Kita apresiasi ini, tetapi ada beberapa evaluasi yang harus segera dilakukan,” kata Nirwono. Dia menyayangkan pembangunan trotoar tidak memiliki rencana induk jalur pejalan Kaki. Menurut Nirwono, inilah masalah yang membuat kadang muncul protes terkait kebutuhan trotoar.

“Jadi kalau ditanya kenapa yang direvitalisasi Kemang,



Trottoar hasil revitalisasi membuat orang sakit dan penyandang disabilitas dapat menggunakan kursi roda dengan lebih mudah.

kenapa Cikini, nah itu bisa dipastikan jawabannya akan berbeda-beda. Penyebabnya, ya tidak punya rencana induk tadi,” kata Nirwono.

Salah satu kritik Nirwono adalah soal trotoar Kemang. Menurut Nirwono, trotoar di Kemang sebenarnya diperuntukkan bagi wisatawan atau orang yang ingin pergi ke kafe atau tempat nongkrong di sana. Jadi tidak ada kaitannya antara trotoar Kemang dan pengalihan orang agar memakai angkutan publik.

“Kebutuhan trotoar Kemang itu beda. Kemang bukan jalur utama transportasi publik sehingga trotoar Kemang itu tidak perlu terlalu lebar. Wajar jika kemudian banyak yang protes soal trotoar kemang,” ujar Nirwono. Hal itu tidak akan terjadi jika Jakarta sudah memiliki rencana induk jalur pejalan kaki. Dengan adanya rencana induk, pemerintah dapat membina prioritas dalam hal revitalisasi.

Nirwono mencontohkan betapa pentingnya rencana induk jalur pejalan kaki. Jika misalkan berdasarkan rencana induk tersebut bahwa trotoar untuk mendorong orang beralih ke transportasi publik, maka trotoar hanya akan dibangun di jalur di mana terdapat akses angkutan publik.

“Jadi trotoar ini nantinya menghubungkan orang dari MRT ke halte Transjakarta, atau jadi penghubung ke KRL,” kata Nirwono. Nantinya ini akan berpengaruh terhadap lebar trotoar yang dibangun. Sangat tergantung kebutuhannya. “Jadi trotoar lebar dan kecil itu ada peruntukannya,” ujar Nirwono.



Warga Jakarta kini bisa berjalan lebih nyaman di trotoar setelah direvitalisasi.

“Kalau di Blok M dan Sudirman trotoarnya lebar tidak apa-apa sebab itu menghubungkan orang dari MRT ke Transjakarta. Kalau di Kemang tidak perlu lebar-lebar karena itu hanya menghubungkan orang dari parkir ke kafe dan tempat wisata di Kemang. Tidak ada terminal atau stasiun angkutan publik kan di Kemang,” kata Nirwono.

Masalah kedua, kata Nirwono, yakni koordinasi yang buruk antar-SKPD di Pemprov DKI Jakarta. Terkadang, kata Nirwono, yang terjadi adalah revitalisasi trotoar tanpa revitalisasi saluran air. “Akhirnya terjadi genangan air pada saat hujan,” ujar Nirwono.

Menurut Nirwono, seharusnya dengan sistem katalog



Kenyamanan warga Jakarta saat berjalan di trotoar adalah tujuan merevitalisasi trotoar.



Suasana trotoar hasil revitalisasi pada malam hari.

lokal yang sudah dilakukan BPPBJ DKI, hal ini bisa lebih mudah dilakukan, yakni merevitalisasi trotoar sambil membangun saluran air baru. “Kan tinggal klik saja itu kalau sudah e-katalog lokal,” kata Nirwono.

Persoalan itu, kata Nirwono, karena tanggung jawab saluran air ada di Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan tanggung jawab trotoar ada di Dinas Bina Marga. Pertanyaannya adalah kedua dinas itu pernah bertemu atau tidak untuk membahas bersama masalah revitalisasi trotoar yang bersangkutan paut dengan saluran air.

“Ini kan hanya harus ada kesamaan rencana saja. Kalau Dinas Bina Marga mau revitalisasi trotoar di suatu titik

lokasi, maka Dinas SDA juga harus membuat rencana untuk revitalisasi saluran air di titik itu,” kata Nirwono.

Lagi-lagi, kata Nirwono, ujung pangkal masalah ini bisa beres apabila ada rencana induk. Rencana induknya adalah rencana induk trotoar (jalur pejalan kaki) – utilitas, dan saluran air.

“Apabila ada rencana induk untuk ketiganya, maka semua SKPD akan mudah untuk mengikuti arah pembangunan, dan mudah mengatur rencananya,” kata Nirwono.

Rencana induk jaringan utilitas menjadi penting bagi trotoar karena akan membuat umur trotoar jadi panjang. Jika tidak ada rencana induk utilitas, yang terjadi adalah trotoar akan terus mengalami pembongkaran ketika ada utilitas di bawahnya yang mesti diganti. “Tidak kelar-klar trotoarnya. Sudah bagus, dibongkar lagi,” kata Nirwono.

Makanya, ujar Nirwono, rencana induk merupakan kunci utama agar pembangunan trotoar tidak sia-sia dan lebih terarah.





Dereta sepeda yang bisa disewa warga Jakarta.

Pengorbanan Renny

**HATINYA HANCUR DITUDING
MENGGELAPKAN UANG. PERCAKAPAN
DI GRUP WHATSAPP KOMITE SEKOLAH
BENAR-BENAR MERUSAK NAMA
BAIKNYA. PENGORBANANNYA TIGA
BULAN BELAKANGAN SEOLAH TAK ADA
ARTINYA. FITNAH TERHADAP DIRINYA
BEGITU KEJAM DAN KASAR.**

Renny Rama Sasmita (37) adalah ibu dua anak yang nama baiknya berantakan di akhir Desember 2019. “Bagi saya ini bentuk pengorbanan. Dia salah satu orang yang membuat model pengadaan baru Pemprov DKI Jakarta bisa berjalan di tataran akar rumput,” kata Kepala BPPBJ DKI, Blessmiyanda.

BPPBJ memang mengadakan serangkaian perubahan



Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda di ruang kerjanya. Pada tahun 2020, jumlah pegawai BPPBJ adalah sebanyak 65 orang. Penyebabnya PNS BPPBJ kerap diambil instansi lain dan dinaikkan jabatannya. Sehingga tidak ada alasan untuk menahannya bertahan di BPPBJ.

metode pengadaan untuk beberapa program pada tahun 2019. Salah satunya adalah pengadaan Pemberian Makan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Ini merupakan program berupa pemberian makanan bergizi di pagi hari kepada para siswa. Tujuannya agar siswa lebih sehat.

Program ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2018. Tapi pengadaannya masih dilakukan lewat tender. Hasil evaluasi menunjukkan para penyedia tidak maksimal. Makanan yang datang kadang tidak segar lagi dan banyak keluhan lain.

BPPBJ lalu mengubah model pengadaannya jadi swa-kelola pada tahun 2019. Anggaran diletakkan di Dinas Pen-

didikan. Lalu penyedia dikelola komite tiap sekolah. Pihak komite sekolah wajib mengoordinasi warga setempat atau orangtua murid untuk membuat makanan tersebut.

“Model ini dinilai lebih efektif ketimbang tender. Kami melakukan beberapa Bimtek, baru kemudian PMTAS dengan swakelola digerakkan,” kata Blessmiyanda.

Sebelum digelontorkan dana, komite sekolah wajib membuat rencana anggaran biaya (RAB). Isinya adalah perincian menu makan, harga jasa tenaga, dan perincian biaya lainnya. Selain itu, pihak komite juga wajib membuat laporan. Tujuannya untuk mengontrol agar PMTAS tersalurkan dengan tepat dan tertib anggaran.

Bagi Blessmiyanda, kasus Renny adalah dampak dari program PMTAS swakelola. Renny merupakan Wakil Ketua Komite SLB Negeri 09 Sunter Agung (SLBN 09). SLBN 09 adalah sekolah baru. Komitenya juga baru terbentuk sekitar Agustus 2019.

“Saya ketua komitenya, dan Renny wakilnya. Tapi lantaran kesibukan saya, saya jadi lebih banyak menyerahkan tugas kepada Renny. Salah satunya menyangkut PMTAS,” kata Blessmiyanda.

Sekitar Oktober 2019, Renny dapat undangan rapat dari Disdik. “Saya ingat betul itu hari Rabu,” ujar Renny. Keputusan rapat meminta SLBN 09 segera menjalankan PMTAS. Bahkan hari Jumat, atau dua hari setelah rapat, PMTAS harus sudah berjalan.

Renny kalang kabut. Artinya dia harus lebih dulu mencari



Para anggota Komite SLBN 09 Jakarta yang baru mulai menggerakkan program PMTAS pada akhir tahun 2019. Penyebabnya sekolah ini baru berdiri pada pertengahan 2019.

dana talangan, sementara penyusunan RAB dilakukan. “Saya minta bantuan ke Pak Blessmiyanda. Beliau lalu bantu lewat uang pribadi. Yang penting PMTAS bergulir dulu,” kata Renny.

Sepanjang Oktober, November, dan Desember, Renny mencoba membangun sistem PMTAS di sekolahnya. Satu bulan pertama justru Renny yang babak belur. Sangat sedikit orangtua murid yang mau membantu. Akibatnya Renny meminta bantuan suaminya.

“Wah sering begadang itu kami. Melotot mata,” kata Renny. Sore atau malam belanja, subuh mulai masak, lalu pukul 06.30, makanan sudah harus tiba di sekolah untuk di-



Salah satu menu makan PMTAS di SLBN 09 Jakarta.

bagikan ke para siswa. Begitu terus setiap hari. Ambyar.

Kadang kala Renny hampir menyerah. Berpikir akan melepaskan saja. *Toh* tidak banyak untungnya buat dia selain capek. Tapi ketika satu sisi hatinya tertutup, bagian lain di hatinya terbuka. Ia berpikir bahwa PMTAS sudah berjalan baik di sekolah lain. Orangtua murid jadi bahagia karena anaknya mendapat tambahan makanan bergizi. Anak juga jadi lebih sehat. Ibu-ibu juga jadi tidak perlu repot membuat sarapan untuk anaknya.

Renny juga melihat di sekolah lain ada banyak ibu jadi punya uang tambahan. Mereka ikut membantu mengurus tetek bengeknya PMTAS, dan keringatnya dihitung. Uang upah dibayarkan per bulan. Cukup menyenangkan. “Jadi saya pikir ini sistemnya saja yang belum jalan karena sekolah baru,” kata Renny.

Ia memilih melanjutkan. Perlahan satu sampai dua ibu mulai setuju bergabung. Bulan November 2019, tim PMTAS SLBN 09 mulai berbentuk. Renny sudah punya ibu-ibu yang mau pergi belanja ke pasar, memasak, dan beberapa warga sekitar yang mau membantu memotong-motong daging serta sayuran. Mereka memilih membantu karena kasihan melihat Renny kelabakan mengurus makanan untuk 211 siswa, setiap hari.

“Awalnya itu masakanya di rumah saya. Setelah mulai ada tim, sekolah kasih dapurnya untuk jadi tempat masak PMTAS,” ujar Renny. Kegiatan memasak jadi pindah ke sekolah.

Kegiatan memasak terus berjalan. Menu berganti setiap

hari. Mulai dari sup daging, nasi goreng, pisang, hingga susu. Ibu-ibu pemasak terus bertambah. Makin lama Renny bisa membagi tim untuk bekerja. Sehingga setiap hari ada pergantian tim, membuat pekerjaan lebih ringan. Tapi mereka yang ingin dapat penghasilan tambahan lebih banyak memilih membantu setiap hari.

Banyaknya menu makanan dan tim membuat kelucuan terjadi. Aneka menu kadang membuat dalam salah satu hari menu yang dibuat bisa sangat mudah, kadang sulit. Menjadi sulit ketika perlu banyak daging yang diolah, atau sayuran yang harus dirajang. “Nah biasanya kalau sudah menu-menu sulit begini ibu-ibu suka saling lempar,” kata Renny.

Menurut Renny, sepanjang Oktober sampai Desember 2019, PMTAS masih menggunakan dana talangan dari Bless-miyanda sehingga dana itu hanya cukup untuk memasak. Sedangkan tenaga yang bekerja diutang terlebih dulu. Tapi semua yang bekerja dicatat upahnya, dan akan dibayarkan sekaligus pada akhir tahun, saat uang PMTAS dari Disdik cair. Rata-rata memperoleh upah Rp40 ribu sampai Rp50 ribu sekali membantu masak. “Yah normal dong. Kan belum cair dananya karena belum punya RAB,” ujar Renny.

Tapi segalanya menjadi tidak menyenangkan pada akhir tahun 2019. Ibu-ibu komite menerima kabar bahwa dana PMTAS di sekolah lain sudah cair. Entah kabar itu didapat dari mana. Renny lalu dituduh menggelapkan dana, sebab sampai akhir tahun 2019, uang PMTAS SLBN 09 untuk membayar upah pekerja belum cair.



Para siswa SLBN 09 Jakarta menyantap menu makan PMTAS.

Tuduhan jadi makin kasar. Renny dituduh memakai uang PMTAS untuk dirinya sendiri. Bahkan tuduhan sampai dilontarkan di grup komite dan orangtua murid. Situasinya juga jadi rumit akibat kecurigaan itu. Ini menempatkan Renny dalam posisi sulit.

Anggaran dari Disdik sebenarnya bakal cair setelah Renny menyerahkan berita acara berisi berbagai kuitansi. Tapi ibu-ibu tak membolehkan Renny menyerahkan berita acara ke Disdik. “Ya jadi tidak akan cair-cair kalau begitu kan uangnya,” kata Renny. Dia jadi seperti tertuduh, dan seolah dibuat harus mengakui tuduhan itu.

Padahal tuduhannya benar-benar kacau. Renny bahkan sampai berkali-kali menangis. Dia juga nyaris melaporkan



para penuduhnya ke polisi. Tapi niat itu ia urungkan.

Masalah ya masalah. Renny harus memperbaiki namanya. Ia lalu menantang ibu-ibu untuk langsung datang saja ke Disdik. Tapi mereka tak acuh.

Renny lalu mencari jalan lain. Dia datang ke Kantor Wali-Kota Jakarta Utara. Di sana ia menemui pengawas SLBN 09, Siti Aisyah. Renny menceritakan keluh kesahnya. Pengawas lalu membantu Renny untuk mencairkan dana tersebut.

Setelah dana cair, ibu-ibu baru paham bahwa mereka salah. Sistem kadang tidak bisa berjalan seragam di semua sekolah. Apalagi bagi sekolah baru. Kesalahan ibu-ibu adalah membandingkan sistem di sekolah lain yang sudah lebih dulu berjalan sejak awal tahun 2019, dengan SLBN 9 yang baru berjalan mulai Oktober 2019.

Akhir Desember 2019 itu juga ibu-ibu mulai menerima upah. Mereka bahagia karena kerjanya dihitung. Renny dapat Rp1,5 juta karena memang paling banyak memasak. Ibu-ibu lain mendapat antara Rp200 ribu sampai Rp1 juta.

“Sekarang *sih* sudah semangat semua. Apalagi setelah ada RAB kan jadi makin jelas pengupahannya,” kata Renny. Tahun 2020, RAB SLBN 09 untuk PMTAS yang disetujui adalah Rp369 juta. Mereka yang membantu bulanan diupah tiap bulan.

Semuanya bisa berjalan berkat pengorbanan. Menggerakkan sistem baru bukan hal mudah. Butuh sosok-sosok yang berani berkorban dari sisi tenaga dan uang. Ya, Jakarta butuh itu agar bahagia warganya.



Jalan Terang UKM

HARYATI (50) MEMUTUSKAN MENDAFTAR E-ORDER PADA AGUSTUS 2019. ANAKNYA YANG MENGAJARKANNYA MEMBUAT *EMAIL*, MEMOTRET PRODUK MAKANANNYA, SAMPAI MENGURUS REKENING BANK DKI. BAHKAN SANG ANAK JUGA YANG MEMBANTUNYA MENGUNGGAHNYA DI LAMAN E-ORDER. DARI GANG SEMPIT, IA MEMBAWA KATERING RUMAHANNYA BERSAING DI E-ORDER.

“Bu Haryati ini bolak-balik ikut sosialisasi kami dari awal tahun 2019,” kata Andri Surya Achmadi, Kasubbid Sistem Informasi Pengadaan BPPBJ DKI. Haryati hanya menggarap kateringnya dengan dibantu anaknya sampai saat ia men-

daftar ke BPPBJ DKI, Agustus 2019.

E-order lalu mulai bergerak awal tahun 2020, hanya dua atau tiga bulan sebelum pandemi covid-19 datang. Selama dua bulan ikut e-order, Haryati mulai merasakan manisnya. Orderan datang sampai ia cukup kerepotan. Makanya sekitar Januari dan Februari 2020, Haryati sudah mampu membayar delapan tetangganya untuk membantunya menangani pesanan e-order.

“E-order ini seperti jalan terang bagi UKM. Selama ini UKM takut kerja dengan pemerintah. Takut diutang lama, takut diminta ini-itu, dan banyak stigma lainnya,” kata Ika Novi (35), pelaku UKM lainnya.

Ika Novi adalah lulusan Institut Pertanian Bogor. Selepas mendapat gelar sarjana pada tahun 2008, ia memilih bekerja di Bank DKI. Tahun 2014 dia mengajukan pengunduran diri, dan bekerja di Singapura.

Satu tahun di negeri orang, ia memilih kembali ke Indonesia. Dia lalu menajamkan kemampuannya memasak, hobi yang sudah lama ia jalani. Beberapa teman lalu tertarik dengan masakannya. Dari mulut ke mulut, lezatnya makanan Ika Novi tersebar.

Pesanan makanan mulai berdatangan tahun 2015. Awalnya dari tempat rekan-rekannya bekerja, lalu terus menyebar. Ia memilih bekerja sama dengan dua temannya. Model usahanya adalah katering tanpa membuka restoran. Ia hanya menerima pesanan dan mengantarnya. Kliennya rata-rata memesan makanannya untuk rapat, acara kecil,

sunatan, kawinan, dan lainnya.

Saat itulah Ika Novi merasakan rumitnya bekerja sama dengan pemerintah. Ia terpaksa harus membuat PT kecil untuk bisa menyebar portofolio cateringnya ke perusahaan BUMN.

“Beberapa tidak mau terima kalau UKM perorangan,” ujar Ika. Baginya, bekerja dengan pemerintah bukan hal mudah untuk UKM baru. Apalagi jika pemiliknya benar-benar awam dalam urusan dokumen. Dia beruntung cukup paham dengan itu. Tapi dia yakin banyak UKM terkendala hal tersebut.

Walau begitu, usaha Ika tetap berjalan. Ia menjalankan metode kemitraan dalam bisnis cateringnya. Dia mempekerjakan ibu-ibu yang memiliki kemampuan memasak spesialis. Misalnya khusus memasak rendang, masakan Manado, dan lainnya. Pesanan yang datang ke Ika akan dikerjakan oleh ibu-ibu tadi. Ika dan timnya lalu mengontrol *packaging*, tingkat higienis, dan pengantaran ke pemesan. Ibu-ibu mitranya rata-rata bekerja dari rumahnya masing-masing.

Sampai tahun 2019, Ika sudah memiliki tiga lokasi tim cateringnya. Pusatnya di Tangerang, lokasi kedua di Kemang Timur, Jakarta Selatan, dan satu lagi di Thamrin 10. Menu andalan catering milik Ika adalah nasi mandi. Rasanya lezat. Selain itu, ia juga terkenal dengan sederet menu Nusantara, seperti opor ayam, dan lainnya.

Sekitar Agustus 2019, Ika mendengar kabar dari kawannya soal e-order. Seorang kawan menanyakan ke dirinya soal kenapa tidak ikut e-order di Pemprov DKI Jakarta. “Memang bisa ya,” ujar Ika ke rekannya, waktu itu.

Ia lalu memilih mendaftar, dan terkejut dengan prosesnya yang begitu mudah. Dalam waktu satu bulan, cateringnya sudah tayang di e-order. “Orang BPPBJ melayani dengan baik. Merespons segala sesuatunya dengan cepat, dan aplikasinya juga benar-benar bagus. Petunjuk dari para pegawai BPPBJ benar-benar menuntun. Selain itu, kita sudah tidak perlu repot dengan blangko *invois* dan lainnya. Pembayaran pun cepat,” ujar Ika.

Ika tambah terkejut ketika melihat keringanan pajak. Pajaknya hanya 0,5 persen bagi pemegang surat keterangan UMKM dari Dinas Pajak. Padahal biasanya pajak untuk perusahaan itu sekitar 2 persen. “Saya buat lah langsung surat keterangan UMKM. Lebih ringan pajaknya,” ujar Ika.

Mulai Januari 2020, catering Ika mulai mendapat pesanan dari e-order. Salah satu pesanan bahkan cukup panjang, yakni untuk tiga bulan setiap hari Selasa dan Kamis. Setiap pekan sekitar 90 paket makanan. “Itu besar karena untuk tiga bulan,” kata Ika.

Tapi segalanya kini harus bersabar. Penyebabnya adalah pandemi covid-19 yang mulai merebak awal Maret 2020. Anggaran e-order hilang karena difokuskan untuk penanganan covid-19. Keputusan yang sangat wajar.

“Tapi program ini begitu bagus dan sangat menjawab kebutuhan UKM. Pelaku UKM Jakarta butuh program seperti ini. Bahagia pelaku UKM dikasih program ini. Mudah-mudahan e-order kembali bisa jalan pada tahun 2021,” kata Ika.





Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda menunjukkan penghargaan Indonesia Government Procurement Award dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Provinsi DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah dengan inovasi pengadaan yang mendukung transparansi belanja pengadaan.

m.bisnis.com

Anies Berjaya, DKI Raih Government Procurement Award dari LKPP RI

18 Nov 2020, 18:36 WIB - Oleh: Setyo Aji Harjan

f t w i n e

Twitter @D

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

kumparan

Berita Update

Pemprov DKI Raih Penghargaan dari LKPP RI

Konten ini diproduksi oleh Berita Update

Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta kembali menulangi prestasi ini. Anies Baswedan dan Pemprov D

Nasional

Anies: Jakarta Raih Penghargaan Dari LKPP RI

CNN Indonesia

Rabu, 18/11/2020 20:50

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (ANTARA FOTO/Sahid Mubarak AJ)

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta **Anies Baswedan** menyatakan Indonesia mendapat penghargaan pada Indonesia Government Procurement Award yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Instagram

aniesbaswedan · Follow

Boor, Indonesia

aniesbaswedan · Membesarkan yang kecil tanpa mengesalkan yang besar. Memastikan hadir kesetaraan kesempatan. Jangan sampai yang kecil tertinggal apalagi tergilas. Itulah semangat kami di Pemprov DKI. Itulah pilihan arah kebijakan DKI selama beberapa tahun ini. Dan Alhamdulillah ideologi itu dilaksanakan secara serius dengan teknologi dan teknokrasi.

148,718 likes

NOVEMBER 18

Log in to like or comment.

pikiran rakyat bekasi.com

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Kembali, Anies Baswedan Sampaikan Hal Ini

Bisri Givie Saputra

18 November 2020, 00:00 WIB

beritajakarta.id

BERANDA / PEMERINTAHAN

Pemerintah

DKI Raih Penghargaan, Anies: Inovasi Pemrov Dinilai Dukung Transparansi Belanja

Kompas.com

2020/11/18 10:00



Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Indonesia Government Procurement Award yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. (Tangkapan layar akun Instagram @aniesbaswedan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan Indonesia Government Procurement Award yang

Tulis komentar

merdeka.com

Pemprov DKI Raih Penghargaan dari LKPP, Anies Ajak Warga Jadi Mitra Pemerintah

Jakarta, 18 November 2020, 22:03

Reporter: Merdeka



Kabar Baik Indonesia! Diabetes Mudah Diobati dengan Lakukan Ini

JAKARTA | 18 November 2020 22:03

Reporter: Merdeka

Merdeka.com - Upaya Pemprov DKI melakukan inovasi untuk mendukung transparansi belanja pengadaan berbuah

POSKOTA

Hesperian / Jakarta

DKI Jakarta Raih Penghargaan Inovasi Pengadaan Transparansi Belanja

18 November 2020, 00:00



Anies Baswedan: Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta Kembali Raih Penghargaan

Ratu Amanda Distanis |

Rabu, 18 November 2020 18:37 WIB



Sukses Kembangkan UMKM Melalui E-Order, Pemprov DKI Raih Procurement Award 2020

REZKI APRILIYA ISKANDAR | BERITAJAKARTA.ID



BAB 4

LAYAK DAPAT BINTANG

Layak Dapat Bintang

WAKIL KETUA DPRD DKI JAKARTA,
MOHAMAD TAUFIK

Alat ukur kinerja BPPBJ hanya satu. Selamat atau tidak dari jeratan hukum. Itu ukuran paling dasar menilai kinerja BPPBJ. Instansi itu sudah melelang pekerjaan yang nilainya mencapai ratusan triliun sejak dipimpin Blessmiyanda. Sampai hari ini, di bawah kepemimpinannya, tak seorang pun pegawai BPPBJ masuk penjara. Tidak ada yang jadi tersangka, tidak ada yang jadi terdakwa, apalagi menjadi terpidana.

Itu artinya, kinerja BPPBJ DKI bagus. Bagus kinerjanya karena selamat. Bandingkan dengan proses tender di daerah lain yang tidak jarang menjerat orang BPPBJ di sana. Itu artinya, tidak selamat. Terjerat masalah. Kinerjanya kurang



atau tidak bagus.

Saya selalu melihat pejabat BPPBJ itu separuh badannya ada di luar, separuh lagi ada di dalam penjara. Dia berisiko tinggi menghadapi tuduhan pidana. Salah melangkah sedikit saja, atau salah menafsir aturan main serta SOP, bisa masuk penjara.

Tapi lihat Blessmiyanda. Dia mampu menggerakkan instansi itu dengan tepat. Institusi itu memang tergantung siapa yang mengendarainya. Saya menilai Blessmiyanda sudah sangat baik memimpin BPPBJ.

Blessmiyanda itu orangnya lurus dan tegas. Dia setia pada aturan dasar tender. Pemahamannya terhadap aturan pengadaan juga dalam. Dia sering kami panggil untuk menjelaskan masalah tender. Perdebatan selalu terjadi, dan saya selalu berhadapan dengan Blessmiyanda. Tapi, dia dengan tenang dan jernih berhasil menjelaskan dan meyakinkan saya.

Apa yang ia sampaikan selalu berlandaskan aturan main yang ada. Lalu mau melawan dia dengan apa? Tidak ada lagi yang bisa melawan dia, apalagi menjebloskan dia ke penjara. Kalangan anggota dewan cepat paham mengenai suatu masalah di BPPBJ setelah Blessmiyanda menjelaskan panjang lebar duduk perkaranya. Dengan penjelasan Blessmiyanda, semua jadi terang benderang.

Satu yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika Blessmiyanda membatalkan satu tender karena dua perusahaan yang bersaing ternyata memiliki pemegang saham yang

sama. Bagi saya itu bentuk ketegasan dan pemahaman aturan yang luar biasa. Banyak orang tidak paham hal-hal seperti itu.

DPRD juga pernah kecele ketika hendak memperkarakan Bless. Peristiwanya terjadi tahun 2015. Ketika itu Blessmiyanda baru menjabat Kepala BPPBJ. DPRD memanggilnya lantaran ada kasus proyek mangkrak. Pembangunan RS Koja. Penyebabnya, proses pembangunan terhenti karena kontraktornya kabur.

Blessmiyanda kami panggil. Dia lalu menjelaskan bahwa masalah itu muncul di masa kepala BPPBJ sebelumnya. Dewan pun kecele.

Saya mengapresiasi kinerja Blessmiyanda. Apabila saya mempunyai kewenangan memberikan penghargaan, Blessmiyanda pasti saya beri “bintang”.



Kelinci Percobaan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (2015 - 2017)

AGUS PRABOWO

BPPBJ DKI adalah kelinci percobaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Idenya muncul karena kemarahan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok antara akhir tahun 2013 sampai awal tahun 2014.

Saya ingat betul Pak Ahok marah akibat lelang Transjakarta tahun 2013. Ia menilai lelang tersebut gagal. Pemenangnya dianggap tidak berkualitas. Bagi Ahok, Jakarta sanggup membeli bus-bus berkualitas seperti Mercy, Hino, Volvo, Scania, dan lainnya. Tapi bus-bus yang dibawa pemenang lelang Transjakarta justru bus pabrikan asal China. Tak seperti yang diharapkan Ahok. Peristiwa ini membuat Pak Ahok memilih berhubungan dengan LKPP. Saat itu saya masih menjabat



Deputi Kelembagaan, makanya ditugaskan menemui Pak Ahok.

Beliau datang ke kami dengan kondisi menghujat lelang. Wajar saja, dia sedang kecewa dengan hasil lelang bus Transjakarta. Dalam sebuah rapat, Ahok menyebut bahwa sudah capek-capek lelang, hasilnya dapat barang jelek.

Saat itu kami menawarkan solusi terbaik bagi Pemprov DKI menyangkut Transjakarta. Jawabannya adalah bus Transjakarta harus masuk e-katalog nasional. Ahok setuju. Tapi bukan cuma ide itu yang 'dibeli' Ahok. Dia juga 'membeli' ide reformasi pengadaan dari LKPP.

Dalam sebuah rapat, saya memaparkan bahwa terdapat empat pilar dalam reformasi pengadaan. *Pertama*, mesti ada regulasi yang modern. Sifat regulasinya jika dilaksanakan akan menciptakan *self control*, tidak ada *conflick of interest*, *delegation of authority*, lalu *check and balance*. Intinya adalah organisasi dengan regulasi yang modern.

Pilar *kedua*, sumber daya manusianya. SDM-nya harus bersertifikat dan dilembagakan. Pilar *ketiga*, menggunakan teknologi paling maju, yakni teknologi informasi. Produknya seperti e-katalog, e-tendering, dan lainnya. Pilar *keempat* adalah integritas untuk mengurangi korupsi.

Pak Ahok tertarik dengan gagasan itu. Dia tertarik karena APBD Jakarta paling besar di Indonesia sehingga harus ada pengadaan yang modern. Dengan 'membeli' ide itu, artinya Pemprov DKI Jakarta resmi menjadi kelinci percobaan LKPP. Kami juga butuh kelinci percobaan karena badan lelang tersendiri itu organisasi baru.

Sejak itu berdirilah ULP di Jakarta, lalu berganti nama jadi BPPBJ. E-katalog bus Transjakarta juga tercipta lewat tangan orang-orang ULP. Salah satu bentuk kolaborasi antara LKPP dan Pemprov DKI lewat ULP.

Pada akhirnya saya menilai BPPBJ DKI adalah kelinci percobaan yang sukses. Dianggap sukses karena BPPBJ DKI bisa mengartikulasikan seluruh gagasan LKPP. E-katalog berjalan beserta berbagai program perubahan lainnya. Dari sederet kelinci percobaan LKPP, saya menilai hanya ada 4 yang sukses. Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Badung di Provinsi Bali.

Pertanyaan berikutnya, kenapa BPPBJ DKI bisa sukses? Menurut saya ada beberapa faktor kesuksesan. Paling pertama adalah *political will*. Ya, karena gubernurnya punya pandangan maju. Punya niat reformasi, dan dia pasang badan.

Faktor kedua ada pelaksananya, ada pasukannya. Salah satunya pasukannya itu ya Blessmiyanda. Kemampuannya bagus itu. Faktor ketiga itu ada partnernya, yaitu LKPP.

Faktor keempat adalah ada yang membiayai. Kita dapat biaya proyek dari Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI). Dengan dana MCAI, staf LKPP banyak pergi ke luar negeri. Mereka punya kesempatan lihat model pengadaan di Korea, Skotlandia, dan negara lainnya. Setelah pulang, orangnya kami tempatkan di BPPBJ DKI Jakarta sebagai percobaan. Ya, itulah kesan saya terhadap BPPBJ DKI. Tak boleh dilupakan bahwa ada peran Pak Ahok di sana.





Pandangan yang Membaik

**SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA
SUSIE NURHATI**

Pandangan saya terhadap Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta membaik, seiring waktu. Begitu juga terhadap Blessmiyanda. Dia adalah Kepala BPPBJ terlama sepanjang instansi itu berdiri. Proses perubahan di tubuh BPPBJ di era kepemimpinannya tergolong lama. Tapi saya sudah mengamati dan melihat sendiri proses perubahan tersebut.

Tahun 2014 terjadi satu peristiwa yang membuat saya berprasangka buruk terhadap ULP (Unit Layanan Pengadaan). Ketika itu saya masih bekerja di Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Saat itu ada tender proyek pembangunan salah satu teater di Taman Ismail Marzuki. Nilai proyeknya sekitar

Rp40 miliar.

Proses lelangnya luar biasa berat. Adhi Karya jadi pemenang. Tapi masalah muncul setelah proyek rampung. Dinas Pariwisata diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dokumen yang kami bawa ke BPK dinilai kurang lengkap. BPK tidak tahu bahwa sebagian dokumen lainnya sudah disampaikan ke ULP.

Saya lalu datang ke ULP bersama Riza Manfaluthi, meminta ULP menyerahkan berkas tersebut. Proses berikutnya tidak sederhana. Kesimpulan saya, ULP berbelit-belit. Petugas di ULP tidak mau menyerahkan berkas itu dengan sederet alasan yang sebenarnya bukan kesalahan Dinas Pariwisata.

Setelah bolak-balik bersurat, ULP akhirnya melepas berkas itu. Sejak peristiwa itu, saya jadi skeptis terhadap ULP atau BPPBJ. Saya menganggap BPPBJ begitu berkuasa, berbahaya, dan mengerikan.

KASUS UPS

Tahun 2015 saya dipindah ke Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Kala itu kasus UPS (*uninterruptible power supply*) sedang memanas. Sebagai Kasubbag Tata Usaha Bidang P60 (P60 adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan perencanaan, dan pengendalian pendanaan pendidikan), tugas saya sebenarnya jauh dari hubungan dengan BPPBJ DKI. Seharusnya saya lebih banyak mengurus KJP (Kartu Jakarta Pintar). Tapi Kepala Disdik Arie

Budiman memberi tugas sampingan.

Tugas sampingan itu membuat saya harus ikut campur dengan bermacam hal. Salah satu di antaranya soal UPS. Kasus dugaan korupsi UPS membuat Disdik dikawal tim gubernur. Ada tiga personel tim gubernur yang selalu berkoordinasi terhadap berbagai hal menyangkut kasus UPS. Mereka biasanya bertanya ke Kepala Disdik. Tapi Kepala Disdik meminta saya yang menjelaskan.

Pertanyaan yang muncul biasanya seputar 'Siapa orang ini'. Mereka seperti hendak melacak dan mem-*profile* seseorang. Sejak itu saya sadar, sebagian orang BPPBJ DKI dulu adalah orang Disdik. Mereka menempati posisi-posisi strategis di pokja-pokja BPPBJ. Dari situ saya kian berburuk sangka terhadap BPPBJ.

PEMENANG LELANG MENCURIGAKAN

Tahun 2016 saya diangkat menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan DKI. Rekan saya, Riza Manfaluthi diangkat menjadi Kabid Prasarana dan Sarana. Kepala Disdik lagi-lagi memberi saya tugas tambahan, membantu Riza, terutama untuk berkomunikasi dengan instansi lain. Riza orang yang tegas, cekatan, dan lugas. Tapi dia kerap bermasalah saat berkomunikasi. Saya mengisi ruang kosong itu.

Sejak itu saya semakin sering bersentuhan dengan BPPBJ. Riza sering bolak-balik karena urusan dokumen. Dia dianggap tidak mengerjakan dokumen dengan benar. Banyak kurangnya. Tapi Riza mengaku bahwa apa yang di-

perintahkan sudah ia kerjakan. Riza menuding staf-staf di BPPBJ yang mengada-ada.

Blessmiyanda menanggapi masalah ini dengan sering berkunjung ke Disdik. Dia mengajari kami menangani dokumen-dokumen. Kadang kami yang datang ke BPPBJ untuk belajar. Tapi saya sudah telanjur kesal. Saya pikir, itu cuma omong kosong. Kami cuma dipermainkan staf-staf BPPBJ saja.

Berikutnya, satu lelang proyek saya anggap aneh karena dimenangi perusahaan yang saya ragukan. Pemenang lelang itu kami tolak. Blessmiyanda menjelaskan panjang lebar. Dia minta kami tidak menolak begitu saja tanpa penjelasan yang masuk akal. Kesan saya, Blessmiyanda hanya membela anak buahnya. Saya sudah telanjur tidak percaya pada BPPBJ.

PROYEK REHAB TOTAL SEKOLAH

Tahun 2016, pandangan saya terhadap BPPBJ mulai berubah. Satu waktu terjadi proses lelang proyek rehab total sekolah. Satu perusahaan swasta menjadi pemenang lelang. Tiba-tiba kepala Disdik dikejar-kejar membuat penetapan.

Saya kemudian memeriksa kantor pemenang tender, sesuai hasil rapat. Perusahaan itu berkantor di salah satu gedung di Sudirman. Lokasinya di *basement* paling bawah, persis di sebelah loker sekuriti. Saat saya datang, kantor kosong. Ini membuat saya tidak yakin terhadap kemampuan si pemenang tender ini.

Hari itu juga saya menghubungi Blessmiyanda. Saya protes lantaran pemenang tendernya perusahaan dengan kantor tidak jelas. Dia meminta saya langsung datang ke kantornya. Di sana dia menyarankan saya agar mengevaluasi ulang keraguan saya terhadap si pemenang tender ini. Ia mengingatkan, pembatalan pemenang tender, butuh waktu lama.

Tak dinyana, setelah evaluasi dilakukan, si pemenang tender dibatalkan oleh BPPBJ. Pemenang baru terpilih, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Adhi Karya. Yess. Saya cocok. Kantornya jelas, pengalamannya pun sudah banyak. Sejak itu pandangan saya terhadap BPPBJ sedikit berubah. Begitu juga penilaian saya terhadap Blessmiyanda. Masih ada integritas di sana.

Tapi ternyata, buruk sangka saya terhadap BPPBJ kembali tumbuh. Peristiwa lain terjadi tahun 2017. BPPBJ sedang melakukan percepatan lelang.

Di tengah masa itu, satu perusahaan memenangi lelang rehab total sekolah. Saya curiga dengan pengalaman kontraktor pemenang lelang proyek yang membangun sekolah delapan lantai di Bali ini. Setelah saya periksa silang, ternyata proyeknya di Bali bermasalah. Lalu saya temukan ada pemalsuan dokumen di salah satu faktur pajaknya.

Dari situ saya makin curiga dengan BPPBJ DKI dan Blessmiyanda. Kok bisa ya dia dibohongi anak buahnya? Jangan-jangan ada kerja sama, ada persekongkolan. Tahu sama tahu. Tidak mungkin tidak, karena dalam pandangan

saya, dia selalu membela anak buahnya. Kecurigaan saya seolah tergenapi ketika Blessmiyanda dicopot tahun 2017.

TIDAK LEBIH BAIK

Tapi sesudah Pak Blessmiyanda dicopot, saya menilai BPPBJ justru tidak berjalan ke arah yang lebih baik. Saya makin kesal saat berhubungan dengan BPPBJ. Bagi saya BPPBJ jadi lebih kacau, lebih ribet, lebih menyusahkan.

Sejak itu saya memilih lebih sering berbicara dengan Pak Blessmiyanda, terutama menyangkut tender mebel. Dia memberi saran, membimbing, dan memberi ilmu tentang pengadaan barang dan jasa kepada saya. Pesan *Whatsapp*-nya selalu detail. Bahkan dia rela menangkap layar aturan, dan mengirimkan ke saya dalam bentuk foto *Whatsapp* yang sudah dicoret-coret. Diberi penjelasan detail.

Setelah lebih banyak bicara, dan mengenal dia, ternyata Pak Blessmiyanda jauh dari yang saya duga. Sikapnya sederhana. Rumahnya di Tanjung Priok tidak besar. Seharusnya dia bisa lebih dari itu. Dia bisa beli apa saja jika mau memanfaatkan jabatannya. Tapi ternyata dia tidak melakukan itu.

Saya kemudian sadar, Pak Blessmiyanda dimanfaatkan pegawai BPPBJ dengan “menjual” namanya. Makanya saya senang ketika dia kembali menjabat Kepala BPPBJ. Sepengamatan saya, belum ada sosok lain yang bisa menahkodai BPPBJ dengan tepat selain Pak Blessmiyanda.

Dengan serangkaian kejadian yang saya alami, saya

menyarankan agar pegawai BPPBJ didampingi psikolog. Mereka sebaiknya melakukan tes rutin tiga bulan sekali untuk memeriksa kadar integritasnya. Keberadaan pegawai BPPBJ yang berintegritas sangat penting. Sebab, instansi ini menjadi “palang pintu” gubernur.





Jadi Lebih Kompetitif

**MANAJER WILAYAH DKI JAKARTA
PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA
EDWIN SITANGGANG**

Saya mendapat promosi menjadi Manajer Wilayah DKI Jakarta PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama tahun 2013. Tahun 2014 saya lekas bersentuhan dengan Unit Layanan Pengadaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (ULP BPKAD) Pemprov DKI. ULP adalah cikal bakal BPPBJ.

Sampai tahun 2020 saya masih berada di jabatan yang sama. Tahun tersebut menjadi tahun keenam saya bersentuhan dengan BPPBJ. Institusi ini sudah jauh berkembang.

Perubahan awal BPPBJ mulai terasa di tahun 2016. BPPBJ menuntut penyedia membuat dokumen penawaran yang lebih kompetitif. Di era ULP, saya merasa dokumen

hanya sekadar ada saja. Untuk menjadi pemenang tender proyek, yang terpenting adalah menetapkan harga terendah dibanding pesaing lainnya.

PASSING GRADE

Sejak tahun 2016, penetapan pemenang dilakukan setelah melalui penilaian bermacam aspek yang lebih kompleks. BPPBJ menetapkan sistem *passing grade*. Sistem ini membuat penawar terendah belum tentu menang jika dokumennya tidak kompetitif. Sosialiasi perubahan ini seingat saya dilakukan sejak pertengahan tahun 2015.

Awalnya saya kalang kabut dengan sistem ini. Perlu adaptasi dan bimbingan. Dalam proses itulah saya melihat integritas Pak Blessmiyanda.

Jangan coba-coba minta proyek kepada beliau. Beliau bukan tipikal pejabat *doyan* ikut campur. Saya pernah mencoba meminta proyek. Tapi dia jawab pendek, “Kalau mau menang, ya bikin dokumen yang baik”.

Saya akhirnya berkonsultasi dengan Pak Blessmiyanda. Jika tender bulan Januari, maka Agustus tahun sebelumnya saya sudah berkonsultasi dengannya. Cara ini lebih jujur dan adil. Pak Blessmiyanda telah memberi ilmu kepada saya.

Tahun 2017, BPPBJ semakin berkembang. Kami, para penyedia, diperkenalkan dengan sistem nilai. Lebih ekstrem dan rumit. Para penyedia dituntut dapat membaca makna TOR (*term of reference*) dan dokumen tender. Dengan demikian penyedia atau peserta lelang proyek menjadi lebih

kompetitif.

Jika ingin menang, penyedia harus dapat memberikan dokumen lebih lengkap lagi. Dokumen itu harus jelas dalam kalkulasi, simulasi, dan kekuatan atau kemampuan, atau bonafiditas penyedia. Saya banyak belajar dari Pak Blessmiyanda menyangkut hal ini.

DAYA SAING KIAN MENGUAT

Meningkatkan taraf kompetisi dalam tender di Jakarta membuat PT Jakon (Jaya Konstruksi) berbenah, antara lain, memperbaiki kemampuan membuat dokumen. Pak Blessmiyanda banyak memberi bimbingan mengenai hal ini. Kami seperti sekolah.

Efek selanjutnya sangat positif bagi PT Jakon. Tadinya PT Jakon itu pendapatannya 40 persen dari proyek di DKI Jakarta, 30 persen dari proyek di Kementerian PUPR, 15 persen dari *inhouse* Jaya Group, dan 15 persen sisanya dari swasta. Tapi seiring perbaikan kemampuan akibat tender di Jakarta makin ketat, PT Jakon jadi semakin mampu bersaing dalam tender-tender di luar Jakarta.

Hal ini akhirnya mengubah target komposisi penghasilan PT Jakon. Saat ini komposisi penghasilan PT Jakon 40 persen dari proyek di Jakarta, 40 persen dari proyek di Kementerian PUPR, 10 persen di proyek *inhouse* Jaya Group, dan 10 persen dari tender internasional maupun swasta. Ini kemajuan bagi PT Jakon.





Inisiatif Sinergitas BPPBJ

KEPALA BANK DKI JAKARTA CABANG BALAI KOTA
BAMBANG NURCAHYO

BPPBJ DKI memiliki konsep jelas untuk mengaktifkan sinergitas dengan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Penerjemahannya ke produk juga sangat transparan. Iklim BPPBJ DKI lima tahun belakangan, bagus bagi Bank DKI.

Saya mulai bersentuhan dengan BPPBJ sekitar pertengahan tahun 2015. Ketika itu saya masih bekerja di Divisi Komersial Bank DKI Pusat. Tugasnya mencari kreditur dari para pemenang tender di Jakarta.

Suatu saat saya harus menghadap Pak Blessmiyanda. Dia lekas mengejek saya lantaran tahu Bank DKI kerap mencari kreditur dari luar Jakarta. “*Ngapain* lari-lari sampai ke Kalimantan kalau akhirnya proyek macet. Mending di Jakarta

saja. Ada banyak proyek di Jakarta. Proyek di sini triliunan,” ujar Pak Blessmiyanda. Saya tertawa kecil mendengar sin-dirannya.

TAK AKAN BERPALING

Sejak awal pertemuan, Pak Blessmiyanda menegaskan, BPPBJ tidak akan berpaling dari Bank DKI. Bahkan dia memastikan tidak akan merekomendasikan bank lain. Tapi Bank DKI harus berbenah. Membuat produk-produk baru yang mendukung BPPBJ dan Pemprov DKI.

Mulai tahun 2016 kerja sama dimulai. BPPBJ meminta Bank DKI menerbitkan surat dukungan keuangan bank. Fungsinya menilai sebuah perusahaan bonafid atau tidak. Ini memudahkan BPPBJ untuk menilai sebuah perusahaan yang mengikuti tender.

Kerja sama ini mati suri ketika Pak Blessmiyanda dicopot pada akhir 2017. Pembicaraan antara BPPBJ dan Bank DKI menyangkut rencana-rencana sinergi, terhambat. Salah satu di antaranya gagasan memutar uang Pemprov DKI hanya di Jakarta. Tidak ke luar instansi lain di luar Jakarta.

Konsep ini menarik karena Bank DKI menjadi unsur pentingnya. Tapi sayang, pembahasannya terhenti. Kami sempat kehilangan kontak dengan BPPBJ. Komunikasi dengan Kepala BPPBJ yang baru kurang lancar dibanding berkomunikasi dengan Pak Blessmiyanda.

Saya merasa beruntung setelah Pak Blessmiyanda diangkat kembali menjadi Kepala BPPBJ setelah sembilan

bulan beliau dicopot. Komunikasi di antara kami kembali terjalin. Kerja sama pun berlanjut.

BANK GUARANTEED

Setelah Pak Blessmiyanda menjabat lagi, kami kembali tenggelam dalam kesibukan bersama BPPBJ. Tahun 2018 kami kerepotan melayani permintaan *bank guaranteed* para pemenang tender di Jakarta. Penyebabnya, Pak Blessmiyanda meminta kami membuka *booth* di lantai 19 dan lantai 20 kantor BPPBJ.

Para pemenang tender disarankan membuka rekening Bank DKI. Tujuannya agar memudahkan transaksi keuangan antara Pemprov DKI dan penyedia. Hal ini membuat sebagian besar kalangan penyedia kemudian mengajukan pinjaman ke Bank DKI.

Selama kepemimpinan Pak Blessmiyanda, nyaris tidak ada proyek mangkrak di Jakarta. Pembayaran utang pun lancar. Selalu tepat waktu. Sepengamatan kami, Bank DKI, tender di Jakarta sangat sehat.

HANYA BERPUTAR DI JAKARTA

Tak berapa lama saya ditunjuk menjadi Kepala Cabang Bank DKI Balai Kota pada November 2019. Ketika saya pindah, ide memutar uang milik Pemprov DKI yang hanya berputar di Jakarta mulai bergulir kembali. Pak Blessmiyanda mengarahkan konsep *e-order*.

Ide tersebut sangat mendukung UMKM (usaha mikro,

kecil, dan menengah). Konsepnya membuat aplikasi bagi UMKM. Di aplikasi itu UMKM makanan, minuman, alat tulis, dan sebagainya memasang produk mereka. Bentuknya seperti toko *online*. Setiap SKPD wajib membeli kebutuhannya dari e-order sesuai anggaran.

Ide ini sangat menguntungkan Bank DKI. Proses transaksi akan selalu melewati Bank DKI. Dengan begitu tidak ada uang bocor ke luar Jakarta. Bahkan Bank DKI berkesempatan membiayai para pelaku UMKM di Jakarta. Bunga akan masuk ke Bank DKI. Tapi lagi-lagi konsep bagus ini tertahan karena pandemi covid-19. Kami berencana, tahun 2021 *e-order* bisa mulai dijalankan.

Kami akui, kerja sama Bank DKI dengan BPPBJ membuat Bank DKI semakin inovatif dan semakin beruntung.



Konsolidasi dan Mitigasi Resiko

KEPALA RSUD TARAKAN
DIAN EKOWATI

Bekerja di sektor pengadaan tidak bisa hanya sekadar mempunyai kemauan dan komitmen, tapi harus memiliki integritas, dan mau menyisihkan lebih banyak waktu pada pekerjaan ini. Itulah pendapat saya yang pernah bekerja di BPPBJ.

Saya ditunjuk menjabat Sekretaris BPPBJ tahun 2016. Ketika itu Pak Blessmiyanda menjadi Kepala BPPBJ. Setelah pindah dari BPPBJ, saya baru menyadari bagaimana institusi ini mengubah pola pengadaan menjadi lebih baik.

Keterbatasan personel kala itu membuat Pak Blessmiyanda berinovasi. Ia melakukan efisiensi anggaran, harga, waktu, maupun tenaga. Caranya, mengonsolidasi paket se-



jenis yang tersebar di berbagai SKPD di Pemprov DKI.

Ini harus dilakukan karena di satu sisi personel sedikit, sementara di sisi lain paket tender yang harus ditangani sangat banyak. Tanpa langkah konsolidasi, mustahil jajaran BPPBJ mampu menyelesaikan tugas-tugasnya.

LEARNING BY DOING

Salah satu contoh di antaranya soal pengadaan obat di rumah sakit. Saat itu DKI Jakarta memiliki tujuh rumah sakit besar dan 44 rumah sakit kecamatan. Jika masing-masing mengajukan tender obat, akan ada 51 pokja yang menangani tendernya.

Artinya, akan ada 2.000-an hari untuk melaksanakan tender tersebut. Padahal satu tahun hanya ada 360 hari. Lalu bagaimana BPPBJ menyelesaikan seluruh tender dalam waktu setahun jika situasinya seperti ini? Tapi dengan adanya konsolidasi, dengan seluruh tender obat dijadikan satu, waktu tender hanya butuh 40 hari.

Ini merupakan hal baru yang belum pernah dilakukan pegawai Pemprov DKI bahwa semua pekerjaan melalui proses *learning by doing*. Dalam proses kerja, kesalahan diperbaiki tanpa mengganggu penyelesaian pekerjaan.

Saat hal ini berlangsung, hampir seluruh waktu pegawai BPPBJ tersita di kantor. Saya kemudian mengambil kesimpulan, bekerja di BPPBJ butuh kerelaan melepas waktu istirahat saat jam kerja. Pengaturan jadwal waktu itu benar-benar padat dan rumit.

RISIKO TENDER

Beruntung BPPBJ dipimpin oleh Pak Blessmiyanda. Dia berpikir maju dan inovatif. Salah satu yang tidak disangka adalah caranya mengelola risiko tender. Ini yang tidak pernah ada di ULP, cikal bakal BPPBJ.

Di era ULP, tahun 2014, SKPD tidak tahu kapan tender selesai. Ini menakutkan bagi beberapa SKPD yang melayani masyarakat seperti rumah sakit. Sebab, rumah sakit harus memiliki kepastian soal ketersediaan obat.

Memasuki era BPPBJ tahun 2016 semuanya berubah setahap demi setahap. Pada awalnya BPPBJ tidak memiliki standar dalam manajemen risiko. Pak Blessmiyanda lah yang kemudian meletakkan dasar-dasar manajemen risiko yang kemudian diterapkan dalam sistem kerja BPPBJ.

Dalam tender obat, manajemen risiko dibuat dengan beberapa langkah sederhana. Pertama, tender obat harus dimulai antara bulan Januari atau Februari. Hal itu karena ketersediaan obat di rumah sakit harus sudah mulai masuk pada bulan April. Dengan demikian, setidaknya pada bulan Maret sudah harus ada pemenang tender untuk setiap obat yang ada di rencana kebutuhan obat rumah sakit.

Apabila sampai bulan Maret tidak ada pemenang karena kendala dalam proses tender, maka BPPBJ harus melakukan langkah transparansi. Pokja BPPBJ harus menghubungi rumah sakit dan memberitahukan hal tersebut. Tujuan pemberitahuan agar rumah sakit bisa mencari solusi untuk penyediaan obat.

Di tahun 2014, prosesnya tidak seperti itu. Kita tidak tahu kapan lelang rampung. Tidak ada komunikasi yang jelas antara ULP dan SKPD terkait tender pada tahun 2014.

MUDAH BERBAGI ILMU

Dari sisi personal, Pak Blessmiyanda adalah orang yang terbuka dan murah hati berbagi ilmu. Mungkin karena itulah nada suaranya kadang menjadi tinggi ketika anak buahnya gagal menangkap apa yang ia ajarkan.

Saya menganggap ini hal biasa. Sebab, Pak Blessmiyanda mengukur keberhasilan dari aspek *output*-nya. Nada tinggi suaranya menunjukkan bahwa ia ingin BPPBJ meraih prestasi dan kinerja maksimal.





Bantuan Penting BPPBJ

**DIREKTUR UTAMA PT JAKARTA TOURISINDO
NOVITA DEWI**

Pak Bless, begitu kami memanggilnya. Nama lengkapnya Blessmiyanda, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. Menjalankan amanah sebagai Kepala BPPBJ tentu saja tanggung jawab yang diembannya sangat berat. Betapa tidak, belanja pengadaan yang dikelola BPPBJ dalam satu tahun nilainya bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan. Program-program unggulan DKI Jakarta akan menjadi mungkin terlaksana dengan adanya BPPBJ.

Walau begitu, Pak Bless yang saya kenal adalah orang yang sangat baik hati. Orang yang dengan senang hati memberikan bantuan. Saat mengetahui PT Jakarta Tourisindo

(Jaktour) yang saat ini saya pimpin akan mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) untuk merenovasi salah satu unit hotel yang kami miliki, Pak Bless langsung memberikan bantuannya. Pak Bless mengirimkan tiga orang terbaiknya dari BPPBJ untuk memberikan pendampingan serta bantuan teknis dalam pengadaan renovasi hotel tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Pak Bless juga secara rutin meminta laporan langsung dari tim pengadaan Jaktour dan pendamping dari BPPBJ.

Pendampingan dan supervisi secara langsung yang diberikan oleh Pak Bless, yang merupakan *procurement specialist*, memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi Jaktour. Dari pendampingan tersebut, Jaktour secara bertahap dapat melakukan penataan pengelolaan pengadaannya. Pembaruan prosedur operasional standar (SOP) pengadaan barang/Jasa perusahaan dilakukan agar proses pengadaan benar-benar memberikan *value for money* yang optimal. Dalam dunia bisnis, pengadaan yang efektif dan efisien tentu saja sangat penting dalam strategi bisnis sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk ini kami sangat berterima kasih kepada Pak Bless....

PAK BLESS YANG BERPIHAK PADA UMKM

Satu hal yang paling saya kagumi dari Pak Bless adalah komitmennya pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut dilihat dari inisiatifnya

membuat aplikasi e-order. Persoalan yang selalu dialami oleh UMKM adalah pemasaran. Banyak UMKM yang memiliki produk yang sangat baik, tetapi karena pemasaran yang tidak optimal, akibatnya usaha tidak bisa berkembang.

Pemerintah sendiri memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi sebab belanja yang dilakukan pemerintah sangat besar. Namun, sayangnya tidak banyak belanja pemerintah dalam proses pengadaan yang dapat diakses oleh UMKM. Dengan aplikasi e-order, BPPBJ DKI Jakarta melakukan terobosan. Melalui aplikasi ini, para pelaku UMKM dapat mengikuti kegiatan pengadaan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Melalui aplikasi E-Order, para pelaku UMKM dapat mengikuti proses pengadaan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pelaku UMKM bisa berhubungan langsung dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam pengadaan barang dan jasa yang nilainya di bawah Rp50 juta, terutama untuk pengadaan makan dan minum di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Apa yang dilakukan BPPBJ ini tentu sangat bermanfaat untuk kemajuan UMKM. Apalagi pemerintahan Gubernur Anies Baswedan sangat berpihak pada peningkatan usaha kecil, yang terlihat dari program Jakpreneur. E-Order bukan hanya menjadi semacam aplikasi *marketplace*, tetapi juga menjadi bagian kolaborasi pengembangan kewirausahaan DKI Jakarta. Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya dapat dinikmati oleh pelaku usaha besar, tetapi juga UMKM.





Semangat Transparan BPPBJ

ANGGOTA DPRD DKI
WA ODE HERLINA

Pak Blessmiyanda, saya sudah mengenal beliau jauh sebelum menjadi anggota DPRD. Beliau tegas, loyal pada pimpinan, dan baik terhadap teman.

Setelah menjabat Kepala BPPBJ, dan saya menjadi anggota dewan, tidak ada yang berubah dari sikap beliau. Loyal pada pimpinan, tapi tegas dalam aturan.

Saya melihat semua proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov DKI dijalankan dengan semangat transparan dan akuntabilitas yang tinggi sesuai aturan.

Hal itu terbukti beberapa tahun menjadi kepala BPPBJ yang mempunyai APBD sangat besar, tidak pernah menyalahi aturan dan bersentuhan dengan hukum.





BAB 5

RIWAYAT KARIER KEPALA BPPBJ



Masa Jabatan dan Profil

SELAMA ENAM TAHUN BERDIRI, TERCATAT SUDAH ADA EMPAT KEPALA BPPBJ DKI. SATU DI ANTARANYA MENJABAT SAAT MASIH BERBENTUK ULP, SISANYA KETIKA SUDAH MENJADI BADAN.

MASA JABATAN KEPALA BPPBJ		
NO	NAMA	MASA JABATAN
1	I Dewa gede Soni Aryawan	21 Maret 2014 – 2 Januari 2015
2	Irvan Amtha	22 Januari 2015 – 7 Agustus 2015
3	Blessmiyanda	7 Agustus 2015 – 13 Juli 2017
4	Indrastuty Rosari Okita	13 Juli 2017 – 8 Juni 2018
5	Blessmiyanda	25 September 2018 - sekarang



I DEWA GEDE SONI ARYAWAN, M.Sc.

Panggilan akrabnya adalah Soni. Ia lahir di Samsam pada 6 April 1970. Kini ia memiliki satu anak dari perkawinannya dengan Ni Made Sumaeni.

Soni menamatkan S1 Ahli Telekomunikasi di The University of New South Wales, Australia, pada tahun 2000.

Karier jabatan strukturalnya sebagai PNS dimulai pada 1 Januari 2001 ketika ia menjadi staf dengan pangkat penata muda di Kanwil Departemen Perhubungan.

Soni lalu meneruskan kariernya di Pemprov DKI Jakarta. Dia mengikuti diklat provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2002. Setelah itu ditempatkan di Dinas Perhubungan. Pada tahun 2004, Soni dipercayai menjabat Kepala Seksi Rambu dan Marka Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Kariernya kembali menanjak setelah mengikuti Diklatpim Tk IV pada bulan Oktober 2005. Ia dipercaya menjabat Kepala Seksi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, kemudian diserahi jabatan Kepala Bagian Prasarana Kota Biro Administrasi Prasarana Perkotaan pada September 2008.

Dua tahun menjabat Kabag, Soni diangkat menjadi Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas pada Februari 2011. Dua tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah. SK-nya tertanggal 20 Maret 2014. Ia menjabat sampai 2 Januari 2015.

Setelah itu, Soni bertugas menjadi staf teknik tingkat ahli di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tujuh bulan kemudian ia diberikan jabatan staf teknis tingkat ahli Badan Pendidikan dan Pelatihan.





Ir. Drs. IRVAN AMTHA, M.Sc.

Irvan Amtha lahir di Yogyakarta pada 8 Desember 1960. Ia memiliki tiga anak dari pernikahannya dengan drg. Tila Chistiala.

Irvan menjadi CPNS di Pemprov DKI pada tahun 1990 setelah menjalani masa CPNS dari tahun 1989.

Karier PNS-nya dimulai dengan menjadi staf di Inspektorat selama tiga tahun, mulai Desember 2001 sampai Mei 2003. Bulan Mei 2003 ia pindah menjadi Kepala Seksi Bina Teknik Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Berikutnya ia menjabat Kepala Seksi Program dan Informasi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara mulai bulan Desember 2004. Sekitar dua tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum

Tata Air Jakarta Utara mulai Desember 2006 sampai Januari 2009.

Jabatan Irvan lalu menanjak lagi pada Mei 2013 dengan menjadi Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota. Ia lalu menjabat Wakil Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai Oktober 2014.

Setelah itu, ia diangkat menjadi Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Januari 2015. Jabatannya di BPPBJ hanya bertahan sekitar delapan bulan. Pada 7 Agustus 2015 ia dipindah menjadi staf administrasi di Badan Pendidikan dan Pelatihan. Bulan September 2015 ia diangkat menjadi Kepala Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Timur Dinas Tata Air.

Lalu mulai Januari 2016 sampai Januari 2017, Irvan Amtha menduduki posisi staf administrasi di Badan Pendidikan Pelatihan diteruskan menjadi Staf Teknis Tingkat Ahli di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Karier PNS Irvan Amtha lalu berakhir pada 20 Februari 2018.





BLESSMIYANDA, S.Pi, M.Si

Blessmiyanda lahir di Jakarta pada 13 Oktober 1969. Ia kini memiliki dua anak dari pernikahannya dengan Dr. Patricia Rante.S.

Pria yang akrab disapa Bless ini menamatkan S1 Ilmu Kelautan di Universtas Riau pada Oktober 1993 dan S2 Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia pada Januari 1998.

Dalam perjalanan BPPBJ sampai tahun 2020, Blessmiyanda adalah satu-satunya Kepala BPPBJ yang menjabat paling lama dalam dua periode jabatan. Periode pertama mulai 7 Agustus 2015 sampai 13 Juli 2017. Periode kedua mulai 25 September 2018, dan masih menjabat sampai penulisan buku ini.

Karier PNS Blessmiyanda dimulai pada 1 Maret 1997.

Ia ditempatkan menjadi staf Dinas Perikanan DKI Jakarta dengan pangkat penata muda golongan IIIA.

Berikutnya pada bulan Oktober 2000, Bless dipindah menjadi Staf Sudin Perikanan Jakarta Utara. Satu tahun kemudian ia diangkat menjadi Asisten Kesejahteraan Masyarakat di Sekretariat Kabupaten Adminitrasi Kepulauan Seribu. Bless lalu berkarier di Pulau Seribu selama 13 tahun.

Usai naik menjadi golongan III C, ia dipercaya menjadi Kepala Bagian Umum, lalu menjadi staf subbagian Sekretariat Kabupaten Adminitrasi Kepulauan Seribu.

Bulan April 2010 ia diangkat menjadi Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan. Sembilan bulan di jabatan itu, Bless lalu menjadi Asisten Perekonomian pada 21 April 2014.

Pada 2 Januari 2015, Bless diangkat menjadi Kepala Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggalah BPPBJ. Kariernya di BPPBJ lalu melesat. 7 Agustus 2015 ia diangkat menjadi Kepala BPPBJ.

Berikutnya bulan Juli 2017, Bless ditugaskan menjadi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya pada 25 September 2018, Bless kembali diangkat menjadi Kepala BPPBJ. Sampai buku ini ditulis, dia masih menjabat.





Ir. INDRASTUTY ROSARI OKITA, MT

Indrastuty lahir di Kediri pada 24 Oktober 1963. Ia memiliki dua anak dari pernikahannya dengan Ir. Abdimohar Siregar.

Ia menamatkan S1 Teknik Bangunan Air, Jalan, dan Jembatan di Institut Teknologi Surabaya pada tahun 1987. Gelar S2 Teknik serupa ia dapat di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000.

Indrastuty memulai karier PNS di Pemprov DKI Jakarta di Dinas Pekerjaan Umum sebagai Staf Seksi Perencanaan Teknis Jalan pada Agustus 1989.

Bulan Desember 2001, ia diangkat menjadi Kepala Seksi Bina Teknik Jembatan dan Terowongan Dinas Pekerjaan Umum. Lalu menjadi Kepala Sub Bina Teknik Jalan pada

September 2008.

Jabatan Indrastuty merangkak naik, ia lalu menjadi Kasudin PU Jalan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Januari 2009. Tiga tahun di jabatan itu, ia ditunjuk menjadi Kasudin PU Jalan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Kariernya berlanjut di Dinas Pekerjaan Umum. Ia ditunjuk menjadi Kepala Bidang Jembatan pada Juni 2013, lalu Januari 2015 diangkat menjadi Kepala Bidang Simpang dan Jalan Tak Sebidang. Hanya 20 hari di jabatan itu, Indrastuty lalu diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 22 Januari 2015.

Bulan Januari 2017, Indrastuty diangkat menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di tahun yang sama, yakni Juli 2017, ia ditunjuk menjadi Kepala BPPBJ DKI.

Jabatannya di BPPBJ DKI tergolong singkat, hanya Sembilan bulan. Jabatannya sebagai Kepala BPPBJ berakhir pada 8 Juni 2018. Ia lalu dipindah menjadi staf di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Kemudian diangkat menjadi staf teknis ahli BPSDM pada Juli 2018.





Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda dan para personel BPPBJ semakin aktif bersepeda. Bahkan beberapa staf sudah ada yang memilih bersepeda ke kantor, setiap hari. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan BPPBJ ikut berpartisipasi dalam gerakan bersepeda.

